

11

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

DPRD Jabar Tolak BBM Naik

BANDUNG (SINDO) – Enam dari tujuh fraksi di DPRD Jabar, masing-masing PAN, PKB, Golkar, PDIP, PKS, dan PPP, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Hanya fraksi Partai Demokrat yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Rencananya, sikap penolakan fraksi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna khusus DPRD Jabar. Ketua DPRD Jabar HAM Ruslan mengakui, keputusan penolakan tersebut merupakan sikap mayoritas fraksi di DPRD Jabar.

Sesuai tata tertib DPRD, kata Ruslan, sikap tersebut selanjutnya dibawa ke rapat paripurna khusus sebelum disampaikan ke pemerintah pusat. Ruslan meyakini penolakan tersebut didasari dengan mulai banyaknya aspirasi masyarakat ke DPRD. "Kita ambil sikap lebih awal, lebih baik. Namun, sebelum masuk pada tahap rapat paripurna khusus, sikap ini akan dibawa para rapat panitia musyawarah (panmus) dulu. Setelah itu, baru masuk tahap rapat paripurna khusus. Kemungkinan sebelum 22 Mei 2008 kita sudah menggelar rapat panmus untuk menentukan

sikap Dewan secara keseluruhan," terang Ruslan kepada wartawan kemarin.

Wakil Ketua DPRD Jabar Rudi Harsa Tanaya menyatakan, penolakan DPRD terhadap kebijakan rencana menaikkan harga BBM tersebut didasari banyaknya masyarakat yang mengeluh atas keputusan pemerintah tersebut. "Beban masyarakat akan lebih berat. Selain itu, aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan sudah marak," kata Rudi.

Wagub Jabar Nu'man Abdul Hakim bisa menghargai sikap penolakan DPRD Jabar tersebut. Apalagi, Nu'man sendiri mengaku bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah atas rencana menaikkan harga BBM. "Tapi, pemerintah daerah tidak bisa mengelak jika pemerintah pusat *keukeuh* menaikkan harga BBM. Terus terang saya tidak sependapat dengan pemerintah pusat karena akan menambah beban masyarakat.

Ini tugas baru bagi gubernur dan wakil gubernur baru bagaimana menyikapi kenaikan ini harga BBM ini," ujar Nu'man kepada wartawan se usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar kemarin.

Sebelumnya, sekitar 100 mahasiswa yang mengatasnamakan BEM se-Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang Gedung Sate. Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintahan SBY-JK menjamin kesejahteraan rakyat. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah, massa mengancam akan melakukan aksi tiap hari. "Kenaikan harga BBM merupakan bukti kegagalan pemerintahan SBY-JK. Alasan beban anggaran adalah logika yang sangat menyatukan di saat kekayaan negara dibawa kabur oleh koruptor dan obligor BLBI tidak tersentuh. Sangat aneh di negeri zamrud khatulistiwa yang sangat kaya raya ini justru rakyatnya miskin," kata salah seorang perwakilan aksi dalam orasinya kemarin.

Di Solo, aksi menolak ren-

cana kenaikan harga BBM digelar masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat (Amuk Rakyat). Aksi tersebut dilakukan dengan membajak dua truk tangki BBM yang sedang lewat. Saat melintas, truk tangki yang memuat minyak tanah subsidi itu berisi 5.000 liter langsung ditahan. Pendemo menaiki tangki tersebut sambil mengibar-ngibar kan bendera.

Sopir truk tangki BBM Yogyakarta hanya bisa pasrah. Dia terpaksa mengikuti kemauan peserta demo dengan berjalan pelan mengikuti rombongan. Menurut dia, minyak tanah bersubsidi itu hendak dikirim ke Sangkrah, Pasar Kliwon. "Mau bagaimana lagi kalau sudah begini," ujarnya. Massa juga membajak truk tangki pengangkut BBM jenis Pertamina berkapasitas 20.000 liter. Setelah beberapa saat dibajak, dua truk tangki itu akhirnya dilepas setelah ada negosiasi dengan petugas polisi.

Massa menilai, jika harga BBM naik, masyarakat kecil yang akan tertindas. Massa juga menjemput Wakil Wali

Kota Solo FX Hadi Rudyatmo untuk berorasi di depan Balai Kota Solo. Perwakilan massa menjemput Rudy-sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo di ruang kerjanya.

Rudy menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. Rudy siap mendukung penolakan rencana kenaikan harga BBM. "Pemkot Solo mendukung penolakan kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat harus mencari solusi lain selain menaikkan harga BBM," tegasnya.

Menurut Rudy, solusi yang dapat ditempuh antara lain dengan memangkas tunjangan pejabat eselon I hingga IV. Dia mengatakan, jika langkah itu ditempuh, rakyat kecil tidak akan semakin terpuruk dengan rencana kenaikan harga BBM. Selain Amuk Rakyat, aksi serupa juga dilakukan Front Pembebasan Nasional (FPN). Puluhan massa FPN menggelar aksi dimulai dari Kantor HMI di Jalan Yosodipuro *long march* hingga Gladak. Pada intinya, FPN menyatakan menolak dan siap menggagalkan rencana kenaikan harga BBM tersebut.

(gin gin tigin ginulur/
sumarno)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA.
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

Harga Pertamina & BBM Industri Naik Lagi

JAKARTA, (PR).-

PT Pertamina (persero) kembali menaikkan harga bahan bakar khusus (BBK), yakni pertamax, pertamax plus, pertamina DEX, dan biopertamax mulai 15 Mei 2008. Untuk pertamax, kenaikannya maksimal Rp 250,00. Kenaikan harga BBK tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga No. Kpts-069/F00000/2008-So Tanggal 13 Mei 2008 dan berlaku di seluruh wilayah penjualan.

Dengan kenaikan itu, harga pertamax di UPms I jadi Rp 9.300,00 UPms II Rp 9.300,00, Bangka Rp 10.400,00, UPms III Rp 8.950,00, SPBU Bersaing Rp 8.900,00, UPms IV dan V Rp 9.150,00, Bali Rp 9.200,00, UPms VI Rp 9.100,00, UPms VII Rp 9.350,00, Palu Rp 10.350,00.

Sementara itu, harga pertamax plus di Batam jadi Rp 8.600,00/liter, UPms I Rp 9.450,00, UPms III Rp 9.250,00, SPBU Bersaing Rp 9.200,00, UPms IV dan V Rp 9.400,00, dan UPms VI Rp 9.400,00. Sementara harga pertamina DEX: UPms III dan UPms V Rp 11.100,00 dan biopertamax: UPms III Rp 8.950,00, UPms V Rp 9.150,00 dan Bali Rp 9.200,00

Selain pertamax, Pertamina juga menaikkan harga BBM nonsubsidi lainnya, yakni untuk industri mulai 15 Mei 2008. Kenaikan BBM untuk industri cukup beragam, paling besar untuk minyak bakar yang naik hingga 4,3%.

Kenaikan harga BBM untuk industri itu sesuai dengan keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) No. Kpts-068/F00000/2008-0 tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Ba-



PRESETYO UTOMO/ANTARA

*PETUGAS mengisi bahan bakar jenis pertamax di salah satu SPBU di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mulai 15 Mei 2008, Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar khusus, yakni pertamax, pertamax plus, pertamina DEX, dan biopertamax.**

kar Minyak Pertamina Tanggal 13 Mei 2008, menetapkan bahwa terhitung mulai 15 Mei 2008, pukul 0.00 WIB.

"Perubahan harga di atas disebabkan MOPS dalam rupiah mengalami kenaikan berkisar antara 1,2% sampai dengan 4,3% dan nilai tukar rupiah melemah 0,37% dari perhitungan awal bulan lalu," ucap Vice President Komunikasi Pertamina Wisnuntoro dalam siaran persnya, Rabu (14/5).

Dibandingkan dengan harga pada 1 Mei 2008, harga BBM nonsubsidi perio-

de medio Mei 2008 mengalami perubahan harga sebagai berikut: premium naik 2,1%, minyak tanah naik 1,2%, minyak solar 1,2%, minyak diesel naik 1,4%, dan minyak bakar naik 4,3%.

Sementara itu, harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi bagi transportasi umum tidak mengalami perubahan dan tetap Rp 4.500,00/liter, untuk premium dan Rp 4.300,00/liter untuk solar. Sementara harga minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat dan industri kecil tetap Rp 2.000,00/liter. (A-34/dtc)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Demo BBM Ditunggangi

JAKARTA, (PR).-

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sjamsir Siregar mengatakan, aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang marak akhir-akhir ini, ditunggangi oleh mantan pejabat negara.

"Kemarin saja *kan* sudah ada, jelas. Kalian sudah tahu itu, *nggak* usah tanyalah. Ada yang bekas menteri, ada juga pejabat," kata Sjamsir, sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Jakarta, Rabu (14/5).

Meski demikian, aksi demo menolak kenaikan harga BBM diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir bulan ini. Bahkan, pada akhir Mei, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jabar, Banten, dan DKI, berencana menggelar demo berkekuatan 200 ribu pekerja.

Menurut Sjamsir, aksi unjuk rasa itu sudah tentu mengganggu ketertiban dan ke-

amanan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu lebih menjelaskan, memberi pengertian dan pemahaman kepada masyarakat, termasuk anggota DPR selaku wakil rakyat, karena banyak yang tidak mengerti.

"Saya lihat di DPR ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Mahasiswa juga banyak yang *nggak ngerti*. Mungkin salah satu menteri harus ada yang memberi penjelasan, ini *lho* sebabnya naik. Itu *kan* perlu dijelaskan. Sosialisasi juga perlu," katanya.

Menanggapi pernyataan Kepala BIN tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto meminta semua pihak untuk mengelola situasi agar menjadi aman, tertib, dan damai. Dia meminta semua pihak, termasuk media massa, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, bahwa masalah kenaikan BBM itu tidak hanya menjadi persoalan dalam negeri tetapi juga masalah internasional.

Kapolri juga meminta para spekulan tidak mencari keuntungan dari situasi ini. Dia meminta semua pihak mendukung agar distribusi BBM berjalan lancar. "Jangan sampai ada warga yang membeli, menimbun, apalagi dengan tujuan untuk mencari keuntungan memanfaatkan situasi saat ini. Tolong dihindari. Nanti yang terbukti melakukan pelanggaran secara hukum akan kita tindak," kata Sutanto.

Blokir pantura

Rencana kenaikan harga BBM terus mendapat penolakan dari masyarakat. Nelayan Cirebon menolak rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Mereka menilai, program BLT tidak efektif bahkan tidak tepat sasaran. "Pengalaman pemberian BLT beberapa waktu lalu, tidak seluruh nelayan dan warga miskin mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, dampak langsung kenaikan BBM sangat berpengaruh bagi kami untuk mencari nafkah," kata Wawan, nelayan dari Kampung Pesisir Kota Cirebon, Rabu (14/5).

Dahyan Kusnandi, salah seorang petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Pelabuhan Kejawan Kota Cirebon, mengungkapkan, sejak BBM naik tahun 2005 lalu, jumlah nelayan terus menurun. Pada tahun 2005, perahu nelayan berukuran besar yang bersandar di Pelabuhan Kejawan masih tercatat hingga 100 perahu. Saat ini, yang bertahan tinggal sekitar 30 perahu.

"Jumlah nelayan terus merosot sejak kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Saya tidak yakin, kalau harga BBM jadi dinaikkan, apa nelayan yang tersisa masih bisa bertahan," kata Dahlan.

Menurut Ketua KUD Mina Bumi Bahari Gebang, Dade Mustofa, nelayan Cirebon menolak rencana kenaikan harga BBM, apalagi pemberian BLT sebagai kompensasinya.

"Kalau pemerintah *ngotot*

menaikkan harga BBM, kami nelayan pantura akan memblokir jalur utama Pantura. Daripada pemerintah memberikan BLT yang tidak bisa dirasakan seluruh nelayan, lebih baik kami turun ke jalan," katanya.

Namun demikian, kata Dade, ancaman turun ke jalan bisa saja batal, kalau pemerintah tetap memberikan subsidi solar kepada nelayan, yang lebih bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh nelayan. Teknisnya, pemberian subsidi tersebut bisa dilakukan langsung melalui solar packed dealer nelayan (SPDN) yang sudah ada di tiap-tiap tempat pelelangan ikan (TPI).

Kepung istana

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) se-Jabar, Banten, dan DKI Jakarta, sepakat menggelar aksi unjuk rasa ke Istana Presiden, untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Aksi yang akan dilaksanakan 26-27 Mei 2008 nanti, sedikitnya akan diikuti 200.000 buruh SPSI se-Jabar, Banten, dan DKI Jakarta. Mereka akan memaksa pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Kesepakatan itu diputuskan dalam diskusi dan perencanaan

aksi menolak kenaikan BBM yang diikuti 64 orang perwakilan pengurus DPC K-SPSI se-Jabar, Banten, dan DKI Jakarta, di Sekretariat DPC K-SPSI Cimahi, Jln. Lurah, Kel. Setiamanah, Cimahi, Rabu (14/5). Diskusi dipimpin ketua panitia diskusi, Bawit Umar dari Kab. Bandung Barat dan Edi Suherdi dari Kota Cimahi.

Wakil Ketua DPD K-SPSI Jabar, Darju, menginstruksikan agar seluruh DPC K-SPSI di Jabar, menyukseskan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, mereka juga diingatkan agar tidak bertindak anarkis. Aspirasi massa buruh yang juga mewakili masyarakat, harus disampaikan secara profesional dan rasional. Diharapkan, target pembatalan rencana kenaikan harga BBM pun tercapai.

"Kita harus bisa meyakinkan pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Karena pemerintah belum juga menanggapi aksi-aksi massa yang dilakukan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Aktivis buruh nasional, Jatmiko, mengingatkan SPSI agar mengerahkan massa sebanyak-banyaknya ke Jakarta, mengingat pemerintah saat ini belum mengenal ruang diskusi. "Sekuat apa pun, kalau tidak punya kekuatan massa, Anda tidak akan berhasil. Jadi, kalau otak tidak bisa berjalan, maka kekuatan otot yang harus maju," ucapnya.

Sementara itu, Robin Sihombing, perwakilan K-SPSI Kota Cimahi mengingatkan agar aksi unjuk rasa kali ini tidak didomplengi kepentingan kelompok tertentu. Mereka harus berani menanggung risiko apa pun. Karena dengan menaikkan harga BBM, berarti pemerintah telah siap melihat bertambahnya kemiskinan dan banyaknya perusahaan yang tutup.

Fauzi, perwakilan DPD K-SPSI Banten minta agar mereka mengkaji sikap Apindo dan Kadin, karena menyetujui rencana kenaikan harga BBM. Padahal, sebelumnya, mereka selalu ikut menolak rencana itu. (A-92/A-130/A-136)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

6 Fraksi Tolak Kenaikan Harga BBM

BEM Mengajukan Tiga Alternatif Solusi

BANDUNG, (PR).-

Enam dari tujuh fraksi di DPRD Jawa Barat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demikian hasil rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Bandung, Rabu (14/5).

Ketua DPRD Jabar H.A.M. Ruslan didampingi Wakil Ketua DPRD Jabar Rudy Harsa Tanaya mengatakan, fraksi-fraksi yang menolak adalah PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, dan PKS. "Meski demikian, ini sudah merupakan suara mayoritas," kata Ruslan.

Namun, ia menambahkan,

untuk membuat pernyataan resmi lembaga harus melalui rapat paripurna khusus. Rapat paripurna khusus tersebut akan dilaksanakan secepatnya.

Wakil Gubernur Nu'man Abdul Hakim, se usai rapat paripurna menyatakan, akan meneruskan aspirasi itu ke gubernur, eksekutif dan pusat.

Saat rapat paripurna berlangsung, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bandung Raya berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, di depan Gedung Sate.

Koordinator BEM Bandung Raya, Irwan, mengatakan, masih ada kebijakan lain tanpa

harus menaikkan harga BBM. "Kami mengajukan tiga alternatif solusi, yaitu kedaulatan energi, stop kemewahan pejabat, dan berantas korupsi," tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD Jabar Rahadi Zakaria dan Sekretaris Komisi B, Maman Abdurahman, menyatakan sependapat dengan mahasiswa. "Pemerintah seharusnya menasionalisasikan aset negara dan pemberantasan korupsi, khususnya kasus BLBI," ujar Rahadi.

Rahadi juga mengajak mahasiswa ikut serta ke Jakarta saat DPRD Jabar menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat.

Sementara itu, sekitar 50 mahasiswa dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dengan membakar ban di Jln. A.H. Nasution, Bandung. Pengunjuk rasa sempat aksi dorong dengan polisi.

Aksi penolakan kenaikan BBM juga disuarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar, apalagi alasan pemerintah atas kenaikan harga BBM tersebut tidak masuk akal. "Alasan besarnya subsidi menjadi lebih Rp 300 triliun bila BBM tidak segera dinaikkan, patut diper-

tanyakan. Alasan itu baru benar bila seluruh minyak mentah diimpor dari luar negeri," kata Juru Bicara HTI Jabar, Ustaz Luthfi Affandi, dalam pernyataan persnya yang diterima "PR", Rabu (14/5).

Penghitungan ulang

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan mengatakan, untukantisipasi kenaikan harga BBM, perlu dilakukan penghitungan ulang pada ketersediaan anggaran pembangunan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jabar 2008. Namun, secara detail masalah yang perlu diperhi-

tungan belum terungkap. "Kenaikan harga BBM akan berimbas pada ketersediaan anggaran. Nanti dibahas dalam APBD perubahan untuk mengantisipasi kekurangan dana," ujarnya di Gedung Rektorat Institut Teknologi Bandung, Jln. Tamansari, Bandung, Rabu (14/5).

Mengenai bantuan langsung tunai (BLT), Heryawan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data agar bantuan diserahkan tepat sasaran. Data yang dilansir BPS menyatakan jumlah penerima BLT mencapai 13,5% total penduduk di Jabar. (CA-171/A-158/A-71)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

Pertamina Diminta Tambah Pasokan

BANDUNG, (PR).-

Saluran pengisian dan pengangkutan *bulk* elpiji (SPPBE) dan agen di Bandung Raya, mengharapkan Pertamina konsisten memasok elpiji minimal sebanyak 100 ton per hari ke setiap SPPBE. Hal itu perlu dilakukan supaya gangguan pasokan elpiji yang terjadi akibat kelangkaan selama hampir dua bulan segera teratasi.

Kepala Pemasaran SPPBE Purnatarum Murni Rahayu Erwin di Bandung, Rabu (14/5), mengakui saat dialihkan pasokan dari Balongan ke Jakarta mulai ada peningkatan dengan memperoleh elpiji sekitar 95 ton per hari dari sebelumnya yang hanya 80 ton (pasokan terakhir dari Balongan-red.)

Akan tetapi, dengan masih kurangnya pasokan elpiji ke SPPBE di Bandung Raya, ke-

langkaan gas elpiji masih akan tetap berlangsung. "Mungkin sekitar satu minggu lagi kelangkaan akan berkurang. Dengan catatan pasokan dari Pertamina stabil, bahkan bisa lebih dari 100 ton per hari," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Operasional SPPBE Bajubang Gasingdo Solihin mengatakan, dua hari terakhir ia mendapat pasokan elpiji 112 ton. Sebelumnya, dari Balongan ia hanya mendapatkan 80 ton. "Sebenarnya kami mendapat jatah 96 ton, tetapi Pertamina memperbolehkan penambahan sebanyak 16 ton," kata Solihin.

Meski demikian, jumlah tersebut masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan elpiji. Sebelum kelangkaan elpiji terjadi, Bajubang mendapatkan suplai elpiji yang lebih banyak, yaitu 120 ton per hari.

Padahal kebutuhan elpiji tiga kilo sebulan terakhir ini terus meningkat. "Sebelumnya, kebutuhan elpiji tiga kilo 10-15 ton/hari, kini telah mencapai 30-40 ton/hari," kata Solihin.

Sampai saat ini, Solihin tidak mengetahui kapan ia akan mendapatkan pasokan yang dapat mencukupi kebutuhan akan elpiji. "Namun, dengan adanya penambahan 80 ton ke 100 ton per hari, saya yakin keadaan bertambah lebih baik," kata Solihin.

Ditemui ditempat terpisah, Kepala Penjualan Agen elpiji PT Limas Raga Inti Yono Syarif menuturkan dirinya menyambut positif langkah Pertamina yang memberikan jatah 100 ton per hari kepada empat SPPBE di Bandung Raya. Dirinya berharap langkah itu bisa mengembalikan jumlah pasokan

kan tabung ke agen yang sempat menurun sejak awal April.

"Saya tidak tahu berapa jumlah ideal pasokan elpiji bagi Bandung Raya. Akan tetapi, yang jelas satu-satunya cara mengurangi gejolak akibat kelangkaan elpiji adalah menambah jumlah pasokan sampai seluruh tabung di masyarakat terisi," katanya.

Ia justru memprediksi butuh waktu lebih dari satu bulan untuk bisa memulihkan gejolak akibat kelangkaan. Untuk itu konsistensi dan komitmen Pertamina dalam menjaga pasokan supaya tetap stabil di atas 100 ton per hari ke SPPBE sangat dibutuhkan.

Sejak awal April, pasokan elpiji yang dijual dari gudang PT Limas Raga Inti masih berkisar di angka 1.500 tabung per hari. Padahal sebelum terjadi gang-

guan distribusi dari SPPBE, Agen di Jln. Emong Bandung ini mampu memperoleh pasokan dari SPPBE sebanyak 4.000 tabung per hari. Sejak satu bulan terakhir, Limas Raga tidak melayani penjualan *sales point* karena habis diserbui masyarakat.

Sebelumnya, SR LPG Region II Area V Gas Domestik Pertamina Arsono Kuswardanu mengungkapkan *recovery* akibat gangguan distribusi di Bandung Raya membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. "Untuk itu, Pertamina mengambil inisiatif meningkatkan jatah pasokan kepada empat SPPBE di Bandung Raya masing-masing 100 ton per hari. Bahkan bila memungkinkan jatah itu akan ditingkatkan," tuturnya. (CA-166/CA-174)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : **5**

TAHUN 2008

Pertamina Didesak Cabut Larangan

KARAWANG, (PR).-

Komisi C DPRD Karawang mendesak PT Pertamina untuk menarik Surat Edaran No. 069/F13120-2008-83 tentang pelarangan penjualan BBM dalam bentuk kemasan, seperti drum, jeriken, atau kantong plastik. Alasannya, surat edaran tersebut dianggap sebagai kebijakan yang kontraproduktif dan tidak berpihak kepada ekonomi mikro.

"Kalau surat edaran itu terus diberlakukan, bakal ada ribuan pedagang eceran yang gulung tikar. Artinya akan muncul pula pengangguran baru," ujar salah seorang anggota Komisi C, Nanda Suhandi, Rabu (14/5).

Apalagi, lanjut Nanda, ditinjau dari segi aturan, kebijakan tersebut sangat lemah. Pihak Pertamina menggunakan Perpres No. 9/2006 sebagai pertimbangan (acuan hukum-red) terbitnya surat edaran tersebut. Padahal, dalam Perpres No. 9/2006 sendiri disebutkan, BBM bersubsidi selain dijual untuk kendaraan juga dapat dijual kepada para pelaku usaha kecil, seperti pedagang BBM eceran dan sejenisnya.

Selain itu, kata Nanda, kebijakan itu sangat bertentangan dengan program pemerintah pusat dalam hal peningkatan usaha kecil dan menengah

(UKM). "Kalau BBM tidak ingin dimainkan oleh para spekulan, Pertamina seharusnya memperketat pengontrolan tanpa harus mengorbankan rakyat jelata," katanya.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman, para pelaku penyimpangan BBM bersubsidi adalah para pedagang besar yang memiliki modal kuat. Artinya, tidak mungkin pedagang kecil memanfaatkan isu kenaikan BBM untuk memperkaya diri sendiri.

Nanda mengatakan, saat ini masyarakat Karawang mulai resah akibat terbitnya surat edaran tersebut. Mereka tidak bisa membeli BBM ke SPBU dengan menggunakan jeriken dan kemasan lain. Padahal, tidak semua masyarakat Karawang menggunakan BBM seperti premium dan solar untuk menghidupkan kendaraan.

Menurut dia, untuk mencegah terjadinya gejolak sosial berkepanjangan, Menteri Negara BUMN harus bisa memberi pengertian kepada Pertamina agar bersedia mencabut surat edaran itu. "Di daerah perkotaan, mungkin saja surat tersebut bisa diterapkan. Tetapi di Karawang tidak bisa, karena jumlah SPBU sangat terbatas," ujarnya.

Tanpa koordinasi
Berdasarkan pantauan "PR",

sejak surat edaran tersebut terbit, banyak pedagang bensin eceran yang ada di desa-desa menutup kiosnya. Mereka mengaku tidak bisa berjualan karena tidak bisa membeli bensin ke SPBU dengan menggunakan jeriken.

"Ketika kami datang ke SPBU, pihak SPBU tidak mau melayani kami. Alasannya, mereka takut terkena sanksi dari Pertamina," ujar Yusuf, pedagang bensin eceran di Desa Pulojaya, Kec. Lemahabang Wadas, Rabu (14/5).

Asisten Pembangunan (Asda II) Setda, Drs. Aa Nugraha Mitra Kusumah membenarkan jika Pertamina telah mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan penjualan BBM dalam bentuk kemasan. Surat tersebut ditandatangani Bagian Pemasaran BBM Retail Region III Sales Area Manager Bodetabek, Kusumo Wibowo. Surat tersebut langsung diedarkan ke semua SPBU yang ada di Kab. Karawang tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.

Akibatnya, para pengelola SPBU tidak berani lagi melayani konsumen nonkendaraan. Dalam surat edaran yang ditandatangani 7 April lalu itu, Pertamina mengancam akan menjatuhkan sanksi keras kepada SPBU yang tidak mematuhi instruksi tersebut. (A-106)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Elpiji Sulit Diperoleh di Kab. Cianjur

CIANJUR - Warga Cianjur pengguna elpiji untuk kebutuhan sehari-hari, hingga Rabu (14/5) masih banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan gas. Kondisi itu terjadi bersamaan dengan terbatasnya stok gas di tingkat agen yang ada di Kab. Cianjur. Sedangkan permintaan cukup banyak sehingga tidak semua permintaan konsumen bisa dipenuhi sekaligus. Sebab, pihak agen memberlakukan pembatasan jumlah pembelian konsumen. Berdasarkan informasi, Rabu (14/5), akhir-akhir ini banyak warga Cianjur yang mengeluh karena kesulitan mendapatkan gas. Padahal sebelumnya, mereka bisa mendapatkan gas cukup mudah di warung-warung terdekat. Saya kebetulan tepat, gas masih ada. Kalau terlambat bisa-bisa tidak kebagian lagi," ujar Nanang warga Panembong Kec. Cianjur, Rabu (14/5). Lia salah seorang staf agen elpiji di kawasan Cianjur Kota, mengatakan saat ini pihaknya juga mendapat kiriman gas dari Bandung terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah permintaan konsumen. Kondisi tersebut sering membuat pihaknya kewalahan melayani konsumen. (A-116)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Pengecer BBM Terancam Bangkrut

Sejak Adanya Pelarangan Pembelian Bensin Menggunakan Kemasan

BEKASI, (PR).-

Para pengecer bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bekasi terancam bangkrut seiring dengan munculnya pelarangan pembelian bensin menggunakan kemasan, seperti jeriken, drum, dan botol. Pasalnya, mereka tidak tahu harus ke mana lagi mendapatkan bensin untuk dijual.

"Kalau masih sulit mendapatkan bensin seperti ini, mendingan bulan depan saya tutup saja," kata Atim (26), pengecer di Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Rabu (14/5).

Menurut Atim, baru tiga hari belakangan ini ia mengetahui adanya pelarangan tersebut. Demi mendapatkan untung, ia menggunakan sepeda motor bertangki besar untuk membeli bensin sebagai pengganti jeriken. Atim menuturkan, sehari bisa dua kali ia membeli bensin dari SPBU dengan motor berkapasitas 15 liter tersebut. "Kalau tidak begini, susah untuk dapat bensin," ujarnya.

Sebelumnya, ia sering membeli bensin dengan menggunakan 2 jeriken yang masing-masing berkapasitas 20 liter. Namun, kini ia hanya mampu membeli 30 liter. Selain itu, jumlah pembeli pun terus me-



DEWIYATINI/PR

*PETUGAS Polsek Jati Asih Kota Bekasi berjaga-jaga di SPBU Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (14/5). Penjagaan itu sebagai antisipasi penyalahgunaan pembelian BBM. Selain dijaga petugas, setiap dua jam mobil patroli berkeliling di 4 SPBU yang berada di Kec. Jatiasih.**

nurun. Dari satu liter bensin, keuntungannya sebesar Rp 500,00, sedangkan harga beli Rp 4.500,00. Artinya, jika 30 liter habis terjual dalam sehari, ia mendapatkan keuntungan Rp 15.000,00.

Hal serupa juga dialami

oleh pengecer lainnya, seperti Sanusi (45) di Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih. Ia terpaksa menutup usahanya karena sulit mendapatkan bensin.

Dari hasil pantauan "PR", di sepanjang Jln. Pekayon hingga Pondok Gede, pengecer yang

semula berjejer dengan jarak 200-300 meter, kini tidak tampak lagi. Sebagian besar dari mereka menutup usaha mereka hingga ada kebijakan yang membolehkan mereka membeli bensin dengan jeriken atau botol plastik.

Tim patroli

Sementara itu, pemilik SPBU di Kel. Jatirasa, Hartanto mengatakan terpaksa melarang pembeli bensin dengan jeriken karena sudah merupakan peraturan. Padahal, sebelumnya pompa bensin itu terbiasa menjual bensin kepada para pengecer yang namanya telah terdata berdasarkan rekomendasi dari Kelurahan dan Polsek Jatiasih.

"Agak sulit juga *sih* memberitahukan kepada mereka meskipun kami telah memasang pengumuman. Namun, para pengecer terpaksa mengikuti ketentuan tersebut," ucapnya.

Sementara itu, jajaran Polsek Jatiasih menyiapkan tim patroli untuk mengantisipasi gejala menghadapi rencana kenaikan BBM di setiap SPBU. "Setiap dua jam, mobil patroli akan mendatangi tiap SPBU. Selain itu, satu polisi ditempatkan di tiap SPBU," ujar Kapolsek Jatiasih AKP Dewi Setyowati.

Penempatan petugas itu, menurut dia, dimaksudkan untuk mengurangi penyalahgunaan dalam bentuk penimbunan. Petugas pun harus waspada dengan kendaraan yang sama yang bolak-balik mengisi bensin. (A-153)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

Permata Demo Kenaikan Harga BBM

TAHUN 2008

PURWAKARTA, (PR).-

Arus kendaraan yang keluar dari gerbang tol Jatiluhur Kab. Purwakarta, sempat tertahan beberapa lama akibat blokade puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata) saat melakukan demonstrasi menolak rencana kenaikan harga BBM, Rabu (14/5) kemarin.

Dalam aksinya tersebut, para mahasiswa meminta kepada seluruh elemen di Kab. Purwakarta untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebelumnya, kalangan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Purwakarta melancarkan demo menolak kenaikan harga BBM.

Dari Sekretariat Permata, puluhan mahasiswa melakukan *long march* menuju gedung DPRD menyusuri ruas Jalan Ahmad Yani dengan mengambil arah ke gerbang tol Jatiluhur guna menyampaikan aspirasinya menolak rencana kenaikan harga BBM.

Di sekitar gerbang tol, para mahasiswa sempat menutup ruas jalan sehingga kendaraan yang akan keluar tol terpaksa harus berhenti menunggu para mahasiswa selesai berorasi.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengajak semua pengguna kendaraan untuk turut berjuang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Imbas dari kenaikan BBM sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, rencana menaikkan harga BBM itu harus kita tolak bersama," ujar seorang mahasiswa saat berorasi.

Seusai memblokir ruas jalan di sekitar gerbang tol, para mahasiswa kemudian melanjut-

jutkan aksinya ke gedung DPRD. Setelah berorasi hampir satu jam di pintu gerbang masuk ke gedung DPRD. Sejumlah anggota dewan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Sigit Soeroso mendatangi tempat para pedemo berorasi untuk berdialog sambil lesehan.

Sejalan

Kepada para mahasiswa, Ketua DPRD Purwakarta mengatakan aspirasi para mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM sejalan dengan para wakil rakyat. Para wakil rakyat pun saat ini tengah memproses rancangan penolakan kenaikan harga BBM agar dijadikan keputusan secara kelembagaan.

"Saya paham bahwa keinginan para mahasiswa itu harus secepatnya diakomodasi, tetapi di dewan rencana untuk menolak kenaikan harga BBM itu harus melalui proses. Saya berjanji dalam waktu dua minggu akan keluar putusan DPRD untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM," ujar Sigit.

Para mahasiswa, sebagaimana disampaikan koordinator aksi, Arif Rahman Hakim, berjanji akan kembali mendatangi gedung DPRD guna menagih janji tersebut. "Permata akan berdemo lagi ke DPRD guna menagih janji dewan yang akan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM," ungkapnya. **(A-86)*****

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

GAS

MCL Eksplorasi Lapangan Jambaran

BOJONEGORO – Mobil Cepu Ltd (MCL), anak usaha Exxon Mobil Corporation dan operator pengembangan Blok Cepu, kemarin, mengawali kegiatan pengeboran di lapangan Jambaran, Bojonegoro, Jawa Timur. Presiden Direktur MCL Michael K Nelson di Bojonegoro, Rabu (14/5), mengatakan, kegiatan pengeboran ini akan terdiri atas satu sumur dan penyelesaiannya memakan waktu kurang lebih tiga bulan. Sumur yang akan dibor saat ini adalah sumur kedua di lapangan Jambaran. Sumur ini akan membantu dalam penilaian cadangan di Jambaran. “Dimulainya kegiatan pengeboran di Jambaran merupakan tonggak penting dalam pengembangan Blok Cepu,” ujar Nelson dalam siaran persnya, kemarin. Exxon dan anak usahanya telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Sejak 1968, perusahaan migas asal AS itu telah berinvestasi US\$ 17 miliar di Indonesia. **(dr)**

23

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Harga BBM Nonsubsidi Naik 4,3%

JAKARTA – PT Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk industri hingga 4,3% yang berlaku mulai hari ini. Kenaikan harga tersebut disebabkan MOPS dalam rupiah naik berkisar 1,2-4,3% dan nilai tukar rupiah melemah 0,37% dari perhitungan awal Mei 2008.

Dibanding harga pada 1 Mei 2008, kenaikan harga BBM nonsubsidi periode pertengahan bulan ini bervariasi. Harga premium naik 2,1%, minyak tanah 1,2%, minyak solar 1,2%, minyak diesel 1,4%, dan minyak bakar 4,3%. "Kami juga mengubah perhitungan harga," ujar juru bicara Pertamina Wisnuntoro dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (14/5).

Semula harga penebusan didasari atas tabel rincian harga penebusan dalam satuan satu liter dikalikan terhadap volume penebusan. Hal ini juga menyesuaikan sistem yang diterapkan untuk menghitung harga penebusan saat ini. "Karenaitu, harga penebusan untuk volume tertentu dihitung ulang dari harga dasar dikalikan volume penjualan ditambah pajak-pajak," ujar dia.

Sementara itu, harga BBM premium dan solar bersubsidi bagi transportasi umum hingga kemarin tidak berubah, yaitu tetap sebesar Rp 4.500/liter untuk premium dan Rp 4.300/liter untuk solar. Sedangkan harga minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat dan industri kecil tetap sebesar Rp 2.000/liter.

Pertamax Juga Naik
PT Pertamina juga menaik-

kan harga bahan bakar khusus (BBK), yaitu Pertamina, Pertamina Plus, Pertamina DEX dan Biopertamax mulai hari ini.

Harga Pertamina Plus berisar Rp 8.600 (di Batam) hingga tertinggi Rp 9.400 di Pertamina Unit Pemasaran VI. Sementara itu, Pertamina mulai Rp 9.300 di Unit Pemasaran I dan Rp 10.350 di Palu, Sulawesi Tengah. Harga Pertamina Dex mencapai Rp 11.100 dan Biopertamax mulai Rp 8.950 di Unit Pemasaran III hingga tertinggi di Bali Rp 9.200.

Vice President BBM Retail Pertamina Djaelani Sutomo memperkirakan, penjualan Pertamina tahun ini akan turun 20% dari realisasi tahun lalu 500 ribu kiloliter menjadi hanya 400 ribu kiloliter.

Menurut Djaelani penyebab turunnya penjualan BBM jenis Pertamina karena ada disparitas cukup besar antara harga BBM subsidi non-subsidi. Saat ini harga BBM Pertamina di Jadebotabek sekitar Rp 8.750 per liter atau hampir dua kali lebih mahal dibanding premium saat ini seharga Rp 4.500 per liter. "Karena harganya beda jauh, banyak masyarakat lebih memilih menggunakan premium daripada Pertamina," katanya.

Djaelani mengatakan, pihaknya menambahkan etanol pada BBM jenis Biopertamax dan Biopremium menjadi 5% dari sebelumnya 3%. Hal itu dilakukan karena Biopertamax tidak memperoleh subsidi dan harganya diserahkan pada pasar. (pya/her)

24

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **5** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.6

TAHUN 2008

'Pemerintah perlu optimalkan kilang'

JAKARTA: Pemerintah perlu melakukan swasembada energi dengan memanfaatkan kilang-kilang minyak dan gas yang masih potensial untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Revitriyoso Husodo, Program Manager Jaringan dan Budaya Institute for Global Justice (IGJ) mengungkapkan sedikitnya terdapat delapan kilang minyak di Indonesia yang jika diolah dengan serius dapat menghasilkan 103.000 barel per hari.

"Minimal ada delapan kilang minyak yang dianggap tidak ada atau kecil produksinya, seperti di Pangkalan Brandan, Cepu, Plaju, Sungai Gerong, Cilacap, Eksor, Indramayu dan Balik Papan," ujarnya di kantornya, di Jakarta, kemarin. (BISNIS/16)

25

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: **T.6**

TAHUN 2008

Operasi 3 lapangan migas tertunda

JAKARTA: Produksi minyak dan gas (migas) tiga lapangan—Senoro, Pulau Gading & Sungai Kenawang, lapangan Sadewa—dipastikan tertunda akibat operator dan BP Migas belum mencapai kesepakatan soal harga.

Menurut data BP Migas, lapangan Senoro dioperasikan Pertamina dan Medco E&P, lapangan Pulau Gading dan Sungai Kenawang oleh JOB Pertamina-Amerada Hess.

Sementara itu, lapangan migas Sadewa yang dikerjakan Unocal Indonesia Co. dan Chevron Indonesia dengan proyeksi produksi mencapai 8.272,38 barel per hari. (BISNIS/DLE)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.6

TAHUN 2008

Eksplorasi

Permintaan minyak global diproyeksi turun

Permintaan minyak global
(juta barel per hari)

April	87,23
Mei	86,84

PARIS: International Energy Agency (IEA) memotong proyeksi permintaan minyak global untuk bulan keempat akibat naiknya harga komoditas itu sehingga permintaan konsumsi dari negara berkembang akan mengalami penurunan.

Lembaga yang menjadi penasihat bagi 27 negara pengekspor minyak dan berkedudukan di Paris itu melaporkan lembaga itu telah memotong proyeksi 390.000 barel per hari menjadi 86.84 juta barel per hari. Bulan lalu, IEA memproyeksikan permintaan minyak global mencapai 87.23



juta barel per hari.

Executive Director IEA memprediksikan harga minyak dunia akan menembus level US\$150 – US\$200 per barel dalam dua tahun ini akibat terbatasnya pasokan komoditas itu. Harga minyak kemarin menyentuh US\$126,4 barel per hari. (Bloomberg/ih)

Sumber: IEA

BISNIS/ADI PURDIYANTO

27

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> O
<p>KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM</p>	
<p>JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <u>15</u> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>	
<p>HALAMAN : <i>R.1</i> TAHUN 2008</p>	

944.972 KK di Medan terima BLT

MEDAN: Sedikitnya 944.972 rumah tangga miskin (RTM) di Medan akan menerima bantuan langsung tunai (BLT), sesuai dengan data jumlah penerima BLT pada 2005.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara Alimuddin Sidabalok mengatakan sampai saat ini terus mendata terhadap masyarakat yang akan mendapatkan BLT tunai Rp100.000.

"Perlu didata kembali agar dana yang diperuntukkan masyarakat miskin ini bisa benar-benar sampai kepada mereka dan tepat sasaran. Kami mau meminimalisasi kesalahan pada 2005," katanya kemarin.

Kepala Kantor Pos dan Giro Sumut Doni Sarfurdan menjelaskan sebagai pelaksana pembagian dana BLT memastikan kartu BLT saat ini masih dalam proses cetak. Persiapan mencapai 90%, tetapi belum dapat dipastikan kapan pusat mengirim kartu BLT ke Sumut. (BISNIS/K5)

28

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008



ANTARA/ANDIKA BETHA

TOLAK KENAIKAN BBM: Ratusan mahasiswa dan masyarakat menyandera truk tangki BBM premium dalam aksi unjuk rasa di Jl. Urip Sumoharjo, Solo, Jateng, kemarin. Aksi tersebut menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

BIN: Ada 'dalang' demo tolak harga BBM

Oleh IRSAD SATI & DIENA LESTARI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Badan Intelijen Negara (BIN) mensinyalir ada aktor, bisa mantan pejabat atau menteri, yang menggerakkan demonstrasi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

"Aktor mantan pejabat atau menteri berupaya menggalang massa untuk melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM," kata Kepala BIN Syamsir Siregar, di Jakarta, kemarin.

Dia menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat mengenai rencana kenaikan harga BBM.

Selain itu, Polri juga akan menindak tegas spekulasi yang mencoba melakukan penimbunan dan ke-

giatan yang mengganggu stabilitas BBM nasional dengan motif mencari keuntungan.

Kapolri Jendral Pol. Sutanto mengatakan Polri telah meminta agar ulah spekulasi itu dieliminasi dengan pasokan BBM yang lancar. Polri juga akan menindak tegas dalam koridor hukum bila ada yang melakukan pelanggaran dalam proses pengamanan BBM nasional.

Rencana kenaikan harga BBM itu memicu aksi borong di beberapa daerah, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, bisa dilihat di Jatim yang terjadi peningkatan permintaan 12% di atas kebutuhan normal. Begitu pula di Jabar yang naik 18%. (*irsad.sati@bisnis.co.id/diena.lestari@bisnis.co.id*)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : R.1

TAHUN 2008



ANTARA/REZZA ESTILY

ANTRE ELPIJI: Ratusan warga antre elpiji tabung isi 12 kilogram di salah satu agen di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Antrean gas tersebut akibat rusaknya mesin pengolah limbah pembuangan gas (*residu catalytic cracking*) di Exor Balongan Indramayu,

Jawa Barat, yang telah berlangsung selama lima hari, sehingga membuat pasokan gas di sejumlah daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah tidak maksimal.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

Harga Minyak Turun Setelah Iran Bantah Kurangi Produksi

BANGKOK — Pasar tampaknya cukup cepat merespons pernyataan Menteri Perminyakan Iran Gholam-Hosseini Nozari, yang membantah negaranya akan menurunkan produksi minyak. Terbukti, perdagangan di Asia, Rabu (14/5) pagi, harga minyak jenis *light sweet* yang didistribusikan Juni turun delapan sen menjadi 125,72 dolar AS per barel. Sehari sebelumnya, saat pemberitaan penurunan produksi minyak Iran, harga minyak di pasaran menembus rekor baru 126,98 dolar AS per barel.

Analisis menyatakan, pelaku pasar bergerak cepat saat muncul pemberitaan maupun pernyataan resmi pemerintah Iran. Namun Presiden Liberty Trading Group, James Cordier menyatakan kesangsianya atas pemberitaan itu. "Mereka perlu dana yang masuk dari penjualan minyak karena perekonomian nasional sedang buruk," ujarnya.

Mengutip kantor berita Iran, IRNA, Nozari menyatakan, mereka memutuskan harga minyak mentah dan ekspor berdasarkan kondisi pasar minyak. Ia membantah

akan menurunkan produksi menjadi satu juta barel per hari. Sampai saat ini Iran masih bertahan dengan produksinya 4,17 juta barel per hari.

Nozari menegaskan, tidak ada rencana memangkas hasil produksi minyak. "Kita akan mengecek ekspor minyak mentah untuk kemudian memutuskan apakah akan mengurangi atau menaikannya" ujarnya.

Iran merupakan penghasil minyak terbesar keempat dunia. Setiap hari Iran mengimpor 2,4 hingga 2,5 juta barel per hari. Menteri menyatakan, dari evaluasi pasar akan ditentukan apakah jumlahnya akan meningkat menjadi tiga juta barel atau turun menjadi dua juta barel.

Harga minyak yang mencatatkan rekor baru Selasa lalu, tampaknya tidak menarik bagi investor. Pasalnya nilai tukar dolar AS menguat. Saat dolar AS menguat, investor dengan cepat melepasnya ke pasar. Penguatan dolar AS juga menjadikan komoditas berbasis dolar AS seperti minyak menjadi mahal.

Sementara itu Agen Energi Internasional (IEA), penasehat negara industri mengatakan, kenaikan harga minyak membuat permintaan minyak dan produk turunannya berkurang di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. IEA menurunkan prediksi pertumbuhan permintaan minyak global dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen. Di AS, kata IEA, pertumbuhan permintaan minyak tahun ini 2,1 persen. Sedangkan gas turun menjadi satu persen.

Investor di sektor energi juga khawatir dengan Cina. Impor minyak di bulan April lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Kalangan analisis tidak yakin jika gempa berkekuatan 7,5 skala *richter* di pusat Cina secara signifikan berpengaruh atas permintaan tersebut. Gempa terjadi pada awal pekan ini, sementara catatan pengurangan impor terjadi sejak bulan lalu.

Analisis mengatakan, kekhawatiran berkurangnya pasokan karena ketidakstabilan politik di Timur Tengah dan pemberontakan di Afrika masih menghantui investor.

■ ap/afp/ria

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

RI Berpotensi Dapat *Windfall Profit* Minyak Rp 26 Triliun

JAKARTA—Indonesia berpotensi memperoleh Rp 26,5 triliun dari keuntungan tak terduga (*windfall profit*) akibat lonjakan harga minyak dunia. Rezeki nomplok sebesar itu bisa didapat jika pemerintah proaktif meminta kenaikan bagian dari keuntungan tambahan perusahaan-perusahaan minyak multinasional asing yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin, untuk menambah lagi penerimaan negara dari sektor Migas kiranya dapat diambil kebijakan bahwa biaya operasi perusahaan-perusahaan asing yang sudah memproduksi dan sudah memperoleh pengembalian seluruh investasinya (termasuk *operating cost* selama masa tersebut), tidak dibebankan lagi kepada negara. "angka Rp 26,5 triliun didapat dengan menggunakan asumsi faktual seputar aktivitas perusahaan minyak di Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (14/5).

Dengan asumsi produksi minyak mentah 1,0 jt bbl/hari (360 jt bbl/tahun) dan harga minyak 'hanya' 110 dolar AS per barel serta menggunakan basis harga 70 dolar AS, *windfall profit* dari selisih harga pasar terhadap basis harga di atas, yang diterima kontraktor minyak

asing sudah mencapai 5,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 53 triliun. Kalau kemudian dikenakan 44 persen pajak tambahan (*double tax*), Indonesia akan memperoleh Rp 23 triliun. "Sedangkan kalau dibagi 50:50, jatah kita menjadi Rp 26,5 triliun per tahun, dan untuk selanjutnya setiap kenaikan harga minyak yang lebih besar pemerintah mendapatkan bagian *windfall profit* yang lebih besar pula," kata Effendi.

Seperti diketahui, *windfall profit* adalah keuntungan plus-plus yang diperoleh kontraktor asing bukan dari hasil kerja tambahan maupun investasi. Melainkan, semata-mata dipicu oleh gejolak harga pasar yang diramalkan semakin membesar dan selama ini dinikmati secara sepihak oleh kontraktor. "Dengan adanya rezeki tambahan tanpa harus berkeringat, wajar dong jika pemerintah minta bagian sepertiga atau setengahnya untuk membantu program masyarakat miskin, menutup subsidi pangan, pendidikan atau kesehatan," ujarnya.

Perlu langkah konkret

Effendi menambahkan, pemerintah tidak perlu ragu meminta tambahan jatah *windfall profit*, karena hal serupa sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Tidak terkecuali, Amerika Serikat dan Vene-

zuela. Sejak akhir 2007, pemerintah AS bahkan telah menikmati bagian *windfall profit*, saat harga minyak belum menembus angka psikologis 100 dolar AS per barel. "Ketika harga tembus 124 dolar AS per barel, pemerintah dan kongres AS langsung minta tambahan *windfall profit* dari perusahaan minyak mereka," cetus Effendi.

Hal sama dilakukan oleh pemerintah Venezuela yang, sejak dua pekan lalu, telah meminta 20-30 persen bagian *windfall profit* yang dinikmati kontraktor minyak asing di negaranya untuk membantu program bantuan pangan dan subsidi masyarakat miskin.

Terkait hal itu, demikian Effendi, pemerintah perlu segera mengeluarkan PERPPU tentang kebijakan *windfall profit* untuk kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR.

Menilik kondisi yang sangat mendesak, pemerintah harus segera memanggil para kontraktor minyak asing untuk membahas keinginan pemerintah, sekaligus melakukan sosialisasi agar langkah tersebut *win-win solution* bagi iklim investasi. "Termasuk, membahas kemungkinan mengalokasikan dana *windfall profit* itu untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional sektor migas," imbuhnya. ■ dia/ant.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **(15)** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Penjualan Pertamina Turun 20 Persen

JAKARTA — Penjualan Pertamina PT Pertamina (Persero) sepanjang 2008 diperkirakan akan anjlok. Penurunan penjualan bahan bakar nonsubsidi ini diperkirakan mencapai 20 persen.

Vice President BBM Retail Pertamina, Djaelani Sutomo menuturkan di Jakarta, Rabu (14/5), jika tahun lalu penjualan Pertamina mencapai 500 ribu kiloliter (KL), maka tahun ini diperkirakan hanya 400 ribu KL. Menurutnya, penurunan ini disebabkan perbedaan harga yang makin besar antara bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan BBM bersubsidi.

"Karena delta (selisih, red) harga yang makin besar, kami perkirakan penjualan Pertamina turun dari 500 ribu KL tahun lalu jadi 400 ribu KL," ujarnya.

Pertamina saat ini mematok harga Pertamina di kisaran Rp 8.750 per liter. Sementara harga Premium yang disubsidi Rp 4.500 per liter. Dengan perbedaan harga seperti ini, diakui Djaelani, banyak

masyarakat yang beralih dari Premium ke Pertamina.

Selama ini harga Pertamina dipatok mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang terus menanjak. Pertamina sendiri menyesuaikan harga Pertamina dan BBM non subsidi lainnya setiap dua minggu sekali.

Produksi migas molor

Sebanyak tiga lapangan minyak dan gas yang diadwalkan mulai berproduksi tahun ini mengalami penundaan. Ketiga lapangan tersebut adalah Senoro, Pulau Gading dan Sungai Kenawang, serta Sadewa.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) R Priyono mengatakan, total produksi dari ketiga lapangan yang mengalami penundaan tersebut mencapai 24.322,56 barel setara minyak per hari.

Ia memaparkan, lapangan Senoro milik Joint Operation Body (JOB) Pertamina dengan Medco E&P di wilayah kerja Senoro-Tomori Sula-

wesi diperkirakan mampu memproduksi minyak 1.389,04 barel per hari (bph) dan gas 17,26 juta kaki kubik per hari (mmscfd). "Produksi masih tertentu karena masalah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan konsumen. Masalah harga, masih belum tuntas. Juga masalah gas di hulu dan hilirnya," ujar Priyono seperti yang dikutip dalam rilis BP Migas, kemarin.

Sementara produksi minyak dan gas dari lapangan Pulau Gading dan Sungai Kenawang milik Joint Operation Body (JOB) Pertamina dengan Amerada Hess di wilayah kerja Jambi Merang, Jambi, mengalami penundaan karena masalah perubahan pasar gas dan *liquid processing*. ■ dia

Fakta Angka

400 Ribukl

Perkiraan konsumsi Pertamina dengan Pertamina tahun ini.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: F.10

TAHUN 2008

Harga minyak mendekati US\$127 per barel

Oleh BERLIANA ELISABETH S.
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Minyak mentah dunia kembali mencetak rekor tertinggi baru, mendekati US\$127 per barel pada perdagangan kemarin di pasar Asia dipicu rencana Iran menurunkan produksinya.

Sejumlah analis mengatakan para pedagang berjangka langsung bereaksi atas berita pemerintah Iran akan memangkas produksinya sebesar 400.000 barel per hari.

Harga minyak mentah jenis *light sweet* untuk kontrak pengiriman Juni mencapai rekor teringginya US\$126,98 per barel pada perdagangan kemarin dini hari waktu Asia atau Selasa waktu AS. Namun akhirnya turun hingga mencapai US\$125,80 per barel di bursa New York Mercantile Exchange.

Setelah harga mencapai rekor baru, para pedagang berjangka ini kembali melepas kontrak minyak mentah untuk mengambil untung

sesaat. Di samping itu, penguatan dolar AS kemarin juga menjadi salah satu pemicu meredanya harga.

Penguatan dolar AS akan memicu investor menjual komoditasnya, seperti kontrak minyak mentah untuk mengantisipasi inflasi. Selain itu, apresiasi dolar AS membuat harga kontrak menjadi lebih mahal untuk investor asing.

Namun, Menteri Perminyakan Iran Gholamhossein Nozari menyatakan pemerintah



Sumber: Bloomberg

BISNIS/DENNY IRAWAN

belum membuat keputusan untuk memangkas produksi. Akan tetapi diskusi tentang hal itu sudah dilakukan.

Dia membantah pernyataan salah seorang pejabat pemerintah yang menyatakan akan memangkas produksi minyak 400.000 barel per hari dan 1 juta barel per hari mulai bulan depan.

James Cordier, president of Tampa Fla, perusahaan pedagang Liberty Trading Group and OptionSellers.com seperti dikutip *Associate Press* meragukan pemerintah Iran memangkas produksi minyaknya. Negeri itu, lanjut dia, tengah membutuhkan dolar AS untuk mengatasi masalah perekonomiannya.

International Energy Agency (IEA), penasihat energi 27 negara, menyatakan permintaan minyak mentah global sepanjang 2008 rata-rata sebesar 86,84 juta barel, atau turun sebesar 390.000 barel per hari dari estimasi sebelumnya. (*berliana.elisabeth@bisnis.co.id*)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008



Investor Daily/ANTARA/Aguk Sudarmojo/ss/hp/08

Sumur Gas Jambaran

Wakil Bupati Bojonegoro Jawa Timur Setyo Hartono (dua dri kiri) mendapat penjelasan dari teknisi Mobil Cepu Limited (MCL) di lokasi pengeboran sumur migas Jambaran di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Rabu (14/5). Sumur gas Jambaran ini diperkirakan memiliki potensi kandungan gas 1,7 triliun feet kubik.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Pemerintah Perlu Minta Jatah *Windfall Profit* Rp 26,5 T

JAKARTA- Pemerintah perlu meminta kenaikan bagian dari perolehan keuntungan tak terduga (*windfall profit*) yang diraih kontraktor minyak, terutama asing, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus level US\$ 125 per barel. Rezeki nomplok yang diterima kontraktor minyak saat ini mencapai sedikitnya Rp 26,5 triliun.

Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin mengatakan, hasil tagihan *windfall profit* bisa digunakan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang kian terpuruk akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, perkiraan *windfall profit* Rp 26,5 triliun didapat dengan menggunakan asumsi faktual seputar aktivitas perusahaan minyak di Indonesia. Produksi minyak saat ini diasumsikan 1 juta barel per hari (bph) atau 360 juta bph per tahun dan harga minyak saat ini US\$ 110 per barel dan patokan atau basis harga yang digunakan US\$ 70 per barel.

Dia mengatakan, dengan sejumlah asumsi tersebut, *windfall profit* kontraktor minyak, yang dihitung berdasarkan selisih harga pasar terhadap basis harga di atas, mencapai US\$ 5,8 miliar atau sekitar Rp

53 triliun. Jika kemudian dikenakan 44% pajak tambahan (*double tax*), Indonesia akan memperoleh Rp 23 triliun.

"Sedangkan kalau dibagi 50:50, jatah negara ini menjadi Rp 26,5 triliun per tahun, dan untuk selanjutnya setiap kenaikan harga minyak yang lebih besar pemerintah mendapatkan bagian *windfall profit* yang lebih besar pula," kata

125 per barel, sisanya merupakan *windfall profit*.

"Pemerintah juga mendapatkan *windfall profit*, bukan hanya kontraktor minyak saja, tapi *windfall profit* pemerintah habis untuk menutupi subsidi listrik, BBM, maupun elpiji," katanya kepada *Investor Daily*, tadi malam.

Effendi menambahkan, pemerintah tidak perlu ragu me-

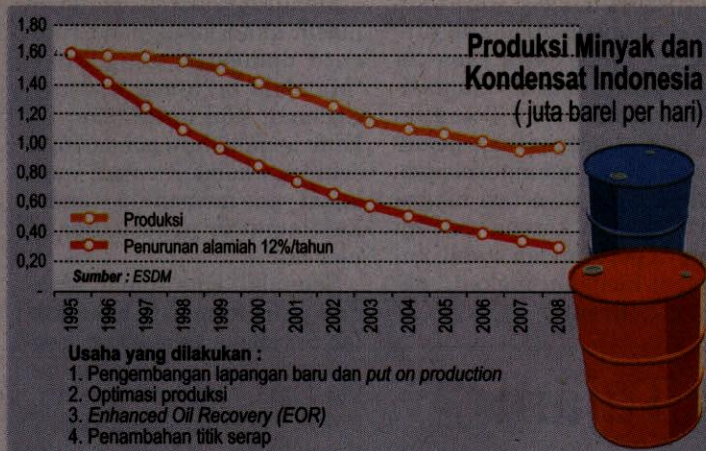
oleh pemerintah Venezuela yang sejak dua pekan lalu, telah meminta 20-30% bagian *windfall profit* yang dinikmati kontraktor minyak asing di negaranya untuk membantu program bantuan pangan dan subsidi masyarakat miskin.

Terkait hal itu, lanjut Effendi, pemerintah perlu segera mengeluarkan Perppu tentang kebijakan *windfall profit* untuk kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR. Selain itu, perlu dilakukan simulasi untuk mempelajari besarnya *windfall profit* yang diterima, khususnya oleh kontraktor asing, dengan beberapa basis harga awal.

Sulit Dilakukan

Menurut Pri Agung, penagihan *windfall profit* akan sulit dilakukan pemerintah. Sebab, klausul *windfall profit* tidak tercantum dalam kontrak yang diteken antara pemerintah dan kontraktor minyak. Sementara itu, di beberapa negara yang berhasil menagih *windfall profit* adalah negara yang menerapkan klausul tersebut.

"Untuk bisa menagih, pemerintah harus merevisi kontrak-kontrak yang ada, karena kontrak-kontrak yang berlaku selama ini tidak ada klausul demikian, pemerintah Indonesia terlambat melakukan antisipasi," kata dia. (ari)



Effendi seperti dikutip *Antara*, Rabu (14/5), di Jakarta.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, besaran *windfall profit* dari kenaikan harga minyak bisa lebih dari itu. Dia mencontohkan, apabila patokan harga minyak yang dipakai US\$ 70 per barel, sementara harga minyak saat ini sudah US\$

minta tambahan jatah *windfall profit* tersebut, sebab hal serupa juga sudah dilakukan oleh negara-negara lain, tidak terkecuali, Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. Sejak akhir 2007, pemerintah AS bahkan telah menikmati bagian *windfall profit*, saat harga minyak belum menembus US\$ 100 per barel.

Hal yang sama dilakukan

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

KOMPENSASI BBM

PT Pos Siap Salurkan BLT

BANDUNG (Suara Karya): PT Pos Indonesia (Posindo) siap melaksanakan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM). Hingga saat ini, pemerintah menetapkan sekitar 19,1 juta RTM menjadi penerima BLT di seluruh pelosok nusantara mulai Juni 2008 ini.

Manager Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia R Joesman Kartaprawira di Bandung, kemarin mengatakan, tahap pertama ini sebanyak 599.297 kupon sudah selesai dicetak. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan, pendistribusian kupon tersebut akan dilakukan dari tanggal 20-25 Mei 2008 kepada 599.297 RTM di 6 kota yang mendapat giliran pertama mendapat BLT. Sedangkan penyerahan uangnya akan dimulai Juni 2008. "Kantor Pos di masing-masing daerah sudah siap menyalurkan dana BLT. PT Pos tinggal menunggu surat perintah pembayaran saja dari Depsos," katanya.

Enam kota yang mendapat giliran pertama BLT yakni Jakarta (157.515 RTM), Bandung (84.287 RTM), Medan (83.525 RTM), Semarang (82.665 RTM), Surabaya (121.145 RTM), dan Makassar (70.160 RTM). Tahap pertama akan dibayarkan Rp 300.000 untuk 3 bulan yakni mulai Juni, July dan Agustus 2008. Pembayaran tahap kedua Rp 400.000 untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2008. Masing-masing RTM akan menerima dana BLT sebesar Rp 100.000 per bulan selama 7 bulan.

Sedangkan RTM berikutnya yang mendapat giliran, yakni di Palembang, Yogyakarta, Kupang, dan Banjarmasin. Prosesnya sama dengan yang pertama dan didahului dengan pendistribusian kupon kepada RTM yang menjadi sasaran BLT. Lalu dilanjutkan dengan penyaluran dana melalui loket loket kantor pos terdekat atau tempat-tempat lain yang ditentukan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan lokasi yang mudah dijangkau penerima BLT.

Menurut R Joesman Kartaprawira, PT Pos Indonesia mencetak kupon BLT sesuai dengan data yang diterima dari BPS. Pendistribusiannya dilakukan bekerja sama dengan pihak Depdagri mulai dari tingkat pusat hingga camat, lurah, dan RT/RW di masing-masing daerah. Sedangkan untuk pengamanan bekerjasama dengan pihak kepolisian. (LM Sinaga)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

ENERGI

Harga BBM Industri Naik

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk industri terhitung 15 Mei 2008 pukul 00.00 WIB. Kenaikan harga BBM untuk ini industri cukup beragam, di mana paling besar untuk minyak bakar yang mengalami kenaikan hingga 4,3 persen.

"Perubahan harga disebabkan harga Mid Oil Platts Singapore (MOPS) dalam rupiah mengalami kenaikan berkisar antara 1,2 persen sampai dengan 4,3 persen. Nilai tukar rupiah melemah 0,37 persen dari perhitungan awal bulan lalu," kata Vice President Komunikasi Pertamina Wisnuntoro dalam siaran pers tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/5).

Kenaikan harga BBM untuk industri itu sesuai dengan keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Nomor Keputusan 068/F00000/2008-S0 tentang harga jual keekonomian bahan bakar minyak Pertamina tanggal 13 Mei 2008. Menurut dia, dibandingkan harga pada 1 Mei 2008, harga BBM non subsidi periode medio Mei 2008 mengalami perubahan harga, yakni premium naik 2,1 persen, minyak tanah naik 1,2 persen, mi-

nyak solar 1,2 persen, minyak diesel naik 1,4 persen, dan minyak bakar naik 4,3 persen.

Selain itu, saat ini Pertamina juga mengubah perhitungan harga. Semula, perhitungan harga penebusan didasari atas tabel rincian harga penebusan dalam satuan 1 liter dikalikan terhadap volume penebusan. Dan menyesuaikan sistem yang diterapkan untuk menghitung harga penebusan saat ini, maka harga penebusan untuk volume tertentu dihitung ulang dari harga dasar dikalikan volume penjualan ditambah pajak-pajak (PPN dan PBBKB).

Perubahan harga jual keekonomian BBM Pertamina tanpa pajak itu, di wilayah I yang berlaku eek pasokan poin (depot/transit terminal) selain Batam, wilayah 4, UPmsVII Makassar, Upms VIII Jayapura dan Provinsi NTT, yaitu premium sebesar Rp 7,87 juta per kiloliter (kl) dari harga sebelumnya Rp 7,682 juta per kl.

Sedangkan harga minyak tanah naik menjadi Rp 9,572 juta per kl dari sebelumnya Rp 9,424 juta per kl, minyak solar naik menjadi Rp 10,107 juta per kl dari sebelumnya Rp 9,953 juta per kl, minyak diesel Rp 9,231 juta dari

sebelumnya Rp 9,074 juta per kl, minyak bakar Rp 5,947 juta dari sebelumnya Rp 5,683 juta per kl, dan Pertamina DEX naik menjadi Rp 9,798 juta per kl dari harga sebelumnya Rp 9,671 juta per kl.

Sementara harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi bagi transportasi umum tidak mengalami perubahan. Harganya masih Rp 4.500 per liter untuk premium dan Rp 4.300 per liter untuk solar. Sedangkan harga minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat dan industri kecil tetap sebesar Rp 2.000 per liter. "Harga BBM bersubsidi tidak ada kenaikan," katanya.

Terkait harga bahan bakar khusus (BBK), yakni pertamax, pertamax plus, Pertamina DEX dan biopertamax juga mengalami kenaikan bervariasi. Saat ini, harga jual pertamax di unit pemasaran (UPms III) meliputi Jakarta, Banten dan Jawa Barat naik menjadi Rp 8.950 dari harga sebelumnya pada 1 Mei Rp 8.750 per liter, pertamax plus naik Rp 9.250 dari sebelumnya Rp 9.000 per liter, Pertamina DEX naik menjadi Rp 11.100 dari sebelumnya Rp 11.000 per liter, dan biopertamax naik menjadi Rp 8.950 dari Rp 8.750 per liter. (Abdul Choir)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <u>15</u> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 10 TAHUN 2008	

AKR Bangun Terminal Minyak

JAKARTA (Suara Karya): PT AKR Corporindo Tbk (AKR) membangun empat terminal bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Investasi tersebut diperkirakan mencapai 32 juta dolar AS. "Yang sudah dalam tahap *under construction* berada di Bali dan Kalimantan Selatan," kata Presiden Direktur AKR Corporindo Jimmy Tandyo, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, terminal BBM baru tersebut diharapkan sudah dapat beroperasi secara bertahap pada akhir tahun ini dan 2009. Selain membangun terminal BBM baru, jelas dia, AKR juga berencana menambah kapasitas simpan terminal BBM yang sudah ada (*existing product*), antara lain di Lampung, Medan, dan Surabaya.

Disebutkannya, saat ini AKR bersama perusahaan asal Belanda, Royal Vopak, melalui perusahaan patungan PT Jakarta Tank Terminal juga tengah menyelesaikan pembangunan terminal BBM di Tanjung Priok, Jakarta. (Agus)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

PENIMBUNAN BBM

Kejari Jakarta Utara Selidiki Dugaan Suap

JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara akan menyelidiki kasus dugaan penyuaipan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rsd oleh pihak tersangka pengoplos/penimbun bahan bakar minyak (BBM) dengan memintai penjelasan dari penyidik Polres Jakarta Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Martono menegaskan hal itu menanggapi isu penyuaipan yang dialamatkan terhadap JPU Rsd oleh istri kedua kedua tersangka kasus BBM tersebut.

"Kami akan menyelusuri kebenaran informasi penyuaipan tersebut," kata Martono kepada *Suara Karya* di Jakarta, Rabu kemarin.

Jika hasil penyelidikan atau penyelidikan menunjukkan kasus dugaan penyuaipan oleh pihak tersangka pengoplos/penimbun BBM benar-benar melibatkan JPU Rsd, Kejari Jakarta Utara akan menempuh langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku, baik terhadap Rsd maupun perkara pengoplosan/penimbunan BBM itu sendiri.

Menurut Martono, sampai saat ini Surat Pe-

rintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kasus tersebut masih berada di Polres Jakarta Utara. "Pihak penyidik sudah menjanjikan akan menyerahkan SPDP tersebut ke kejaksaan secepatnya," tuturnya.

Jika SPDP tersebut sudah di Kejari Jakarta Utara, kata kajari, belum tentu ia menyerahkan penanganan kasus BBM tersebut kepada JPU Rsd. "Saya berwenang penuh menunjuk jaksa yang akan menangani suatu perkara," tegasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Jakarta Utara Liyas menambahkan, meski penangkapan tersangka kasus BBM itu, Bdr, sudah cukup lama, yakni akhir Maret 2008, SPDP perkara tersebut belum pernah dikirimkan penyidik Polres Jakarta Utara ke Kejari setempat. "Kami tidak tahu mengapa SPDP itu agak lama baru akan diserahkan ke sini," tutur Liyas.

Kasi Pidum mengaku tidak tahu di mana tersangka Bdr saat ini berada; apakah di dalam tahanan, ditangguhkan penahanannya atau tidak ditahan sama sekali.

(Wilmar F)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEL** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

MIGAS

Windfall Profit Multinasional Harus Ditagih

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah didesak agar meminta kenaikan bagian perolehan keuntungan tak terduga (*windfall profit*) dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional di Indonesia menyusul lonjakan harga minyak dunia.

"Potensi tambahan pendapatan negara dari kontraktor migas asing itu diperkirakan mencapai Rp 26,5 triliun," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin, di Jakarta, Rabu.

Dana itu bisa digunakan untuk mengurangi beban masyarakat yang kian terpuruk akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, angka Rp 26,5 triliun didapat dengan

menggunakan asumsi faktual seputar aktivitas perusahaan minyak di Indonesia, yaitu produksi 1,0 juta barel per hari (bph) atau 360 juta bph/tahun dan harga minyak 110 dolar AS per barel serta menggunakan basis harga 70 dolar AS per barel.

Dengan memakai sejumlah asumsi tersebut, pendapatan *windfall profit*—dari selisih harga pasar terhadap basis harga di atas—yang diterima kontraktor minyak asing sudah mencapai 5,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 53 triliun. Kalau kemudian dikenakan 44 persen pajak tambahan (*double tax*), Indonesia akan memperoleh Rp 23 triliun. "Sedangkan kalau dibagi 50:50, jatah kita menjadi Rp 26,5

triliun per tahun. Dan untuk selanjutnya setiap kenaikan harga minyak yang lebih besar, pemerintah mendapatkan bagian *windfall profit* yang lebih besar pula," kata Effendi.

Windfall profit adalah keuntungan tambahan yang diperoleh kontraktor asing bukan dari hasil kerja tambahan maupun investasi, melainkan semata-mata dipicu oleh gejolak harga pasar yang diramalkan semakin membesar dan selama ini dinikmati secara sepihak oleh kontraktor. "Dengan adanya rezeki tambahan tanpa harus berkeringat, wajar *dong* jika pemerintah meminta bagian sepertiga atau setengahnya untuk membantu program masyarakat miskin, menutup subsidi pangan,

pendidikan atau kesehatan," ujarnya.

Effendi menambahkan, pemerintah tidak perlu ragu meminta tambahan jatah *windfall profit* karena hal serupa sudah dilakukan oleh negara-negara lain, tidak terkecuali Amerika Serikat (AS) dan Venezuela.

Menilik kondisi yang sangat mendesak, pemerintah harus segera memanggil para kontraktor minyak asing untuk membahas keinginan pemerintah, sekaligus melakukan sosialisasi agar langkah tersebut *windwin solution* bagi iklim investasi. "Termasuk membahas kemungkinan mengalokasikan dana *windfall profit* itu untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional sektor migas," katanya. (A Choir)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

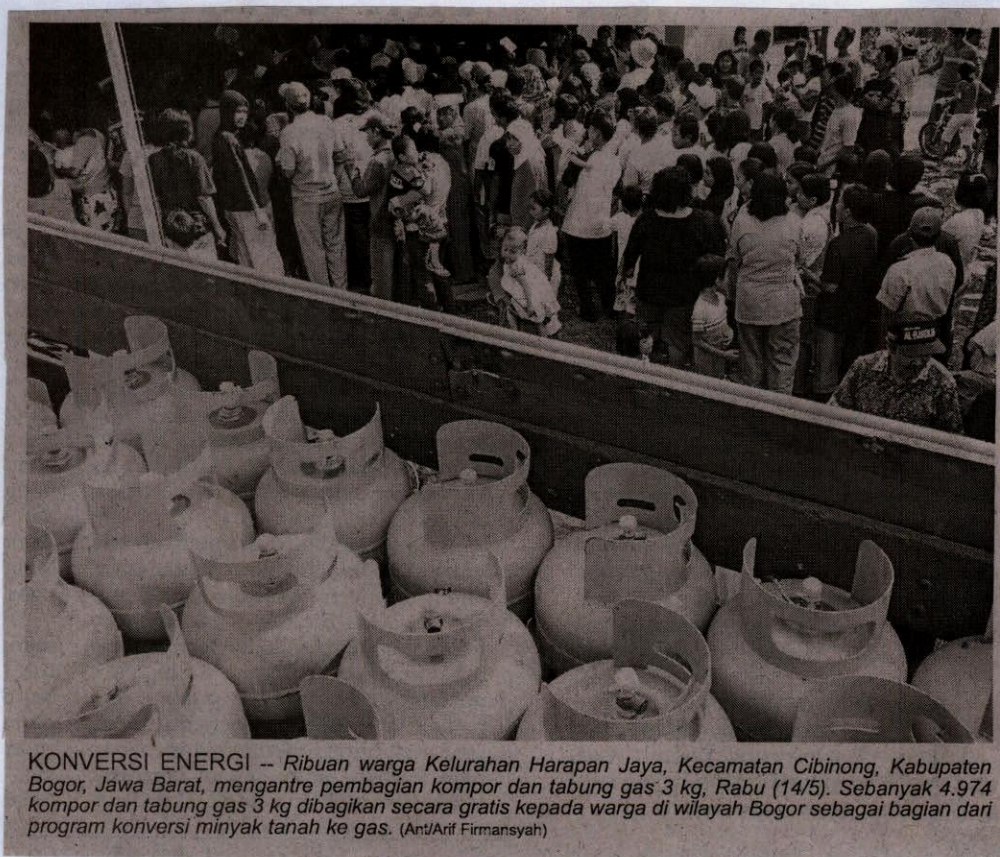
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008



KONVERSI ENERGI -- Ribuan warga Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengantre pembagian kompor dan tabung gas 3 kg, Rabu (14/5). Sebanyak 4.974 kompor dan tabung gas 3 kg dibagikan secara gratis kepada warga di wilayah Bogor sebagai bagian dari program konversi minyak tanah ke gas. (Ant/Arif Firmansyah)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

KONVERSI GAS DI BOGOR

Ingin Dapat Tabung, Bayar Dulu Rp 10 Ribu

BOGOR (Suara Karya): Ribuan warga Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdesak-desakan antre untuk mendapatkan tabung dan kompor gas dari pemerintah, Rabu (14/5).

Konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah pusat dimulai kemarin untuk Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong. Namun warga mengaku harus mengeluarkan uang sepuluh ribu rupiah per orang untuk mendapatkan tabung dan kompor gas gratis itu.

Pembagian kompor dan tabung gas ukuran tiga kilogram

tersebut dilakukan di halaman kantor Kelurahan Harapanjaya.

"Saya tak habis pikir, pemerintah selama ini gembor-gembor bahwa kompor dan tabung gas untuk konversi minyak tanah ke gas bagi golongan ekonomi lemah itu gratis, tetapi dalam praktiknya bertolak belakang," kata Iwan, salah seorang warga di sana.

Ia mengaku terpaksa mengeluarkan uang sepuluh ribu rupiah untuk mendapatkan tabung dan kompor gas ini. Karena sudah sejak pagi berdesak-desakan dengan warga lain, dan kebetulan ada uang

sebesar itu di dalam saku celananya, dia pun mendapatkan tabung dan kompor gas tersebut. Tetapi bagi mereka yang tak punya uang, dengan berat hati harus gigit jari karena tetap harus melengkapi dulu administrasi itu.

Berdasarkan pengamatan di lokasi, pembagian alat konversi minyak tanah ke gas itu tampak lebih didominasi oleh kaum ibu. Bahkan ada di antara ibu-ibu sambil menggendong anaknya yang masih berusia di bawah lima tahun (balita) ikut antre dan berdesak-desakan.

Seperti diungkap Ninah, dia terpaksa menggendong anak balitanya karena di rumah tak ada siapa-siapa. "Kakaknya pada sekolah karena sudah SMP, mau dititip di tetangga, tak enak," ujar Ninah.

Sementara itu, Ketua RT 01 RW 05 Juanda membantah keras kalau dalam konversi ini ada pungutan liar. Menurut Juanda, uang sebesar sepuluh ribu rupiah per orang itu sifatnya sukarela, hanya untuk administrasi RT setempat. "Itu pun bagi mereka yang punya uang. Kalau tidak punya uang, tak jadi masalah," kata Juanda.

(Tarwono)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

BLT Dibagikan 23 Mei 2008

Oleh Raja Hendrik Napitupulu

JAKARTA – Pemerintah menjadwalkan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pada 23-25 Mei 2008, secara serentak di 10 kota besar di Indonesia melalui kantor pos setempat. Penerima kompensasi kenaikan harga BBM itu bertambah 5-7 juta jiwa PNS, Polri dan TNI. Pada 2005 penerima BLT sebanyak 19,1 juta kepala keluarga (KK).

Berdasarkan dokumen laporan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diperoleh *Investor Daily*, Rabu (14/5), sepuluh kota yang mendapatkan BLT pertama adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Kupang, dan Makassar. Penanggung jawab pelaksanaan BLT adalah Menko Kesra, Bappenas, Departemen Sosial (Depsos), dan PT Pos Indonesia. Seluruh persiapan BLT dijadwalkan selesai 28 Mei 2008.

Dokumen itu menjelaskan, dana BLT yang disalurkan sebesar 94,31% dari total anggaran Rp 14,18 triliun. Sementara itu, 5,69% atau Rp 806,65 miliar sisanya digunakan sebagai dana *safe*

guarding meliputi sosialisasi, koordinasi, *updating* data, operasional unit pelaksana, monitoring dan evaluasi.

Selain itu, ada dana *safe guarding* yang dikelola Depsos sebesar Rp 135,38 miliar, dan dana distribusi *safe guarding* di Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia, Menko Kesra, Bappenas, Depkominfo, serta Depdagri.

Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, penerima BLT berdasarkan data 2005 dan data program keluarga harapan 2007. Tahun ini, penerima kompensasi kenaikan harga BBM itu bertambah sekitar 6-7 juta kepala keluarga jiwa dibanding 2005 yang mencapai 19,1 juta kepala keluarga. "TNI/Polri berpangkat tamtama dan pegawai negeri sipil golongan I dan II juga menerima kompensasi ini. Presiden menginstruksikan penerima BLT mencakup 76,4 juta jiwa. Sebenarnya jumlah rakyat miskin hanya 36,75 juta jiwa," ujar Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/5).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2008 tentang kenaikan gaji bagi PNS, untuk gaji PNS golongan I-a dengan masa kerja golongan (MKG) 0 tahun ditetapkan Rp 910 ribu, naik 19% dari gaji 2007 sebesar Rp 760.500 per bulan. Gaji golongan I-a dengan MKG hingga 26 tahun ditetapkan sebesar Rp 1.230.800 per bulan. Golongan I-d dengan MKG di atas 27 tahun gajinya naik menjadi Rp 1.410.000 per bulan.

45

Golongan II paling rendah gajinya Rp 1.151.700 per bulan, II-d dengan MKG 33 tahun ditetapkan sebesar Rp 1.913.300.

Ical memastikan, kupon untuk BLT sudah siap cetak dan diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak. Jika BLT siap, BBM pun siap dinaikkan harganya. "Sekarang kupon buat BLT siap cetak. Kapan pun Presiden memutuskan, kita bagikan," ujar Ical.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjamin ketersediaan alokasi dana untuk BLT yang akan digulirkan dalam waktu dekat. Menkeu sedang menyiapkan landasan hukum untuk penyaluran BLT yang akan diberikan pemerintah. "Insya Allah. Kami akan usahakan nanti. Seluruh landasan hukumnya akan kami siapkan," katanya seusai rapat pimpinan Depkeu.

Menurut Menkeu, dana BLT sebesar Rp 14,17 triliun diperoleh dari penghematan subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM. "Kalau naiknya 30%, dana subsidi yang dihemat sekitar Rp 35,6 triliun. Artinya, sisa BLT akan digunakan untuk menambal defisit APBNP 2008," jelas dia.

Program BLT akan dibagikan kepada rumah tangga miskin dengan alokasi Rp 100.000 perbulan dengan melibatkan PT Pos Indonesia sebagai pencetaknya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu menambahkan, penyiapan anggaran untuk BLT akan satu paket dengan kebijakan harga BBM. "Tu kan satu paket. Kan dalam pasal 14 UU tentang APBNP 2008 disebutkan opsi mengenai pengendalian konsumsi itu kan terkait kebijakan fiskal lainnya. Jadi itu satu paket," kata dia.

Menurut Anggito, APBNP 2008 menyebutkan bahwa dalam hal alokasi subsidi sudah mencapai maksimal dan proyeksi harga minyak di atas US\$ 100 perbarell, pemerintah dapat melakukan tiga hal. Ketiga hal itu adalah pembatasan konsumsi, kebijakan harga BBM, dan kebijakan fiskal lainnya. "Jadi, karena BLT terkait dengan kebijakan harga BBM, itu bisa tertampung menggunakan pasal 14 itu. Itu satu paket," tegas dia.

Pemborosan

Menanggapi biaya *safe guarding* yang mencapai Rp 806 miliar, Wakil Panitia Anggaran (Panggar) DPR Harry Azhar Azis menilai, biaya tersebut merupakan pemborosan anggaran pemerintah di tengah situasi dan kondisi sulit saat ini. Bila pemerintah menggunakan aparat yang ada sesuai dengan fungsinya, ada banyak penghematan. "Paling tidak, ada penghematan lagi dari biaya tersebut sebesar Rp 300 miliar. Artinya, biaya *safe guarding* maksimal hanya Rp 500 miliar," ujar dia.

Harry mengusulkan, agar penghematan Rp 300 miliar dialokasikan kembali kepada

rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang berkisar 4% dari total jumlah orang miskin 2007 (16,68%). "Sedikitnya, RTSM bisa mendapat lebih besar daripada rumah tangga hampir miskin, atau sekitar Rp 150-200 ribu/bulan," jelas dia.

Dekan Fakultas Ekonomi UI Bambang Brojonegoro juga menyesalkan, besarnya biaya *safe guarding*. Seharusnya anggaran itu bisa lebih dihemat dengan fokus pada *update* data dan perbaikan sistem distribusi. "Apalagi dengan kondisi saat ini, di mana anggaran pemerintah sangat terbatas," keluh dia.

Pada 12 Mei 2008, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengintruksikan kepada gubernur, bupati, walikota, dan camat untuk mendukung sekaligus memfasilitasi program BLT di masing-masing wilayah.

PT Pos Indonesia siap membagikan kartu BLT kepada penerima. Namun, PT Pos akan menyelesaikan proses distribusi kartu kepada seluruh kantor pos di enam daerah saat penyerahan pertama. "Kami masih menunggu data BPS untuk kota-kota yang lain. Selanjutnya, distribusi kartu BLT akan dilakukan PT POS dan aparat kelurahan, RT/RW setempat," ungkap Joesman Kartaprawira, manajer komunikasi perusahaan PT Pos.

Jadwal sementara yang dimiliki PT Pos menyebutkan bahwa distribusi kartu hingga ke rumah tangga miskin (RTM) harus selesai 20-25 Mei 2008. Namun, Jusman tidak bisa memastikan jadwal pembagian BLT ke masyarakat. Alokasi dana untuk pencetakan kartu BLT mencapai Rp 22,920 miliar, sedangkan alokasi distribusi kartu BLT Rp 105,05 miliar.

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Bambang Widianto membenarkan, pada tahap pertama pemerintah akan menyalurkan BLT di 10 kota besar Indonesia. Sebab, secara administrasi kota-kota itu paling siap menjadi proyek percontohan penyaluran BLT 2008. "Tapi, saya tidak tahu kapan BLT itu dibagikan, sebab kita masih menunggu instruksi Presiden. Pada tahap pertama, pemerintah akan menyalurkan BLT sebesar Rp 6,5 triliun," tutur dia.

Dokumen Menteri Sosial menjadwalkan, penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selesai pada 12-13 Mei 2008, setelah pembahasan RKA-KL final. Sementara itu, jadwal penyusunan RKA-KL pembahasan BLT 2008 dengan Depkeu sekitar 9-13 Mei.

Namun, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo mengakui, pihaknya belum menyelesaikan proses DIPA untuk pelaksanaan program BLT 2008. Hingga saat ini, Depkeu masih terus memproses penyelesaian DIPA. "Masih kita proses. Nanti kalau sudah selesai di Ditjen Anggaran, saya tinggal menandatangani pencairannya," ujar dia. (nov/idi)

45

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 9 TAHUN 2008	

Harga Minyak Melemah Setelah Mencapai Rekor Baru

Harga minyak mentah turun di perdagangan Asia Rabu setelah mencapai rekor tinggi baru mendekati 127 dolar AS per barel, meskipun diperkirakan pertumbuhan permintaan energi lebih rendah, kata analis. Kontrak berjangka minyak utama New York, jenis light sweet pengiriman Juni, turun delapan sen menjadi 125,72 dolar per barel.

Kontrak acuan naik ke rekor 126,98 dolar sebelum ditetapkan pada kisaran 125,80 dolar pada Selasa di New York Mercantile Exchange (Nymex). Kenaikan itu sekitar 1,57 dolar pada penutupan tersebut. Harga minyak mentah naik dua kali lipat dalam setahun terakhir dan menguat 25 persen sejak awal 2008.

Sementara itu minyak mentah di New York Senin lalu menembus rekor puncak sebelumnya 126,40 dolar AS. Pada akhir perdagangan melesat setelah pada awal perdagangan Selasa turun, sesudah Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global. *afp*

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 1 TAHUN 2008	

HARGA PREMIUM SEKITAR RP 6.000/LITER

Kenaikan Harga BBM Diumumkan Setelah 23 Mei

Sandy R/Sigit S
NERACA

Jakarta - Pemerintah rencananya dijadwalkan baru akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah 23 Mei, keputusan menaikkan BBM akan dilakukan setelah evaluasi kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikemukakan oleh Menko Kesra kepada wartawan se usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, yang berlangsung selama lebih kurang 10 jam, 11.00 WIB-21.30 WIB.

"Presiden memberikan pengarahannya agar program-program ini (BLT) dilaksanakan dengan baik, dan meminta laporan program ini siap pada pekan ketiga bulan ini untuk dievaluasi sebelum menetapkan keputusan lain," katanya.

Lebih lanjut, Menko Kesra mengatakan evaluasi kesiapan program BLT akan dilakukan pada 23

Mei 2008.

Hadir dalam sidang kabinet itu antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Kepala BIN Syamsir Siregar dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

Presiden menggelar sidang kabinet sepulang dari kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Mamuju (Sulawesi Barat) baru-baru ini.

Sementara itu, pemerintah melalui Menkominfo Muhammad Nuh, Kamis (15/5) pukul 16.00 WIB akan mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM rata-rata maksimal 30 persen yang akan direalisasikan pada akhir Mei 2008.

Menurut perhitungan Depkeu,

harga premium yang semula Rp 4.500 disebut-sebut akan naik menjadi Rp 6.000 per liter. Solar dari Rp 4.300 meningkat jadi Rp 5.500 per liter. Dengan kenaikan itu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup longgar bagi APBN sebesar Rp21,491 triliun, serta menambah penghematan anggaran menjadi Rp25,877 triliun.

Dari penghematan anggaran akibat kenaikan harga BBM, pemerintah akan mengalokasikan sebesar Rp14,1 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) periode Juni 2008-Mei 2009 sebesar Rp100.000 per masing-masing RTM.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, dari hasil simulasi model dengan menggunakan time series data, kenaikan harga berbagai jenis BBM dari mulai minyak tanah, solar, dan premium, sebesar 30 persen akan membawa dampak terhadap pertum-

bahan pengangguran sebesar 16,92 persen per tahun.

Dari hasil penelitian dia, solar merupakan jenis BBM yang paling berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran. Kenaikan harga solar sebesar 30 persen akan berdampak pada pertumbuhan pengangguran sebesar 10,83 persen karena hal tersebut tentu terkait dari kemampuan industri maupun perusahaan untuk tetap berproduksi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjamin akan tersedia dana untuk bantuan langsung tunai (BLT) menyusul rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.

"Insya Allah ada, akan kita usahakan seluruh landasan hukumnya dapat diselesaikan secepatnya," kata Menkeu usai rapat pimpinan Depkeu di Jakarta, Rabu.

Namun Menkeu tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut hasil rapat pimpinan Depkeu, termasuk rencana kenaikan harga BBM karena harus dilaporkan dulu ke sidang kabinet.●

47

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

DIPA BLT Belum Tuntas

**Sandy Romualdus
NERACA**

Jakarta - Departemen Keuangan (Depkeu) hingga kini belum menyelesaikan proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2008.

"Masih kita proses. Nanti kalau sudah selesai di Ditjen Anggaran, saya tinggal menandatangani (pencairannya-red)," kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu, Herry Purnomo di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin akan tersedia dana dan payung hukum untuk BLT menyusul rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. "Insya Allah ada, akan kita usahakan seluruh landasan hukumnya dapat diselesaikan secepatnya," kata Menkeu secara terpisah.

Namun Menkeu tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut hasil rapat pimpinan Depkeu termasuk rencana kenaikan harga BBM karena harus dilaporkan dulu ke sidang kabinet. "Saya harus laporkan semua ke sidang kabinet dulu, kan tidak etis kalau saya sampaikan sekarang, paling tidak besok (Kamis)," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu, Anggito Abimanyu mengatakan, penyiapan anggaran untuk BLT akan satu paket dengan kebijakan harga BBM.

"Itu kan satu paket. Kan dalam pasal 14 UU tentang APBNP 2008 disebutkan opsi mengenai pengendalian konsumsi itu kan terkait ke-

bijakan fiskal lainnya. Jadi itu satu paket," katanya.

Menurut Anggito, APBNP 2008 menyebutkan bahwa dalam hal alokasi subsidi sudah mencapai maksimal dan proyeksi harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, maka pemerintah dapat melakukan tiga hal.

Tiga hal itu adalah pembatasan konsumsi, kebijakan harga BBM, dan kebijakan fiskal lainnya. "Jadi karena BLT terkait dengan kebijakan harga BBM, itu bisa tertampung menggunakan pasal 14 itu. Itu satu paket," tegasnya.

Di tempat terpisah, Deputy Kemeneg PPN/Bappenas Bambang Widianto mengatakan, dari anggaran sekitar Rp14,176 triliun pelaksanaan BLT pada tahun anggaran 2008, yang akan disalurkan kepada rumah tangga miskin mencapai Rp13,37 triliun. "Sisanya untuk biaya pelaksanaan penyaluran BLT," katanya.

Sedangkan Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia (persero) Joesman Kartaprawira mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan proses pencetakan kartu bagi 19,1 juta RTM di seluruh Indonesia. Namun mengingat data RTM yang baru diterima dari BPS saat ini hanya untuk enam daerah, Joesman mengatakan, maka pihaknya baru mulai mendistribusikan di keenam daerah tersebut.

Keenam daerah tersebut, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. "Kita harapkan segera mendapatkan data RTM lainnya dari BPS," katanya. Dia menambahkan, menurut jadwal yang diketahuinya, proses distribusi

kartu kepada RTM harus selesai pada rentang waktu 20-25 Mei 2008.

Sedangkan alokasi anggaran bagi PT Pos Indonesia untuk mencetak kartu BLT adalah Rp22,92 miliar, untuk proses distribusi Rp105,05 miliar, dan untuk penyaluran dana adalah Rp191 miliar.

Bantuan Tunai Bersyarat

Sementara itu, pemberian bantuan tunai bersyarat rumah tangga sangat miskin tetap dilanjutkan meski dalam waktu dekat pemerintah berencana kembali menyalurkan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga bahan-bakar minyak.

"Bantuan tunai bersyarat tetap dilanjutkan tahun ini," kata Direktur Jaminan Sosial Departemen Sosial Lising Srihartati di Jakarta, Rabu.

Pemberian bantuan tunai bersyarat diberikan sebesar Rp600 ribu-Rp2,2 juta/tahun untuk setiap rumah tangga sangat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) itu.

Penyaluran bantuan tunai bersyarat PKH periode 2007, menurut dia, saat ini sudah hampir usai dan awal Juni mendatang bantuan tunai bersyarat periode 2008 mulai disalurkan kepada rumah tangga miskin yang dinilai layak menjadi penerima manfaat PKH.

"Dua-duanya dijalankan, karena tujuannya lain-lain. Bantuan tunai bersyarat ditujukan untuk menopang pembiayaan pendidikan anak serta kesehatan ibu hamil dan balita sedangkan BLT Rp100 ribu per bulan untuk mempertahankan daya beli masyarakat," katanya. ●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008



TINTA PENANDA:
Seorang warga memperlihatkan jari tangannya yang telah diberi tinta sebagai penanda telah membeli satu tabung gas 12 kg di pangkalan gas Ji Emong, Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/5). Akibat pasokan gas dari Balongan Indramayu berkurang, setiap warga diberi jatah satu tabung gas untuk satu orang per hari.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 1	TAHUN 2008										

Kenaikan harga BBM tunggu BLT

Oleh ERNA S.U. GIRSANG
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah menegaskan pengumuman kenaikan harga BBM baru dilakukan setelah seluruh evaluasi pendistribusian BLT selesai dilakukan pada 23 Mei 2008.

"Proses evaluasi akan dirampungkan sekitar 23 Mei 2008, setelah evaluasi baru kami akan memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Menko Kesra Aburizal Bakrie, dalam temu pers mengenai hasil Sidang Kabinet tentang harga BBM, di Kantor Presiden, yang berakhir pukul 22:30 WIB.

Sidang Kabinet itu berlangsung sejak pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 21.30 WIB, setelah itu sejumlah menteri menggelar temu pers mengenai hasil pertemuan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan besaran kenaikan harga BBM akan ditetapkan maksimal 30%.

Saat ini harga premium di Indonesia sangat murah dibandingkan dengan harga internasional yang sudah naik sekitar 100%. Sebagai perbandingan di Singapura mencapai Rp13.600 per liter, Filipina Rp10.650 per liter, China Rp6.890 per liter, dan Malaysia Rp5.420 per liter.

Mengenai kompensasi kenaikan harga BBM untuk masyarakat tidak mampu, Aburizal menjelaskan dibagi

dalam tiga klaster, yaitu bantuan dan perlindungan sosial bagi keluarga tidak mampu berupa BOS, raskin, dan BLT.

Pemerintah akan menyalurkan BLT ke-10 kota yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, dan Kupang.

BLT akan disalurkan kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). Total dana yang disalurkan pemerintah mencapai Rp14,177 triliun.

Dari dana itu, sebesar 94,31% disalurkan kepada RTS. Sisanya, Rp806,649 miliar atau 5,69%, untuk membiayai kegiatan sosialisasi, koordinasi, pengembangan data, biaya operasional unit pelaksana, monitoring, dan evaluasi BLT.

Hal itu terungkap dalam salinan Laporan Mensos kepada Presiden tentang Persiapan Program BLT 2008.

BLT merupakan 'program lama' yang dilancarkan pemerintah pada saat menaikkan harga BBM bersubsidi dengan harapan membantu rumah tangga miskin (RTM). Tahun ini, pemerintah mengganti istilah RTM menjadi RTS.

Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Bambang Widianto mengakui ada penambahan kota sasaran BLT pada tahun ini menjadi 10 kota. Mengenai peluncuran program itu, dia mengatakan belum mengetahui secara persis.

Sementara itu, Manajer Komunikasi PT Pos Indonesia Joesman Karta Prawira membenarkan BUMN tersebut telah selesai mencetak kartu atau kupon BLT dan sebagian besar sedang didistribusikan kepada RTS di

Alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai 2008 (Rp miliar)



1. Dibagikan kepada 19,1 juta rumah tangga miskin	13.370,000
2. Dana <i>safe guarding</i>	806,649
• Departemen Sosial	15,135
• Dinas sosial provinsi	11,911
• Dinas Sosial kabupaten dan kota	30,168
• Kantor dinas sosial kecamatan	78,170
• Badan Pusat Statistik	300,374
• PT Pos Indonesia	318,970
• Menko Kesejahteraan Rakyat	0,319
• Kemeneg PPN/Bappenas	4,000
• Departemen Informasi dan Komunikasi	47,000
• Departemen Dalam Negeri	0,602

Sumber : Laporan Menteri Sosial kepada Presiden tentang persiapan program bantuan langsung tunai Mei 2008

BISNIS/DENNY IRAWAN

enam kota, sesuai dengan data BPS.

Pembagian kartu untuk empat kota lagi, lanjutnya, masih menunggu data dari BPS. Namun, dia menolak berkomentar lebih jauh mengenai jadwal pengalokasian BLT yang ditetapkan pemerintah.

Depsos akan mengelola dana *safe guarding* sebesar Rp135,384 miliar atau 0,955% dari total BLT, yang dialokasikan lewat Depsos pusat Rp15,136 miliar, dinas sosial provinsi Rp11,911 miliar, dinas sosial kabupaten dan kota Rp30,168 miliar, dan kantor dinas sosial di kecamatan sebesar Rp78,170 miliar.

Terlalu besar

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai biaya operasional (*safe guarding*) pengalokasian BLT yang mencapai Rp806,65 miliar terlalu tinggi.

Dana tersebut, lanjutnya, dapat di-

maksimal untuk RTM. Pemerintah, menurut dia, seharusnya tidak perlu membentuk tim baru untuk membagikan BLT, cukup menggunakan aparat yang ada sesuai dengan fungsinya, misalnya mengoptimalkan tugas Dinas Sosial.

Data Departemen Sosial itu memuat 14 tahap persiapan program BLT di antaranya rapat persiapan penyusunan anggaran pada 6-8 Mei dan pencetakan kartu dan distribusi BLT ke RTS dilakukan pada 6-28 Mei 2008.

Pada 8 Mei, dikeluarkan surat permintaan Mensos kepada PT Pos Indonesia untuk mencetak kartu BLT 19,1 juta RTS, dan sekitar 11-12 Mei 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLT diterbitkan Dirjen Perbendaharaan, Depkeu.

Tahap akhir adalah peluncuran BLT di 10 kota besar Indonesia di bawah pengawasan Menko Kesra, Bappenas, Depsos, dan PT Pos Indonesia.

Kepala Badan Analisis Keuangan dan Fiskal, Depkeu, Anggito Abimanyu, menjelaskan program BLT merupakan satu paket dalam tiga pilihan yang dapat diterapkan pemerintah guna menekan subsidi BBM yang diatur dalam pasal 14 UU APBN-P 2008.

Tiga pilihan kebijakan itu adalah pembatasan konsumsi, kebijakan harga BBM, dan kebijakan fiskal lainnya. (AHMAD MUHIBBUDDIN/TRI D. PAMENAN) (erna.girsang@bisnis.co.id)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 22

TAHUN 2008

DAMPAK BBM

Petani Peroleh Izin Beli BBM

KARAWANG, KOMPAS — Para petani pemilik traktor serta pengusaha penggilingan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, direkomendasikan untuk membuat surat izin pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Dengan izin itu, mereka dapat membeli bahan bakar minyak sehingga aktivitas sektor pertanian diharapkan tidak terganggu.

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Karawang Didy Sarbini HS, Rabu (14/5) di Karawang, mengatakan, surat rekomendasi itu telah disebar ke seluruh kecamatan sejak bulan lalu. Izin itu menjadi bukti kepemilikan traktor atau penggilingan serta mengantisipasi penyelewengan.

"Izin dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari tokoh tani setempat yang telah ditunjuk," ujar Didy.

Sejak empat hari lalu, petani di sejumlah kecamatan di Karawang tidak bisa mengolah sawah karena sulit memperoleh solar atau bensin untuk bahan bakar traktor. Pengelola stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) tak mau menjual BBM bersubsidi menggunakan drum, jeriken, kantong plastik, dan sejenisnya (*Kompas*, 14/5).

Menurut Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karawang Ijam Sujana, meski ada surat izin dari aparat setempat, sebagian pengelola SPBU tetap tidak melayani pembelian BBM oleh petani yang biasa menggunakan jeriken.

Petani di Kabupaten Indramayu pun ikut resah karena biaya sewa traktor akan naik, mengikuti kenaikan harga BBM. Setiap musim tanam, sebagian petani menyewa traktor untuk mengolah sawah. Sapta (60), petani Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, mengatakan, biaya satu kali sewa traktor untuk sawahnya seluas satu hektar Rp 500.000, termasuk enam liter solar. Jika harga solar naik, otomatis sewa semakin mahal. (MKN/NIT)

52

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

President approves cash aid for poor

Abdul Khalik
The Jakarta Post/Jakarta

President Susilo Bambang Yudhoyono has issued a presidential instruction for the disbursement of Rp 14.1 trillion (US\$1.55 billion) in direct cash assistance to help 19.1 million lower income households cope with planned fuel price increases.

Coordinating Minister for People's Welfare Aburizal Bakrie said late Wednesday after a Cabinet meeting the presidential instruction would serve as the legal basis for the cash disbursement program, expected to be launched in June when the government plans to raise fuel prices.

"The first phase of the program will cover a period of seven months until December. We are now printing the cash disbursement cards to be distributed across the country. We'll be ready by the third week of the month," Aburizal said.

Under the scheme, households that qualify will receive Rp 100,000 per month in compensation for the maximum 30 percent increase in fuel prices, he said.

The second phase of the program is expected to last until December next year.

Aburizal said that according to government data, the 19.1 million households that qualify for the program comprise 76.4 million people.

Paskah Suzetta, chairman of the National Development Planning Board, said the President has instructed the attorney general, Indonesian Military chief, National Police chief, governors, regents and mayors to ensure the money reached qualified households.

He warned that legal action would be taken against any officials found to be hindering the flow of funds to rightful recipients.

Finance Minister Sri Muliyani Indrawati said the government would propose the inclusion of funds for the cash disbursement program in the 2009 state budget.

"We can make sure that poor families get compensation through December 2009," she said.

The government plans to raise fuel prices to cap fuel subsidies and protect the state budget in the face of soaring global crude oil prices.

It is preparing a number of programs, including direct cash disbursements, to help lower income households cope with the higher prices.

The government has launched a Rp 13.2 trillion credit program in 4,000 districts across the country, and has extended Rp 5.3 trillion in credits to approximately 400,000 micro and small businesses.

With these programs, the government hopes to cut the poverty rate from 14 percent in 2008 to 12.5 percent in 2009.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2008

Pembeli Minyak Antre

Polisi Tangerang Temukan Indikasi Penyimpangan Solar Bersubsidi

TANGERANG, KOMPAS – Perburuan terhadap minyak tanah, Rabu (14/5) pagi hingga siang hari, terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Ratusan jeriken milik warga diantrekan berjajar di agen minyak milik Arifin di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, selama dua hari, hanya untuk mendapat jatah minyak tanah sebanyak 2 liter.

Antrean itu membuat Jalan Raya Ceger macet. Warga ngotot menunggu jeriken yang diantrekan di bawah terik matahari demi membeli minyak tanah dengan harga Rp 3.000 per liter.

Namun, tak semua warga mendapat jatah minyak tanah tersebut. Minyak tanah jatah agen itu diberikan kepada para pedagang minyak yang menjadi bagian bisnis dari agen itu sendiri.

Sebagian warga yang mendapatkan minyak tanah mengaku lega. Namun, sebagian lagi dari kelompok pengantre mengaku kecewa karena tak bisa membawa pulang minyak tanah, padahal jerikennya sudah diantrekan sejak

hari Senin, 12 Mei lalu.

"Jangan berharap membawa pulang minyak tanah kalau antre hari ini. Saya saja yang sudah antre sejak Senin, sampai jam 10 pagi ini belum dapat minyak," kata Yanti (37), warga RT 03 RW 02 Pondok Karya, Jurangmangu, Pondok Aren.

Merisa (28), warga Pondok Aren, ikut antre sejak Senin, tetapi tak kebagian minyak tanah. Ia berharap bisa membawa pulang minyak tanah. Penjualan minyak tanah di sana berdasarkan urutan dari antrean jeriken.

Warga bersedia antre panjang karena harga minyak tanah di agen lebih murah, yakni Rp 3.000

“
Jangan harap bawa pulang minyak tanah kalau antre hari ini. Saya antre sejak Senin sampai Rabu belum dapat minyak.

Yanti

per liter, dibanding harga di warung atau pedagang minyak tanah yang mencapai Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per liter.

Menimbun solar

Krisis harga minyak rupanya juga mengakibatkan aksi penimbunan solar oleh oknum di perusahaan. Rabu siang kemarin, aparat Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kabupaten menangkap basah Was dan Wan, karyawan PT Ascott di Kampung

Seglok, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Was yang menjadi sopir pada perusahaan itu dan Wan, karyawan bagian gudang, kepergok sedang memindahkan solar dari tangki mobil boks milik perusahaan ke dalam drum.

"Menurut Was, sepanjang Rabu tadi, ia sudah tiga kali mengisi tangki mobil dengan solar dari SPBU," tutur Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kabupaten Ajun Komisaris Ade Ary, semalam.

Kepada polisi, Was dan Wan mengaku disuruh pimpinannya mengisi tangki mobil dengan solar ke beberapa SPBU di Tigaraksa. Sampai di pabrik, mereka menyedot solar dari tangki untuk dipindahkan ke drum. Polisi menyita 1.120 liter solar bersubsidi yang sudah dipindahkan ke dalam drum. Solar yang terkumpul itu akan digunakan untuk bahan bakar genset.

Berkait kasus itu, Ade Ary akan minta keterangan dari pemilik PT Ascott. (PIN/TRI)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 23

TAHUN 2008

SPBU Kehabisan Bensin

Pedagang Kesulitan Mengangkut Bahan Pokok

MAKASSAR, KOMPAS — Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Makassar, Sulawesi Selatan, kehabisan premium. Pihak Pertamina Unit Pemasaran VII Sūsel menilai hal itu akibat masyarakat menimbun premium. Sebaliknya, beberapa pegawai SPBU menuturkan, kiriman dari Depo Pertamina berkurang.

Rabu (14/5), SPBU di Jalan Andi Pangeran Pettarani kehabisan premium sejak pukul 08.00 Wita. Beberapa kendaraan yang ingin membeli premium terpaksa membeli pertamax atau mencari premium di SPBU lain. Adapun solar di SPBU itu masih ada.

"Biasanya, setiap hari kami menerima kiriman 32.000 liter premium dan 32.000 liter solar. Namun, sejak tiga hari terakhir, kami hanya menerima 24.000 liter premium dan 24.000 liter solar. Akibatnya, tiga hari ini kami kehabisan premium pagi hari," kata salah satu pegawai SPBU. Hal senada dituturkan pegawai SPBU di Pannamp.

SPBU di Jalan Letjen Hertasing juga sempat kehabisan premium, Rabu pagi. SPBU itu menempikan pengumuman ten-

tang habisnya premium. Namun, pukul 12.30 Wita, SPBU itu kembali menjual premium.

Sejumlah nelayan di Paotere mengeluhkan sulitnya mencari bahan bakar bagi kapal mereka. Stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan di Paotere tutup karena tidak mendapat pasokan dari Pertamina. Sementara sejumlah SPBU di dekat Paotere menolak melayani nelayan yang membeli bahan bakar dengan jeriken.

Kepala Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Kantor Pertamina Unit Pemasaran VII Nadjamuddin Majid membantah bahwa Pertamina mengurangi pasokan premium dan solar bagi SPBU di Makassar.

"Kami hanya melakukan pengendalian. Jika tidak, pembelian

BBM oleh masyarakat bisa berlipat-lipat dan negara harus menyubsidinya," katanya.

Sulit mengangkut

Akibat kesulitan mendapatkan BBM, para distributor dan pedagang di beberapa pasar tradisional di Banjarmasin mengaku kesulitan mengangkut bahan pokok ke daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Barang-barang baru terangkut setelah truk mengantre enam sampai tujuh jam di SPBU.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel Subarjo, Rabu (14/5) di Banjarmasin, membenarkan hal itu. Penyebabnya, demikian Subarjo, angkutan bahan pokok tidak mendapat prioritas dalam antrean di SPBU. Padahal, sepekan terakhir antrean berlangsung siang-malam. Pihaknya memfasilitasi agar truk pengangkut mendapat prioritas.

Di Kalteng, petugas Kepolisian Resor Palangkaraya, Rabu, menangkap Be dan Kmj saat mengisi BBM di SPBU Jalan Tjilik Riwut dan A Yani, Palangkaraya. Penangkapan itu terkait dugaan penimbunan BBM.

Kepala Satuan Samapta Polres Palangkaraya Ajun Komisaris Polisi I Wayan Korna menuturkan, Be, warga Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, ditangkap karena memodifikasi tangki mobil kijangnya sehingga daya tampung lebih besar. Adapun Kmj, warga Jalan RTA Milono, ditangkap karena membeli solar menggunakan empat jeriken untuk mobil bak terbukanya.

Di Sumsel, sebagian ibu rumah tangga mulai mengurangi jatah belanja karena harga bahan pangan di pasar tradisional melonjak. Bahan pokok itu, antara lain, adalah minyak goreng, tepung, beras, telur, ikan, dan ayam. Hal itu dituturkan Chatidjah (45) dan Nora (42), yang ditemui di Pasar 16 Ilir, Palembang, Rabu.

Di pelbagai kota terus terjadi unjuk rasa mahasiswa yang menolak rencana kenaikan harga BBM, seperti hari-hari sebelumnya. Unjuk rasa dilakukan mahasiswa pelbagai perguruan tinggi, antara lain di Makassar, Jambi, Lampung, Palu, Magelang, serta Bandung.

(ROW/CAS/FUL/ONI/ITA/HLN/
REN/EGI/CHE)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Pemerintah Sebaiknya Dialog

PURWOKERTO (SINDO) – Pemerintah diharapkan bersedia berdialog dengan para pengunjuk rasa yang makin keras menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah.

Harapan agar pemerintah berdialog antara lain disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Kalau menganggap mahasiswa yang menginap di Monas (Monumen Nasional) sebagai warga negaranya, pemerintah seharusnya berani menemui mereka," kata Sri Sultan di Purwokerto kemarin.

Menurut Sultan, maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian mahasiswa kepada masyarakat terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Di Jakarta, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar juga mengharapkan para menteri melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Sosialisasi ini penting untuk meredam aksi unjuk rasa.

"Ini kan banyak yang tidak mengerti, jadi harus diberi penjelasan. Mahasiswa banyak yang tidak mengerti tentang kenaikan ini," ujarnya.

Syamsir mengindikasikan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Ketika ditanya wartawan sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, siapa yang menunggangi aksi tersebut, Syamsir menjawab, "Kalian sudah tahu itu, tak

usah bertanyalah. Ada mantan menteri, ada yang lain."

Menurut Syamsir, rencana pemerintah menaikkan BBM akan menimbulkan banyak aksi unjuk rasa. Untuk itu, BIN telah siap mengantisipasi.

Tudingan Syamsir tentang demonstrasi yang ditunggangi ini disayangkan oleh beberapa politisi di DPR.

Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menilai pernyataan Syamsir sebagai salah satu strategi politik adu domba. Menurut Ganjar, strategi tersebut tak lebih dari kepanikan pemerintah menghadapi situasi di lapangan.

"Tahun 2005 juga begitu, alasannya harga minyak mentah dunia naik, kemu-

dian alasan APBN. Skenario ini dibuat agar kenaikan itu berjalan mulus. Ini cara politik mengadu domba," kata Ganjar di Gedung DPR kemarin.

Anggota Fraksi BPD Yusron Ihza Mahendra mengimbau Kepala BIN tidak semakin meresahkan rakyat. Seharusnya, Kepala BIN berupaya membuat masyarakat lebih tenang. "Kami sayangkan pernyataan tersebut. Aksi main tuding ini akan menambah panas suasana," ujarnya.

Para man-

tan menteri menanggapi tudingan Syamsir dengan cara beragam. Mantan Menteri Koordinator Perencanaan sekaligus Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli mengaku enggan menanggapi pernyataan itu.

"Kan tidak menyebut nama," ujar Rizal. Berikutnya dia meminta Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia menanggapi masalah ini.

Rizal selama ini dikenal sebagai mantan menteri yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa waktu lalu Rizal mendeklarasikan Komite Bangkit Indonesia yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan kelompok oposisi.

Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia Adhie M Masrardi tidak mempermasalahkan tudingan BIN tersebut. "Kita akan terus menggalang kekuatan untuk menolak kenaikan harga BBM," katanya tadi malam.

Mantan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima

ABRI Wiranto mengatakan, pemerintah seharusnya mencari solusi, bukan mencari kambing hitam dengan menimpakan kesalahan pada orang lain. Yang terpenting, ujar Wiranto, adalah mencari akar masalah mengapa muncul aksi unjuk rasa.

"Kita sudah terjebak ke arah yang salah. Kalau ada demo selalu yang dicari siapa sponsornya, lalu muncul spekulasi dan tuduh menuduh dengan berbagai variasi," ujar Wiranto kepada SINDO tadi malam.

Menurut Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat

itu, jika tidak bisa dikompromikan pemerintah hanya perlu menjaga agar unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum.

"Selanjutnya dengar aspirasi rakyat itu. Cari solusinya kan enak toh? Mengapa harus repot?" sergah Wiranto.

Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menilai tudingan Kepala BIN sebagai bentuk dukungan lembaga itu pada kebijakan pemerintah. "Kalau begitu BIN berpihak pada pemerintah, bukan kepada rakyat," ujar Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin. Ketua

Umum Dewan Syura PKB itu mengatakan tetap menolak kenaikan harga BBM.

Mantan Ketua MPR Amien Rais menegaskan sikapnya yang mendukung mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

"Saya akan dukung demonstrasi mahasiswa, asal tidak pakai kekerasan. Pemerintah harus terus ditekan agar harga BBM tidak naik, sehingga rakyat tidak melarat," ujar Amien di Jakarta kemarin.

Amien menilai rencana kenaikan harga BBM adalah bentuk pembodohan terhadap rakyat. Apalagi, pemerin-

tah berencana menjual 44 badan usaha milik negara (BUMN) yang masih sehat dan menguntungkan negara. Jika dijual, semua kekayaan dan sumber pendapatan negara akan dikuasai asing.

"Saya tidak terima jika dikatakan bahwa demo kenaikan BBM menguntungkan pengusaha dan orang kaya. Ini adalah pembodohan sekaligus lelucon," ujarnya.

(ridwan anshori/rarasati syarief/amril/chamad hojin/dian widiyanarko/ahmad baidowi/mohammad sahlan)

AKSI DI BERBAGAI DAERAH

Jakarta
Selasa (13/5), pengamanan Istana Negara diperketat menyusul aksi massa menolak kenaikan harga BBM.

Cirebon
Mahasiswa memblokir jalan raya Pantura Jawa arah ke Jakarta. Karena menimbulkan kemacetan, aksi pada Senin (12/5) akhirnya dibubarkan polisi.

Yogyakarta
Aparat dan mahasiswa bentrok saat demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung Agung, Jalan Malioboro, Jumat (9/5).

Surabaya
Ratusan mahasiswa Front Perjuangan Rakyat (FPR), Senin (12/5) kemarin bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM.

Makassar
Beberapa hari terakhir kota ini terus diwarnai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla dijaga ketat.

Bali
Mahasiswa Universitas Udayana long march ke Gedung DPRD, Senin (12/5). Mereka menilai rencana menaikkan harga BBM hanya akan semakin menyengsarakan rakyat.

Solo
Mahasiswa membajak dua mobil tangki dan memaksa Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo berorasi menolak kenaikan harga BBM, Rabu (14/5).

Bandung
Demonstrasi menggelar aksi tanda kekecewaan terhadap pemerintah yang tetap akan menaikkan harga BBM. Aksi protes biasa digelar di depan Gedung Sate.

Aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) muncul di berbagai daerah. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menduga ada aksi yang didalangi mantan menteri.

SINDOMASYHUDI

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <u>15</u> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 4										TAHUN 2008	

Kerosene conversion almost completed

Mustaqim Adamrah
The Jakarta Post/Jakarta

The government has finished its kerosene-to-gas conversion program for the capital's low-income households, says state oil and gas firm PT Pertamina.

Pertamina spokesman Wisnuntoro said Wednesday there were around 30,000 units of gas stoves and three-kilogram liquefied petroleum gas (LPG) cylinders left for micro, small and medium businesses.

"We have distributed more than 1.9 million units of gas stoves and LPG cylinders and we have finished the program for low-income families," he said.

"We still need to give away 30,000 units to micro and small-scale businesses, including street vendors. We have a target of 500,000 cylinders and stoves for distribution," he said.

He said the businesses were in West

Jakarta and East Jakarta.

Wisnuntoro said the firm had initially set a target of 1.5 million receivers, comprising low-income families and micro, small and medium entrepreneurs.

"But our target has now become two million because there were a number of businesses left off our first lists," he said.

Although the conversion program is about to be completed as scheduled, Wisnuntoro said Pertamina had not set a new date for when it would stop distributing subsidized kerosene in the capital.

"It will depend on the situation but it will not interfere with the plan to increase fuel prices," he said.

The government has announced its plan to raise fuel prices by 30 percent in early June in an effort to cut rising fuel subsidies.

Wisnuntoro said Pertamina had been selling nonsubsidized kerosene priced at Rp 43,000 (US\$4.65) for a five-liter container at 24 gas stations.

He said Pertamina had gradually cut its subsidized kerosene supply in the city from 3.5 million liters a day to 100,000 liters a day at present.

The government began its program in December 2006, with Pertamina playing a leading role in its implementation.

The government hopes the program will reduce spending on fuel subsidies, which currently cost about Rp 40 trillion every year.

The program has faced hurdles ranging from complaints from households about defective gas stoves to subsidized kerosene scarcity in the areas where the program is yet to be completed.

Another hurdle is likely to arise as the city does not have enough LPG stations.

The city needs at least five LPG-filling stations in each municipality or 25 throughout the city. However, it currently has seven stations only, mostly in North Jakarta.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Kartu BLT Mulai Didistribusikan

JAKARTA(SINDO) – Pemerintah mulai mendistribusikan kartu bantuan langsung tunai (BLT) di 10 kota besar mulai hari ini. Kesepuluh kota dimaksud Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Kupang, dan Makassar.

“Pada kartu tersebut ada kodenya, untuk orang yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Dari kode ini pemerintah mendapatkan data yang valid,” ujar Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, tadi malam.

Sidang kabinet paripurna yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyaluran BLT bagi rumah tangga sasaran (RTS) itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sidang itu berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 22.30 WIB.

Menteri Bachtiar menjelaskan, pembagian kartu akan dilakukan secara bertahap hingga terdistribusi ke seluruh pelosok di Tanah Air. Dia berharap kartu BLT dapat serentak diterima RTS dalam waktu cepat. “Jadi kalau kartu ini sudah siap, BLT akan siap diluncurkan oleh Presiden. Pada 23 Mei mendatang Presiden akan meminta laporan tentang kesiapan BLT ini kepada kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM setelah program BLT siap. “Pokoknya Presiden mau BLT siap. Setelah itu akan diumumkan berapa kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT. Inpres tersebut untuk mendukung kelancaran program BLT dalam rangka kompensasi kenaikan harga BBM.

Dalam inpres itu Presiden memerintahkan sembilan menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, gubernur, bupati dan wali kota, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pelaksanaan BLT.

“Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Widodo AS), Presiden SBY menginstruksikan agar dapat mengoordinasikan langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat untuk pelaksanaan BLT kepada RTS dalam rangka pengurangan subsidi BBM,” ungkapnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diinstruksikan agar segera menyiapkan kondisi perekonomian yang mendukung penyiapan program BLT. “Menteri Sosial diinstruksikan oleh Presiden menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan BLT kepada RTS.”

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

Kenaikan Harga BBM

TAHUN 2008

Sektor Perikanan Paling Terpukul

KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) YANG RATA-RATA MELEBIHI 100% SEJAK 1 OKTOBER 2005 TELAH MEMBERIKAN DAMPAK LUAS TERHADAP INDUSTRI (USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR) PERIKANAN NASIONAL. ITU MASIH DIRASAKAN SAAT INI. KINI BERBAGAI MEDIA LOKAL MEMBERITAKAN PEMERINTAH SUDAH MENGISYARATKAN AKAN MENAIKKAN HARGA BBM.

KITA belum bisa membayangkan apakah hari-hari ke depan industri perikanan nasional kita masih berjalan kalau tidak segera diambil langkah-langkah penyelamatan.

Tentu saja, kenaikan harga BBM tersebut menghentikan aktivitas melaut nelayan. Suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi perikanan nasional dan mungkinkah kenaikan harga BBM ini merupakan *the end of history* bagi industri perikanan nasional (perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan)? Untuk menuntaskan permasalahan kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada sektor pertanian dan perikanan, Direktorat Riset dan Kajian Strategis IPB mengumpulkan para pakar IPB pada 6 Mei 2008 untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat petani dan nelayan yang akan semakin termarginalkan.

Dampak kenaikan harga BBM

Dampak kenaikan harga BBM sebelumnya bagi nelayan masih dirasakan merata di seluruh Tanah Air dan kenaikan harga BBM tahun ini akan menambah berbagai kesulitan, yakni, pertama, ter-

hentinya aktivitas melaut dari usaha perikanan skala kecil dan besar akibat ketidakmampuan membeli BBM dengan harga terjangkau. Daerah-daerah seperti Lamongan, Sendangbiru, Gresik, Tegal, Pekalongan, Benoa, Bitung, Belawan, Tual, dan seluruh sentra-sentra perikanan tangkap menghentikan aktivitas usaha. Perikanan budi daya khususnya pertambakan udang intensif mengalami hal serupa karena tidak mampu menghidupkan mesin *genset* yang menggerakkan kincir air.

Kedua, meningkatnya jumlah angka pengangguran di sektor perikanan akibat kehilangan pekerjaan, seperti anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Benoa, Bali, yang bekerja dalam perikanan skala besar berjumlah sekitar 12.000 orang, dengan tidak beroperasinya kapal-kapal ukuran di atas 60 GT, hal tersebut menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) para ABK ditambah lagi karyawan yang bekerja dalam industri terkait. Hal yang sama juga berlaku bagi perikanan di bawah 30 GT yang sebagian dalam beberapa bulan terakhir mereka tidak lagi melaut karena

kerugian usaha dan karena faktor cuaca sehingga mereka terpaksa bekerja serabutan demi menutupi kehidupan sehari-hari. Hasil pengamatan di beberapa daerah banyak beralih profesi ke berbagai sektor ekonomi lainnya.

Ketiga, bangkrutnya usaha perikanan dan berhentinya aktivitas usaha mengakibatkan mereka tidak sanggup lagi membayar kredit pinjaman baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank dan hancurnya kelembagaan ekonomi perikanan yang telah terbentuk. Umpamanya, kelembagaan LEPPM3 yang dulu dibentuk dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di beberapa daerah terancam bubar akibat anggotanya (para nelayan) tidak mampu lagi mengembalikan kredit pinjaman karena berhenti melaut.

Keempat, industri pengolahan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKMK) perikanan terancam gulung tikar. Beberapa usaha industri pengalengan dan pengolahan ikan di Bitung, Sulawesi Utara, sebagian telah menutup aktivitas karena kesulitan mendapatkan bahan baku ikan. Selain itu, biaya produksi dan distribusi semakin meningkat akibat tingginya biaya BBM. UKMK yang juga terancam berhenti akibat kenaikan harga BBM adalah usaha *home industry* (kerupuk ikan, baso ikan, dan lain-lain), ikan asin, ikan asap, dan ikan kering yang terkena dampak karena meningkatnya biaya produksi dan berkurangnya suplai bahan baku dari usaha perikanan tradisional.

Kelima, terjadinya ketidakseimbangan antara biaya produksi perikanan dan harga ikan di pasar domestik dan internasional. Akibat kenaikan harga BBM, praktis meningkatkan biaya operasional kapal, bahan kebutuhan selama melaut dan biaya produksi dalam industri budi daya dan pengolahan yang selama ini memang kurang efisien semakin kalah bersaing. Sementara itu, harga ikan di dalam dan di luar negeri tidak meningkat harganya. Misalnya harga di pasar Jepang relatif konstan sehingga kalaun usaha dan industri perikanan tetap dijalankan, dipastikan akan merugi. Sebuah malapetaka yang sulit terelakan karena tingginya harga BBM. Walaupun para pengusaha ikan di Indonesia meminta agar pasar Jepang menaikkan harga ikan dari US\$5,1 menjadi US\$7,1 per kg, mereka menolak. Hal yang sama juga berlaku di pasar domestik, dengan naiknya harga ikan di pasar-pasar tradisional maupun modern tidak terlalu signifikan. Penyebabnya jelas karena harga ikan di Indonesia bergantung pada mekanisme pasar. Mungkin hari-hari ke depan ma-

syarakat akan mengalami kesulitan apabila harga BBM naik, harga ikan akan naik karena terbatasnya pasokan dan selanjutnya akan berdampak pada menurunnya konsumsi ikan secara nasional.

Keenam, *illegal fishing* atau penangkapan liar ikan yang masih terjadi di perairan Indonesia karena usaha mereka masih disubsidi pemerintah termasuk di dalam kegiatan tersebut membeli ikan di beberapa daerah sentra-sentra perikanan menjual ke kapal 'asing' di tengah laut. Tentu hal ini sangat menyedihkan karena kapal asing akan mengeruk secara tak terkendali sumber daya perikanan nasional.

Ketujuh, meningkatnya kemiskinan nelayan. Hilangnya sumber pendapatan, meningkatnya pengangguran, dan tidak jelasnya orientasi masa depan nelayan akan menyebabkan derajat kemiskinan mereka akan meningkat. Walaupun selama ini sudah dilakukan berbagai upaya menanggulangi kemiskinan nelayan, kenaikan harga BBM akan memperparah kemiskinan nelayan. Keadaan tersebut dapat berimplikasi terhadap meningkatnya problem sosial seperti keresahan sosial.

Urgensi kebijakan pemerintah

Dalam situasi yang memprihatinkan tersebut, kebijakan Pemerintah dalam rangka menyelamatkan industri perikanan harus segera dapat dioperasionalkan dengan mempertimbangkan se-

▶▶'Sudah dirasakan sampai saat ini bahwa kebijakan kenaikan harga BBM telah menyengsarakan rakyat khususnya nelayan dan mengancam industri perikanan nasional.'

gala masukan dari *stakeholder*. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dahulu telah mengeluarkan empat paket kebijakan. Pertama, membebaskan kapal perikanan di bawah 60 GT dari biaya pungutan hasil perikanan dengan konsekuensi pemerintah kehilangan penerimaan negara bukan pajak Rp5,8 miliar.

Kedua, menghemat pemakaian BBM. Pemerintah mengizinkan beroperasinya kapal ikan secara berkelompok dalam satu manajemen usaha atau koperasi. Pola itu harus didukung kapal khusus pengangkut hasil tangkapan ikan dan penyuplai BBM di laut.

Ketiga, untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, DKP memberikan izin lokasi penangkapan (*fishing ground*) dari yang semula satu daerah menjadi dua daerah penangkapan dan juga memberikan tambahan pelabuhan pendaratan dari maksimal tiga unit menjadi paling banyak lima unit.

Keempat, pendelegasian proses perizinan di tingkat provinsi un-

tuk penerbitan surat penangkapan ikan (SPI) yang selama menjadi kewenangan pemerintah pusat. Paket kebijakan tersebut mulai diberlakukan 1 November 2005 maupun Permen KP No 05 Tahun 2008.

Beberapa alternatif kebijakan perlu dilakukan karena bila mencermati kebijakan tersebut, penanggulangan beban nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan tangkap, budi daya, dan pengo-

lahan akibat kenaikan harga BBM masih belum dapat diatasi dengan baik. Itu disebabkan, pertama, kalau pemerintah sekadar membebaskan pungutan hasil perikanan, belum tentu masalah selesai. Masih ada pungutan liar yang sukar dikendalikan.

Kedua, kebijakan itu kurang efektif karena harga ikan relatif tidak naik. Usaha perikanan tetap sulit beroperasi karena komponen biaya produksi relatif tinggi. Keuntungan dari hasil tangkapan otomatis mengalami penurunan atau malahan merugi. Dengan demikian, subsidi terbatas masih tetap diperlukan pada sektor perikanan yang komponen BBM sangat dominan serta banyak menyerap tenaga kerja dan penyedia protein bagi segenap lapisan masyarakat. Kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan biaya operasional yang lain seperti bahan kebutuhan pokok selama melaut yang mencapai 20%-30% dan penyediaan es balok.

Nasib nelayan tradisional, nelayan kecil, dan buruh perikanan



TUNTUTAN NELAYAN: Ratusan nelayan membawa perahu saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena sangat membebani nelayan kecil.

yang beroperasi di daerah-daerah terpencil (pulau-pulau kecil maupun daerah perbatasan), perlu juga mendapat perhatian. Selain karena memang dari dulunya mereka miskin, mereka dipastikan akan semakin sengsara akibat tingginya harga BBM yang kerap harganya jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Ketiga, kebijakan pendelegasian perizinan di level provinsi yang semula dikeluarkan pemerintah pusat perlu diikuti kontrol ketat agar tidak merusak kelestarian sumber daya. Keempat, kebijakan ini belum menyentuh problem industri pengolahan perikanan seperti pengalengan dan pembekuan. Sebelum kenaikan harga BBM pun industri perikanan nasional banyak yang kolaps akibat kekurangan bahan baku. Usaha perikanan nasional belum mampu menyuplai bahan baku industri nasional sehingga perlu ada terobosan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan. Dengan demikian perlu dipersiapkan langkah-langkah proaktif pemerintah dan masyarakat perikanan guna memperbaiki kondisi perikanan yang sedang dirundung duka.

Alternatif kebijakan

Sudah dirasakan sampai saat ini bahwa kebijakan kenaikan harga BBM telah menyengsarkan rakyat khususnya nelayan dan mengancam industri perikanan nasional. Alternatif kebijakan yang dapat ditelaah lebih lanjut adalah, pertama, seharusnya pemerintah melalui DKP memiliki desain besar dan program pengelolaan pembangunan perikanan nasional dengan segala faktor dominan yang dapat berpengaruh sehingga dapat dihitungkan dan dipersiapkan langkah-

langkah untuk mengatasi perubahan yang terjadi secara lokal, nasional, regional maupun global. Dengan demikian, dapat diantisipasi perubahan dominan yang akan berpengaruh pada perikanan dan disiapkan langkah solusinya sejak awal.

Kedua, memperjelas dana kompensasi nelayan yang dialokasikan dalam APBN. Sebaiknya dana kompensasi tersebut dimanfaatkan secara bijaksana khususnya untuk program-program yang dapat meningkatkan daya saing dan pengembangan sistem dan teknologi alternatif yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat perikanan, misal rumput, pertanian laut, penyaluran BBM.

Ketiga, penataan sistem produksi perikanan dan pemasaran yang lebih efisien dan kompetitif. Termasuk pengembangan kemampuan pengembangan budi daya tawar, payau, dan laut yang lebih menghemat BBM maupun aparat penegak hukum menindak dan memberantas penangkapan liar ikan dan pungutan liar yang sangat membebani nelayan.

Keempat, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengelolaan perikanan dan program pelestarian sumber daya ikan melalui kegiatan penstokan ulang atau pertanian laut, terutama untuk jenis ikan yang tidak bermigrasi, seperti kerapu. Program itu dapat dikembangkan pada daerah-daerah yang memiliki kondisi lingkungan perairan yang khas seperti atol, goba, dan perairan semi-tertutup semisal teluk. Pada saat ini PKSPL-IPB sedang mengembangkan program ini bersama Pemkab Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Program itu diharapkan

akan meningkatkan stok ikan dan juga memudahkan nelayan untuk menangkap ikan termasuk menjamin proses regenerasi ikan. Dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan menjadi prasyarat awal keberlanjutan program ini melalui pemberian hak pengelolaan kepada nelayan. Dengan demikian, nelayan yang mengelola dan memanfaatkannya tidak perlu lagi melaut terlalu jauh sehingga pada akhirnya akan menghemat penggunaan BBM.

Kita harus tetap optimistis bahwa usaha perikanan kita bukan diambang *the end of history* karena bangsa ini masih memerlukan protein ikan untuk mencerdaskan generasi bangsa, diharapkan dengan kerja keras dan keberpihakan pemerintah, kita yakin bahwa masih ada jalan keluar yang konstruktif untuk mempertahankan usaha perikanan nasional. Hal ini penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak serta dijamin UUD 1945. Kita tidak mungkin menyuruh lagi nelayan 'bersabar' akibat kenaikan harga BBM, sementara keluarga mereka butuh makan, biaya sekolah, dan kesehatan. Dengan semangat keberpihakan pada masyarakat kecil serta bekerja lebih keras dan cerdas, sektor perikanan diharapkan menjadi lebih baik dan kukuh dalam mengantisipasi perubahan situasi ekonomi yang sangat kompetitif.

(Tridoyo Kusumastanto/Kepala Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB))

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

KENAIKAN HARGA BBM

TAHUN 2008

BLT Plus Siap Diluncurkan

Seputar Kenaikan Harga BBM

REAKSI penolakan dari berbagai elemen masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan sia-sia. Harga BBM pada Mei ini tetap naik. Sejauh ini pemerintahan SBY-JK sudah dua kali menaikkan harga BBM, yaitu 30% pada Maret 2005 dan 120% pada 1 Oktober 2005.



Cadangan Minyak Bumi Indonesia (2007)



ANTRE ISI PREMIUM:

Pengendara sepeda motor antre mengisi premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kemarin. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan berbagai macam gejala di daerah.

Terbukti : 3.988,74 MMSTB
 Potensial : 4.414,57 MMSTB

Keterangan :
 MMSTB = metric stock tank barrel

Produksi Minyak Bumi 2000-2007 (juta barel)

Tahun	Produksi	Konsumsi	Ekspor	Impor
2000	517	287	226	79
2001	490	256	240	118
2002	456	238	217	121
2003	416	228	211	130
2004	400	217	180	148
2005	385	216	157	120
2006	359	218	114	114
2007	347	203	127	110

Sumber: esdm/pertamina/FOTO: REUTERS/SIGIT PAMUNGKAS
Gratis: TIYOK



JAKARTA (MI): Program bantuan langsung tunai (BLT) plus siap diluncurkan. Program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu dilaksanakan Juni.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan hal itu sesuai rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, tadi malam. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB berakhir pukul 21.30 WIB.

Dana yang disiapkan pemerintah untuk BLT Rp14,1 triliun, kredit usaha rakyat (KUR) Rp4,5 triliun, dan raskin Rp4,2 triliun.

Menko Kesra mengungkapkan syarat utama kelancaran BLT, pertama, pencetakan kartu kapan diberikannya. "Kar-

tu sudah siap. Tinggal kapan diberikan kepada yang terkait," kata menteri yang akrab disapa Ical itu.

Ical mengingatkan, tidak hanya BLT yang menjadi fokus pemerintah, tetapi juga penambahan penerima raskin. Yakni anggota TNI/Polri yang masuk golongan di bawah tamtama, PNS yang masuk golongan rendah, atau golongan satu dan dua. "Jadi, minimal ada 19,1 juta kepala keluarga (KK) yang menerima BLT dan ditambah 12 juta KK penerima raskin," ujarnya.

Raskin yang sebelumnya diberikan selama 10 bulan, berubah jadi 12 bulan dengan jumlah 15 kg per KK. Sedangkan raskin untuk PNS dan TNI/Polri mendapatkan 12 kg per KK.

Sementara itu, Menkeu Sri Mul-
yani mengatakan penerapan *smart*

card dan kartu kendali mulai diberlakukan November. Hasil rapat itu akan dibawa ke DPR hari ini.

Ical menambahkan, besaran BLT masih Rp100 ribu. Pemerintah juga, memfokuskan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Ada tiga program pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pertama, kelompok keamanan sosial, kedua, kelompok pemberdayaan sosial, dan ketiga, kelompok usaha mikro dan kecil.

Kelompok pertama itu ada bantuan operasional sekolah. "Cluster ini, yaitu BLT dan penambahan jumlah penerima raskin," kata Ical. Kelompok kedua, lanjutnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang pada anggaran 2008/2009, Rp13,5 triliun, termasuk KUR. **(Faw/X-4)**

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : <u>3</u>	
TAHUN 2008	

KONVERSI

Warga Dipungut Rp10 Ribu untuk Setiap Kompor Gas

BOGOR (MI): Pada program konversi minyak tanah ke gas di Bogor, warga dipungut Rp10 ribu per tabung. Untuk mendapatkan satu kompor dan tabung gas, warga dimintai uang oleh petugas kelurahan.

Kejadian itu dialami warga Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saat pembagian kompor dan tabung gas, kemarin.

Akibatnya, sejumlah warga pun memprotesnya. Menurut warga, berdasarkan ketentuan pemerintah, pembagian kompor dan tabung gas seharusnya gratis. "Kami bingung, katanya gratis, tapi kok diminta uang?" kata Liliansa, salah seorang warga Kelurahan Harapan Jaya.

Meski banyak yang menolak, sebagian warga lainnya terpaksa memberikan Rp10 ribu seperti yang diminta petugas kelurahan. "Kalau tidak sekarang, bulan depan bahan bakar minyak sudah naik. Ketimbang kesulitan minyak tanah lebih baik bayar," ujar Nanih, warga Harapan Jaya.

Selain dipungut uang, untuk mendapatkan kompor, warga harus antri berjam-jam. Aksi saling dorong mewarnai pembagian program konversi tersebut.

Ketua RT Kelurahan Harapan Jaya Juanda mengaku pungutan tersebut sukarela untuk administrasi RT. "Tidak ada paksaan, hanya sukarela," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bogor Nuradi mengaku terkejut mengetahui adanya pungutan dalam program konversi tersebut. "Kompor gas itu gratis, tidak diknai biaya apa pun," terangnya.

Menurutnya, pembagian kompor gas gratis di Harapan Jaya itu atas permintaan ketua RT dan RW. "Mereka mendesak konsultan segera membagikan kompor gas gratis tersebut," ujar Nuradi.

Ia menyebutkan selain di Kelurahan Harapan Jaya, pembagian kompor tersebut juga dilakukan di wilayah Ciawi, Cigembong, Cijeruk, dan Caringin. (DD/J-2)

61

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008



**MOTOR JUGA
ANTRE BBM.**

Ratusan motor dan mobil ikutan antre mendapatkan BBM di SPBU Pai II, Bangko, Sumatera Selatan. Di tingkat pengecer harga bensin saat ini mencapai Rp 10.000/liter.

BENNY KURNIAWAN/BUNGO POS/JPNN

62

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

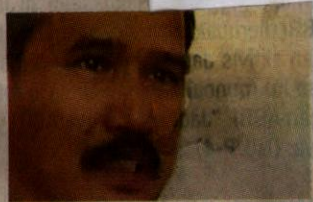
TAHUN 2008

Presiden Jangan Lindungi Menteri ESDM

JAKARTA (MI): Sejumlah anggota DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan tegas dan tidak melindungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro yang berkinerja buruk.

Kinerja Purnomo dinilai jeblok karena ia gagal memenuhi target produksi minyak mentah (*lifting*) Indonesia yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Bahkan sejak 2004 produksi minyak mentah terus merosot dan tidak pernah menyetujui angka 1 juta barel per hari. Padahal, pada 1997 produksi minyak kita masih 1,51 juta barel.

Jika produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari dengan konsumsi tetap, tidak akan ada gejolak seperti yang terjadi saat ini. Kegagalan peningkatan produksi minyak itu menyebabkan krisis energi yang memicu terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).



Nizar Dahlan
Anggota Komisi VII DPR

"Menteri yang berkinerja buruk tidak perlu dilindungi. Minta mengundurkan diri atau dicopot saja," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Nizar Dahlan, kemarin.

Ia mengemukakan bila melihat secara objektif kinerja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, tidak

ada alasan bagi Presiden untuk mempertahankannya di Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak 2005, kata Nizar, DPR melalui Komisi VII telah mengingatkan Menteri ESDM, baik melalui rapat-rapat kerja maupun melalui UU No 30/2007 tentang Energi, untuk bekerja keras. Pada intinya DPR mengharapkan produksi minyak dalam negeri diperbaiki sehingga kita tidak terlalu terancam gejolak harga minyak dunia.

"Tapi semua harapan itu tidak bisa terlaksana. Jadi, apa sih yang perlu dipertahankan dari Purnomo?" tanya Nizar.

Anggota Komisi VII dari PKB Wahyudin Munawir dan Ali Mubarak menambahkan, selama dipimpin Purnomo, Departemen ESDM mengambil kebijakan energi yang sangat konservatif, yakni lebih mengandalkan penggunaan BBM daripada berupaya mengembangkan sumber energi alternatif.

"Padahal banyak sumber energi lain yang seharusnya bisa dikembangkan karena kemampuan anak bangsa sudah sangat mumpuni. Misalnya panas bumi yang bisa memenuhi kebutuhan 27 Gw (gigawatt) yang saat ini baru digunakan sebesar 4%," jelas Wahyudin.

Kelemahan lainnya pemerintah melalui Departemen ESDM hingga saat ini belum berniat membentuk Dewan Energi. Padahal, UU Energi yang disahkan pada Agustus 2007 memerintahkan

agar Dewan Energi dibentuk selambatnya enam bulan setelah UU itu disahkan. "Keberadaan Dewan Energi penting untuk *check and balances* berbagai kebijakan energi."

63

Tidak transparan

Senada dengan Wahyudin, Ali Mubarak mengemukakan selama ini kelemahan Menteri ESDM adalah tidak pernah transparan mengungkapkan produksi minyak secara berkala. Selain itu, pemerintah tidak transparan soal kenaikan *cost recovery* dan nilai investasi.

Purnomo dalam penjelasannya melalui pesan singkat kepada *Media Indonesia* menyebutkan penurunan produksi minyak terjadi karena adanya penurunan alamiah cadangan minyak 7% per tahun mulai 1995. "Kondisi itu sesuai sifat *life time* yang sudah lebih dari 100 tahun," tulis Purnomo.

Namun, pernyataan menteri di tiga era presiden itu dibantah Project Officer Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng. "Penurunan produksi minyak di tengah naiknya investasi dan *cost recovery* itu paradoks, aneh. Departemen ESDM tidak transparan mengenai persoalan ini."

Ia memaparkan hasil studi IGJ selama 2005 menunjukkan jumlah kontrak kerja minyak dan gas (migas) tahun itu mencapai 160 buah dengan wilayah kontrak kerja 95,45 juta hektare di seluruh Indonesia. Luas konsesi itu setara dengan 49,65% luas daratan Indonesia.

"Anehnya, angka tersebut justru diikuti penurunan produksi minyak mentah dari 2004 sampai 2007. Data yang dikeluarkan ESDM menunjukkan penurunan sebesar 13,84% atau rata-rata per tahun 4,61%," Salamuddin menegaskan.

(Hil/Far*/UL/X-11)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Konsumsi Pertamina Diperkirakan Turun 20%

PENJUALAN bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax sepanjang 2008, diperkirakan, hanya mencapai 400 ribu kiloliter (kl). Penjualan pertamax itu berarti menurun sebesar 20% daripada penjualan 2007 yang mencapai 500 ribu kl. Hal itu diungkapkan VP BBM Retail Pertamina Djaelani Sutomo di Departemen ESDM, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penurunan itu disebabkan perbedaan harga yang makin besar antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi. "Penurunan penjualannya karena delta harga yang makin besar," ujarnya.

Ia menjelaskan harga pertamax saat ini untuk Jabodetabek sekitar Rp8.750 per liter. Angka itu hampir dua kali harga BBM jenis premium yang disubsidi yang harganya Rp4.500 per liter.

Dengan disparitas harga yang cukup besar, akhirnya masyarakat banyak memilih menggunakan premium ketimbang pertamax. Kondisi saat ini berbeda dengan ketika harga premium dan pertamax tidak berbeda jauh pada 2007. "Saat itu, masyarakat banyak beralih untuk membeli BBM pertamax," jelas Djaelani. Di sisi lain, Pertamina akan menaikkan kandungan etanol (bahan bakar nabati) di biopertamax dan biopremium. Kandungan etanol yang sebelumnya 3% akan dinaikkan menjadi 5%. Langkah tersebut ditempuh Pertamina karena harga biopertamax tidak lagi disubsidi. Karena itu, harga jual disesuaikan dengan harga pasar saat ini. (Pia/E-1)

64

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Tudingan Kepala BIN Syamsir Siregar Bekas Menteri Bekingi Demo Kenaikan BBM

Jakarta, RM. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menuding seorang bekas menteri berupaya menunggangi aksi menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa.

"Jelas, demo itu ada yang menunggangi. Kalian sudah tahu itu, nggak usah tanyalah, ada yang bekas men-

teri, pejabat," ujar Syamsir saat dicegat wartawan sebelum rapat kabinet membahas subsidi BBM di Kantor Presiden, kemarin.

Syamsir tak menyebutkan apa kepentingan bekas menteri itu menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa. Namun yang pasti, pihaknya akan terus memantau aksi unjuk rasa menentang

kenaikan BBM karena bisa mengganggu keamanan.

"Kalau pemerintah sudah mengambil keputusan (menaikkan BBM) ya harus kita hadapi. Ini kan banyak yang nggak ngerti, harus diberi penjelasan," tegasnya.

65

Syamsir menganggap para mahasiswa tak paham kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Makanya, menurut dia, perlu ada sosialisasi terus-menerus mengenai kebijakan pemerintah ini.

Meski tidak menyebut siapa bekas menteri yang dituding menunggangi demo anti kenaikan BBM, namun berdasarkan penelusuran *Rakyat Merdeka* tudingan Syamsir itu dialamatkan kepada Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian.

Rizal yang kini menjadi Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) merupakan orang paling keras mengecam kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah termasuk rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi menjelang Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2008, Rizal kerap menggelar pertemuan-pertemuan dengan sejumlah aktivis gerakan pro demokrasi. Salah satunya, konsolidasi dengan ratusan elemen pemuda, mahasiswa, aktivis pergerakan dan tokoh pergerakan di Wisma PKBI Jakarta, pada 24 April lalu.

Konsolidasi pemuda tersebut dihadiri sejumlah tokoh di antaranya aktivis '98, politisi, serikat pekerja, perwakilan petani dan nelayan serta elemen pergerakan lainnya.

Rizal yang dikontak *Rakyat Merdeka*, kemarin sore enggan mengomentari tudingan Syamsir itu. "Mohon hubungi juru bicara Komite Bangkit Indonesia, Adhie Massardi dan Bram Zakir. Terima kasih," ujarnya singkat.

Adhie M Massardi mengaku tudingan Syamsir itu memang bisa diarahkan

kepada Rizal. Sebab, selama ini memang paling lantang menentang rencana kenaikan BBM demi menyelamatkan APBN 2008.

Bahkan Rizal sempat menantang SBY melakukan debat terbuka mengenai cara mencegah kenaikan harga BBM tanpa mencabut subsidi.

Ditanya apakah Rizal akan menggelar aksi massa besar-besaran menolak kenaikan BBM pada 20 Mei mendatang? Adhie menjawab diplomatis, "Kita tunggu tanggal mainnya, Pak Rizal tidak akan mundur sejengkal pun untuk melawan antek-antek asing neoliberal yang menunggangi kenaikan harga BBM."

Ferry Juliantono, Sekjen Komite Bangkit Indonesia menegaskan, tudingan Syamsir itu menandakan pemerintah panik menghadapi rencana demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM pada Hari Kebangkitan Nasional 20

Mei mendatang.

Menurut ketua umum Dewan Tani Indonesia ini, Syamsir sengaja melemparkan tudingan itu memperlemah penggalangan aksi demo itu. "Nggak bisa, pemerintah nggak akan bisa menahan. Ini sudah meledak, rakyat sudah sengsara, kalau pemerintah menaikkan harga BBM rakyat akan bergerak," tegas Ferry.

Bekas presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pun angkat bicara. Menurut dia, wajar jika Syamsir membela SBY yang akan digoyang aksi demo besar-besaran anti kenaikan BBM.

"Karena memang mereka itu kan dibayar pemerintah, makanya mereka nggak akan peka terhadap tuntutan rakyat. Padahal kondisi rakyat saat ini memang sedang susah," kata Gus Dur saat dijumpai di Kantor DPP PKB di Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.

■ WHY/LUK/ONO

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 17

TAHUN 2008

Subsidi BBM Rp 190 Triliun

Pertamina Menaikkan Kuota Premium 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS – Subsidi bahan bakar minyak diperkirakan akan mencapai Rp 190 triliun jika pemerintah tidak menguranginya dengan cara menaikkan harga bahan bakar minyak. Itu disebabkan harga minyak mentah dunia yang menjadi basis perhitungan subsidi terus naik, hingga mencapai 124 dollar AS per barrel.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan hal itu Rabu (14/5) di Jakarta.

Menurut Anggito, jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dibiarkan mencapai Rp 190 triliun, anggaran yang disediakan APBN Perubahan (APBN-P) 2008 tidak akan mencukupi. Anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2008 ditetapkan Rp 126 triliun plus Rp 8,3 triliun dana bantalan pengaman sehingga anggaran subsidi BBM maksimal adalah Rp 135,3 triliun.

Dengan demikian, pemerintah harus menambah anggaran subsidi BBM sebesar Rp 55 triliun. Kondisi itu tidak adil dan timpang dengan program kemiskinan yang hanya didukung anggaran Rp 60 triliun.

"Ini bukan soal APBN yang aman atau tidak aman, tetapi ada struktur yang tidak adil dan tidakimbang karena anggaran prog-

ram kemiskinan Rp 60 triliun, tetapi subsidi sudah Rp 190 triliun. Karena itu, kalau harga dinaikkan, kami bisa mengalihkan itu untuk program kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Target subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun ditetapkan dengan asumsi volume BBM bersubsidi mencapai 35,5 juta kiloliter. Namun, DPR masih menoleransi pembengkakan volume konsumsi BBM hingga 39 juta kiloliter. Jika volume mencapai 39 juta kiloliter, seluruh bantalan Rp 8,3 triliun harus digunakan.

Namun, jika volume konsumsi BBM membengkak melebihi 39 juta kiloliter dan harga minyak dunia melebihi 100 dollar AS per barrel, pemerintah harus melakukan tiga langkah. Pertama, mengendalikan konsumsi, misalnya dengan kartu kendali (*smart card*). Kedua, menaikkan harga jual BBM. Ketiga, kebijakan fiskal

lain, misalnya memangkas anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen. "Kalau penghematan subsidi dari kenaikan harga bisa kami alihkan ke pangan, itu lebih adil," ujar Anggito.

Premium diperbanyak

Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengemukakan, pihaknya menambah pasokan premium bersubsidi sebesar 5 persen dari kuota premium bersubsidi sebesar 17 juta kiloliter tahun 2008. Penambahan pasokan itu disebabkan permintaan premium meningkat. "Namun, biasanya, permintaan premium akan turun setelah kenaikan harga BBM," kata Ari.

Pasokan BBM bersubsidi dari Pertamina setiap tahun mencapai 35 juta kiloliter, meliputi solar 11 juta kiloliter, premium 17 juta kiloliter, dan minyak tanah 7 juta kiloliter.

Ari mengatakan, pihaknya melarang stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) menjual BBM kepada pembeli yang menggunakan jeriken dan wadah lainnya untuk menghindari penimbunan BBM di kalangan masyarakat. Pertamina akan menutup SPBU yang terbukti melakukan penyelewengan dalam penjualan BBM. (OIN/LKT)



KOMPAS/RIZA FATHONI

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/5). Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena hal itu akan semakin memberatkan kehidupan nelayan. Sebanyak 50 persen biaya produksi untuk melaut dikeluarkan nelayan untuk membeli BBM, selebihnya untuk umpan, alat tangkap, es, dan perbaikan perahu.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8.2

TAHUN 2008

Gas di Indramayu Bukan dari Pertamina

JAKARTA — Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menduga semburan gas di Indramayu bukan berasal dari kebocoran sumur Pertamina JBT 175, yang berada 75 meter dari pusat semburan. Sumur itu saat ini sudah tidak memproduksi. Hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan semburan gas tersebut berasal dari lapisan batuan dangkal dan bukan hasil pengeboran dalam. Alasannya, ditinjau dari tekanan tembusan gas yang rendah dan tidak terdeteksinya gas-gas H₂S, CO, dan CO₂, sehingga kecil kemungkinan tembusan gas berasal dari kebocoran sumur pengeboran Pertamina JBT 175. Demikian seperti dikutip dari situs Departemen Energi dan Sumber kemarin.

Kemunculan gas di Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, tersebut berlangsung sejak April 2008. Gas ini muncul di sawah penduduk pada area seluas 250 x 100 meter persegi, berupa titik-titik tembusan gas berukuran kecil hingga berdiameter 20 sentimeter yang berjumlah ribuan titik bertekanan lemah.

● NIEKE INDRIETTA

67

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <u>15</u> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : <u> 5 </u> TAHUN 2008	

KENAIKAN HARGA BBM

Intelijen Curigai Penyusup Demonstrasi

JAKARTA — Badan Intelijen Negara (BIN) mensinyalir unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak awal pekan lalu ditunggangi pihak tertentu. "Jelas (ditunggangi)," kata Kepala BIN Syamsir Siregar sebelum sidang kabinet paripurna di kantor presiden kemarin. "Ada yang (oleh) bekas menteri kabinet, ada yang pejabat." Menurut Syamsir, mahasiswa pendemo justru tak mengerti alasan kenaikan harga BBM. Ia menilai perlu sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM. Ia mengusulkan agar

salah satu menteri menjelaskan alasan harga BBM harus naik. Intelijen saat ini memantau keamanan seiring rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah memutuskan mencahut subsidi bahan bakar minyak menyusul kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya, harga BBM akan naik. Keputusan pemerintah memunculkan unjuk rasa di berbagai daerah. Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo menilai demo antikenaiakan harga BBM ada kemungkinan

ditunggangi kepentingan politikus. "Semua pasti menunggangi, karena masyarakat sudah mulai gelisah." Kegelisahan masyarakat dinilai berpotensi memunculkan aksi demonstrasi yang ditunggangi kepentingan tertentu. Namun, kata dia, nasib rakyat perlu dipikirkan. Kepala Kepolisian RI Sutanto meminta kepolisian di daerah mengamankan situasi menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenaikan harga BBM berakibat terjadinya penyelundupan dan penyimpangan distribusi. Hal itu harus diantisipasi," katanya saat melantik delapan kepala kepolisian daerah baru di Markas Besar Polri. Kedelapan kepala polda itu adalah Inspektur Jenderal FX. Bagus Eko-danto (Papua), Brigjen Anton Bachrul Alam (Kalimantan Selatan), Brigjen Iskandar Hasan (Bangka-Belitung), Brigjen Antonius Bambang Suedi (Nusa Tenggara Timur), Brigjen Sukirno (Bengkulu), Komisaris Besar Suparni Tarto (Sulawesi Tengah), Inspektur Jenderal Tengku Ashikin Hussein (Bali), dan Brigjen Hadiatmoko (Riau). ● PURWANTO | DESY | FANNY | EKO ARI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

PDIP TETAP TOLAK HARGA BBM NAIK

Instruksi Presiden tentang program BLT dikeluarkan.



JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pemerintah menyiapkan strategi dan konsep yang tepat untuk menghemat energi. “Tidak hanya *statement*,” kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Bambang bahkan menilai pemerintah tak konsisten menjalankan aturan. “Komitmen penghematan energi tidak dilaksanakan dengan baik,” katanya. “Diversifikasi energi, briket batu bara, tidak terealisasi. *Biofuel*, jarak, dan CPO gagal.” Konversi energi pun tidak berjalan dengan baik. “Semua kacau-balau.” Karena itu, kata dia, PDIP menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Kemarin, *Tempo* memberitakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri me-

nyetujui kenaikan harga BBM. Bahkan Megawati juga menilai pemerintah gamang bersikap. Berita senada dilansir *Banjarmasin Post* edisi kemarin.

Menurut PDIP, “Megawati tidak pernah menyatakan sikap setuju atau tidak terhadap kenaikan harga BBM karena itu merupakan wewenang pemerintah.” Penegasan ini tertuang dalam surat yang diteken Ketua PDIP Panda Nababan dan Sekretaris Jenderal Pramono Anung untuk *Tempo* kemarin.

Pernyataan senada disampaikan oleh Ari Junaedi, staf khusus bidang pers dan media Megawati. Menurut dia, pemerintah harus peka terhadap kondisi krisis. “Saat Bu Mega menjadi presiden, tidak ada kenaikan harga BBM bukan karena saat itu menjelang pemilihan umum, tapi karena memahami kondisi rakyat,” kata Ari.

PDIP memperkirakan, jika harga BBM naik, angka kemiskinan meningkat. Ini seperti ketika harga BBM dinaikkan pada 2005. Waktu itu jumlah orang miskin 35,1 juta jiwa, setahun kemudian menjadi 39,3 juta jiwa. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan industri merosot. Pertumbuhan pada 2004 mencapai 7,2 persen, sedangkan pada 2007 turun menjadi 5,1 persen.

Melalui Ari, Megawati mempertanyakan program bantuan langsung tunai (BLT). "Itu mendidik rakyat memiliki mental peminta. Seharusnya harga BBM tidak dinaikkan, BLT dihapuskan," kata Ari mengulangi ucapan Megawati.

Namun pemerintah tetap pada putusannya menaikkan harga BBM maksimal 30 persen dan menjalankan program BLT. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menye-

diakan anggaran Rp 14,1 triliun untuk program BLT selama tujuh bulan, dari Juni hingga Desember tahun ini.

"Dan sepanjang Januari sampai Desember 2009 BLT akan tetap dilaksanakan dan dimasukkan dalam APBN 2009," ujarnya sesuai sidang kabinet paripurna di kantor presiden, kemarin malam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 tentang penyiapan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ia menginstruksikan sembilan menteri untuk menyiapkan program BLT, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

● NURLIS E MEUKO | EKO ARI | AQIDA SWAMURTI | AGUS SUPRIYANTO | EKO NOPHANSYAH | FANNY FEBIANA

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

DPRD Jabar Tolak Kenaikan Harga BBM

BANDUNG — Penentang-an terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM terus meluas. Kali ini, suara penolakan itu berasal dari Pemprov dan DPRD Jawa Barat.

Dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Rabu (14/5), tujuh fraksi yang ada menolak rencana pemerintah tersebut. Ketujuh fraksi itu adalah FPG, FPDIP, FPPP, FPAN, FKB, FPD, dan FKS.

"Sikap DPRD Jabar itu berangkat dari pandangan fraksi-fraksi yang merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat Jabar," kata Ketua DPRD Jabar, HAM Ruslan, di Bandung.

Kenaikan harga BBM, menurut Ruslan, makin menyengsarakan masyarakat. Kenaikan itu juga akan diikuti melambungnya harga bahan pokok. Karena itu, DPRD Jabar mengimbau pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencananya.

Sikap DPRD Jabar itu, kata Wagub Jabar, Nu'man Abdul Hakim, memang seharusnya demikian. Potensi penambahan jumlah warga miskin di Jabar jika harga BBM naik, perkiraannya mencapai 30 persen.

Jabar merupakan penyumbang 20 persen angka kemiskinan di Indonesia. "Tapi, kami tak bisa berbuat apa-apa karena instrumennya ada di pemerintah pusat," ujar Nu'man.

Kelompok warga yang saat ini masuk kategori ham-

pir miskin, dengan naiknya harga BBM, bakal terjerumus dalam kategori miskin. Dengan demikian, kata Wagub, dampak bertambahnya jumlah warga miskin itu makin membebani kerja pemerintah daerah.

Sedangkan program bantuan langsung tunai (BLT), menurutnya, tak proporsional mengentaskan kemiskinan. Lebih baik jika bentuknya berupa proyek padat karya, sehingga roda perekonomian rakyat berkesinambungan.

Sementara itu, demonstrasi oleh mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah masih berlanjut. Di antaranya di Gresik, Jawa Timur; Solo, Magelang, Jawa Tengah; Bandung, Jabar; Bandar Lampung, Lampung; Jayapura, Papua; dan Makassar, Sulsel.

Di Magelang, demonstrasi mahasiswa berhasil memaksa Ketua DPRD Magelang, Tri Djoko, dan wakilnya, Budi Prayitno, meneken kesepakatan bersama menolak kenaikan harga BBM. Surat yang ditandatangani itu kemudian dikirim dari ruang tata usaha DPRD ke DPR pusat melalui faksimile.

Aksi serupa juga terjadi di Gresik. Dua Wakil Ketua DPRD Gresik, Syamsul Muarif dari FPG, dan Jumanto dari FPDIP, didaulat massa mahasiswa membacakan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM.

■ san/uki/mur/wed/evy/dri

70

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (5) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

Kenaikan harga BBM disikapi berbeda

Oleh ERWIN TAMBUNAN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kalangan pengusaha di industri kehutanan menyambut rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan sikap yang berbeda-beda.

Ketua Umum Asosiasi Panel dan Kayu Indonesia (Apkindo) Abbas Adhar mengatakan kenaikan harga BBM merupakan permasalahan dunia dan tidak dapat dihindarkan.

"Siapa pun tidak bisa menolak kenaikan bahan bakar, termasuk kesulitan pangan," katanya di Jakarta, kemarin.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia, katanya, juga harus menyesuaikan kebijakannya dengan cara menaikkan harga BBM di dalam negeri. "Pemerintah harus segera mengambil kebijakan mengurangi pungutan liar atau menghapus subsidi bahan bakar tersebut," katanya.

Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), Soedradjat DP mengemukakan kenaikan harga BBM akan menaikkan ongkos produksi sebesar 20%.

"Pemerintah harus menghapus sejumlah pungutan liar dan menghentikan sementara pembayaran PSDH dan DR. Jika tidak, banyak perusahaan akan tumbang," ungkapnya.

Selain itu, kata Soedradjat, pemerin-

tah harus mendorong para pengusaha sektor kehutanan untuk membangun *power plant* yang menggunakan bahan baku alternatif seperti batu bara. "Kenaikan harga BBM tidak bisa ditolak. Harus ada bahan bakar alternatif, khususnya batu bara untuk mengurangi beban akibat melonjaknya harga BBM."

Namun, pihak PT Sumalindo Tbk menyatakan siap menghadapi kenaikan harga BBM lantaran bahan bakar untuk produksi diubah dari solar ke batu bara termasuk untuk *power plant*.

"Kami sudah mengantisipasi kenaikan harga BBM sejak dua tahun lalu," kata Wakil Presiden Direktur Sumalindo Grup David di Jakarta, kemarin.

Saat ini, perusahaan itu sudah memiliki dua *power plant* masing-masing berkapasitas 7,5 megawatt. Pada akhir bulan ini akan dioperasikan satu *power plant* baru berkapasitas 7,5 MW. "Total kapasitas listrik dari *power plant* kami 22,5 megawatt dan berada di Kalimantan," ujarnya.

Pembangunan ketiga proyek itu merupakan salah satu upaya Sumalindo

71

mengimplemen-
tasikan program
Strategic Cost Reduction (SCR) khusus-
nya untuk menekan
beban biaya energi
akibat kenaikan
harga solar yang sa-
ngat signifikan pada
Agustus 2005 yaitu
sekitar 168 % dari
sebelumnya.

Bahkan perusa-
haan itu menyum-
bangkan 1,5 mega-
watt tenaga listrik-
nya untuk PLN
yang lokasinya ber-
dekatan dengan
lokasi pabrik.

Setelah kenaikan harga solar dua ta-
hun lalu, kata David, Sumalindo meng-
antisipasi ketersediaan bahan bakar
bagi kelanjutan industri perusahaan
yang sudah *go public* tersebut. "Bayang-
kan, kalau harga solar sekarang sudah
mencapai Rp10.000 per liter? Mungkin
perusahaan sudah tutup jika tetap
menggunakan bahan bakar solar,"
tuturnya.

Kapasitas produksi listrik sebesar
22,5 megawatt itu, menurutnya, di-
harapkan dapat memenuhi seluruh

kebutuhan energi pabrik Medium Den-
sity Fiberboard (MDF) milik Sumalindo
yang sebelumnya menggunakan tena-
ga genset dengan bahan bakar solar.

Sebelumnya, Ketua Badan Revitali-
sasi Industri Kehutanan (BRIK) Soe-
warni mengakui harga bahan baku un-
tuk industri kayu lapis (*plywood*) dan
moulding (*woodworking*) naik menca-
pai 10%. Kenaikan itu terjadi sejak har-
ga minyak mentah dunia naik dari US\$
60 per barel ke US\$90 per barel.

(erwin.tambunan@bisnis.co.id)

Kinerja ekspor industri kayu lapis



Posisi Indonesia di pasar

	2003	2004	2005
● AS	1	3	3
● Inggris	1	3	3
● Jepang	1	1	2

3
2
1
Segmen produk
yang masih dikuasai RI:
Kayu lapis tipis &
produk spesifik

Sumber: Dephut

BISNIS/ADI PURDIYANTO

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
--	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
--	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : L											TAHUN 2008																			

Kenaikan Harga BBM Setelah 23 Mei

Presiden masih harus menunggu laporan kesiapan BLT.

JAKARTA — Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baru akan dilaksanakan setelah program bantuan langsung tunai (BLT) sudah siap. Dalam sepekan ke depan, program awal BLT akan dievaluasi.

"Kenaikan BBM dilakukan setelah Presiden merasa puas dengan laporan persiapan BLT," kata Menko Kesra, Aburizal Bakrie, usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (14/5) malam.

Sementara, sidang kabinet membahas laporan kesiapan program awal BLT, kata Aburizal, akan dilakukan Jumat (23/5) pekan depan. Kemarin, pemerintah mengeluarkan In-

struksi Presiden (Inpres) No 3/-2008 tentang pelaksanaan BLT.

Terkait program kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu, sembilan menteri serta seluruh gubernur dan bupati/wali kota diinstruksikan mendukung kelancaran program BLT. Dana sebesar Rp 14,1 triliun pun disiapkan, dengan masing-masing kepala keluarga bakal memperoleh Rp 100 ribu per bulan selama tujuh bulan hingga 31 Desember 2008.

"Untuk 2009, akan dibicarakan lagi dengan DPR," katanya. Sasaran BLT adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan setengah miskin yang diperkirakan berjumlah 19,1 juta kepala keluarga.

Pada 2008, BLT akan didistribusikan melalui program beras untuk rakyat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), dan lainnya.

Pemerintah berharap, uang dari BLT itu digunakan untuk pembelian beras, minyak tanah, bayar utang, biaya pendidikan, dan BBM. BLT sendiri, lanjut Aburizal, merupakan tambahan untuk melengkapi program pengentasan kemiskinan yang terdiri dari tiga kluster: pengaman sosial, pemberdayaan sosial, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Mensos, Bachtiar Chamsyah, menambahkan, kartu BLT akan dibagikan kepada 10 provinsi. "Rabu (14/5) malam kartu BLT dikirim, dan paling tidak pada Kamis (15/5) sudah dibagikan."

Ditanggapi

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang meluas ke berbagai daerah diduga ada yang menanggapi. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sjamsir Siregar, mensinyalir mereka adalah mantan menteri dan pejabat.

72

"Itu sudah jelas (ada yang menunggangi). Ada yang bekas menteri, ada yang pejabat," kata Sjamsir di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (14/5).

Namun, Sjamsir tak menyebut nama mereka yang diduga mengendalikan aksi demo menentang penolakan harga BBM. Demo itu, menurutnya, berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Dia menyarankan agar pemerintah memberi penjelasan alasan kenaikan harga BBM itu. Sebab, kebijakan itu ada yang mendukung dan menolak, bahkan di kalangan politisi di Senayan. "Banyak yang tidak mengerti. Mereka harus diberi penjelasan, termasuk mahasiswa."

Mengenai indikasi aksi demo BBM ditunggangi, Kapolri, Jend

Sutanto, meminta semua pihak berkepala dingin. "Siapa pun itu, tentu, mari kita kelola situasi supaya aman, tertib, dan damai. Tolong beri pemahaman kepada seluruh masyarakat."

Sinyalemen Kepala BIN, kata anggota Komisi I DPR, Yuddy Chrisnandi, justru memancing polemik kenaikan harga BBM memanas. "BIN jangan menuduh. Demo justru terjadi karena pemerintah arogan menaikkan harga BBM tanpa melihat aspirasi rakyat," katanya.

Kolega Yuddy di Komisi I dari Fraksi PKB, Effendy Choirie, membenarkan aksi unjuk rasa ditunggangi. "Memang ada yang menunggangi, yaitu hati nurani dan kepentingan rakyat."

■ wed/dia/evy/lis/rig/asd/-
aas/c65/zak/wab/c63/mur/aji



TUNTUTAN NELAYAN: Para nelayan menggelar unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Rabu (14/5). Mereka membawa poster yang memesetkan BLT sebagai bantuan langsung tewas.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

HARGA BBM NAIK AKHIR MEI

Panic Buying BBM Meluas

Oleh **Novy Lumanauw** dan **Heriyono**

► **JAKARTA** – Menjelang pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), *panic buying* melanda sejumlah SPBU di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah berkukuh menaikkan harga BBM pada akhir Mei 2008.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, permintaan BBM bersubsidi di jenis premium, solar, dan minyak tanah di berbagai daerah melonjak tajam antara 12%-18%. "Terjadi *rush buying*. Kami minta masyarakat tenang," katanya di Jakarta, Rabu (14/5).

Untuk meredam kepanikan tersebut, PT Pertamina diminta memperkuat pasokan BBM bersubsidi di sejumlah daerah. "Kami minta Pertamina meningkatkan pasokan BBM agar tidak

terjadi kelangkaan, setidaknya aman dalam 22 hari ke depan," jelas Purnomo.

Purnomo mengaku kesulitan mengatasi aksi *panic buying* tersebut sebab masyarakat ingin mengumpulkan pasokan BBM sebanyak-banyaknya setelah mendengar pernyataan Presiden mengenai rencana kenaikan harga BBM, 6 Mei lalu. "Mereka mengumpulkan dan menimbun BBM karena mengetahui akan ada kenaikan harga, sehingga bisa dapat keuntungan dari situ," kata Purnomo.

Spekulasi bahwa harga BBM akan dinaikkan dalam

waktu dekat ini merebak ketika Presiden mengadakan rapat kabinet yang khusus membahas tentang subsidi BBM. Sejumlah kalangan mengatakan, harga BBM akan dinaikkan hari ini mengingat lonjakan konsumsi BBM makin sulit dikendalikan. Bahkan aksi penimbunan ditengarai terjadi di beberapa wilayah.

Kabar bahwa harga BBM akan naik secepatnya makin menguat ketika Departemen Komunikasi dan Informasi mengundang media massa untuk jumpa pers terkait rencana kenaikan harga BBM. "Besok (hari ini), jam 16.00 WIB Pak Menteri akan menjelaskan rencana kenaikan harga BBM," kata Staf Khusus Urusan Media Massa Menkominfo, Sukemi. Akan tetapi Sukemi tidak bersedia merinci lebih lanjut kapan tepatnya pemerintah merealisasikan kenaikan harga BBM tersebut.

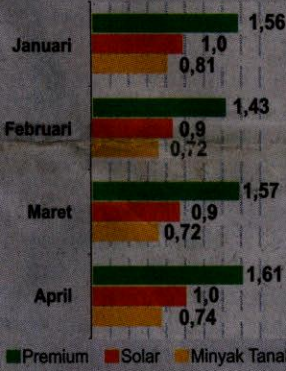
Sementara itu, rapat kabinet yang membahas tentang subsidi BBM berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 23.00 WIB. Lamanya pembahasan tentang BBM kembali menguatkan speku-

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak amat serius saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas kenaikan harga BBM dan skema penyaluran bantuan langsung tunai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/5). Terkait rencana kenaikan harga BBM, antrian kendaraan mulai terlihat di SPBU Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tadi malam.



Volume Penjualan BBM Bersubsidi 2008 (juta kiloliter)

Konsumsi BBM untuk April 2008 mencapai 3,36 juta kilo liter. Meningkat 113.986 kiloliter atau naik 3,4% dari konsumsi Maret yang mencapai 3.242 kiloliter



Sumber : DESDM

Skenario Rata-rata Kenaikan Harga BBM 53,7%* (Rp/Liter)

Jenis BBM	Harga Subsidi Sekarang	Asumsi harga Setelah kenaikan	Persentase Kenaikan	Harga Non subsidi** (per 15 Mei 2008)
Premium	4.500	6.000	33,3%	7.870
M. Tanah	2.000	4.000	100,0%	9.572
M. Solar	4.300	5.500	27,9%	9.370
Rata-rata			53,7%	

Ket: *) Asumsi BPH Migas
**) Harga dasar BBM non subsidi tanpa pajak untuk wilayah I
Sumber : Depkeu-Pertamina-BPH Migas

Skenario Rata-rata Kenaikan Harga BBM 28,7%* (Rp/Liter)

Jenis BBM	Harga Subsidi Sekarang	Asumsi harga Setelah kenaikan	Persentase Kenaikan	Harga Non subsidi** (per 15 Mei 2008)
Premium	4.500	6.000	33,3%	7.870
M. Tanah	2.000	2.500	25,0%	9.572
M. Solar	4.300	5.500	27,9%	9.370
Rata-rata			28,7%	

Ket: *) Asumsi Departemen Keuangan
**) Harga dasar BBM non subsidi tanpa pajak untuk wilayah I
Sumber : Depkeu-Pertamina

lasi bahwa harga BBM akan naik secepatnya, sehingga terjadi antrian di sejumlah SPBU di Jakarta. Meskipun kondisi sedikit *chaos*, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM

dalam waktu dekat ini.

Akhir Mei

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, rapat

kabinet membahas finalisasi rencana kenaikan harga BBM termasuk kesiapan program kompensasinya.

"Pada 23 Mei baru akan diserahkan ke Presiden, setelah itu baru diumumkan berapa besar kenaikannya," kata dia.

Usai rapat kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menaikkan BBM dalam kisaran 30% pada akhir bulan ini. Selain itu, program *smart card* untuk pembelian BBM dan kartu kendali untuk pembelian minyak tanah tetap diberlakukan. "Jadi, selain kenaikan harga BBM, pemerintah juga menerapkan program efisiensi energi sehingga skenario APBNP 2008 bisa dijalankan," ujarnya.

Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, keputusan terkait kenaikan harga BBM tergantung Presiden. "Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah siap, pencetakan kartu sudah siap. Jadi sekarang tergantung keputusan Presiden kapan mau dilaksanakan (kenaikan BBM). Kalau BLT sudah siap," ujarnya.

Sejumlah Skenario

Sumber *Investor Daily* mengatakan, lambatnya pengumuman kenaikan harga BBM memengaruhi besaran persentase kenaikan pada akhir Mei nanti. Ada sejumlah skenario kenaikan, yakni harga BBM akan dinaikkan rata-rata 28,7%, dan skenario kenaikan harga BBM rata-rata 53,7%.

Kedua skenario itu mengasumsikan harga premium naik menjadi Rp 6.000 dari Rp 4.500 per liter, solar naik menjadi Rp 5.500 dari Rp 4.300 per liter, sementara kenaikan harga minyak tanah ada dua versi.

Menurut sumber tersebut, Departemen Keuangan (Depkeu) menghendaki harga minyak tanah dinaikkan menjadi 25% menjadi Rp 2.500, sementara versi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harga minyak tanah naik 100% menjadi Rp 4.000 per liter.

Menurut BPH Migas, jika harga minyak tanah hanya dinaikkan 25%, potensi terjadinya penyelundupan sangat besar. Sebab, disparitas harga antara minyak tanah subsidi dengan nonsubsidi sangat besar. Harga minyak tanah untuk industri (nonsubsidi) per 15 Mei sebesar Rp 9.572 per liter.

Hanya saja, jika harga minyak tanah dinaikkan 100%, rata-rata kenaikan harga BBM nantinya menjadi sekitar 53,7%. Ini melebihi komitmen pemerintah yang berjanji akan menaikkan harga BBM maksimal 30%. Sedangkan jika kenaikan harga minyak tanah sesuai usulan Depkeu maka rata-rata kenaikan harga BBM sekitar 28,7%. (Lihat tabel)

Kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu.

Kenaikan BBM bersubsidi pertama kali pada Maret 2005. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM bersubsidi rata-rata sebesar 29%. Semula, BBM jenis premium dijual seharga Rp 1.810 per liter kemudian naik 32% menjadi Rp 2.400 per liter. Solar naik 27% dari Rp 1.650 per liter menjadi Rp 2.100 per liter. Sedangkan minyak tanah tetap Rp 700 per liter.

Kenaikan kedua terjadi pada Oktober 2005. Minyak tanah naik drastis 185,71% dari Rp 700 per liter menjadi Rp 2.000 per liter. BBM jenis premium naik 87,5% dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 4.500 per liter, sedangkan solar naik 104,76% dari Rp 2.100 per liter menjadi Rp 4.300 per liter.

Anggota Komite Badan BPH Migas Hanggono Tjahjo Nugroho menilai, skenario kenaikan harga BBM rata-rata 53,7% menggunakan asumsi harga minyak dunia pada kisaran US\$ 120 per barel. Sedangkan kenaikan harga BBM rata-rata 30% menggunakan asumsi harga minyak US\$ 110 per barel. "Khusus minyak tanah, harga yang cukup realistis memang Rp 4.000 per liter. Karena kalau di bawah itu, akan rawan penyelundupan," kata Hanggono kepada *Investor Daily*, kemarin.

Ia mencontohkan, saat ini saja harga minyak tanah untuk industri berkisar Rp 9.000 per liter. Bahkan, imbuh dia, di pasaran internasional harga minyak tanah hampir menyamai harga BBM jenis avtur. "Di pasar internasional, minyak tanah diperjualbelikan dengan nama *dual purpose kerosene*," jelasnya.

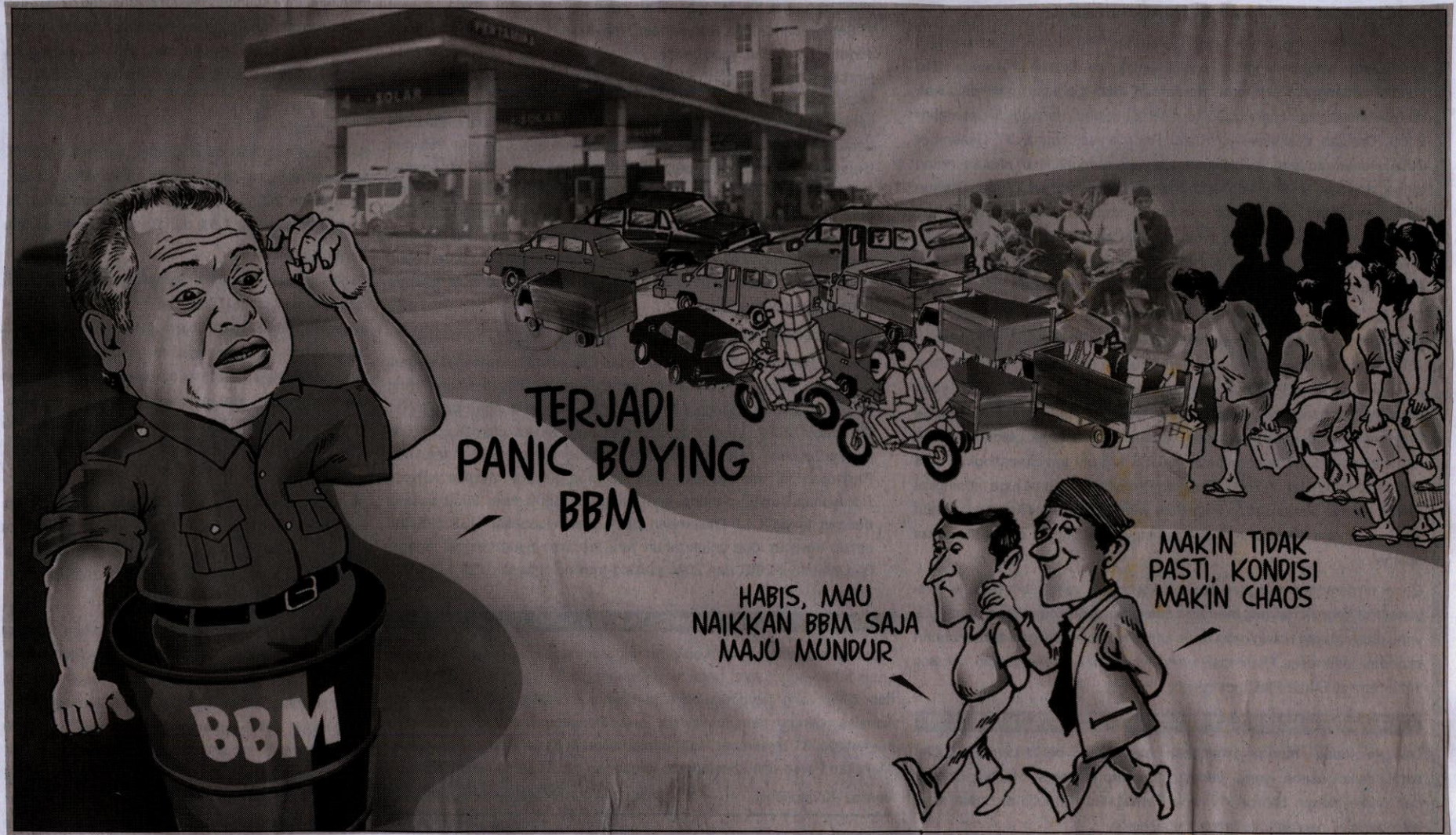
Harus Cepat Diumumkan

Sementara itu, *Vice President Communication* PT Pertamina Wisnuntoro menambahkan, jadi atau tidaknya kenaikan BBM harus secepatnya diumumkan oleh pemerintah. Pasalnya, semakin cepat diputuskan, maka keputusan tersebut akan lebih bagus bagi semua pihak.

"Saat ini saja Pertamina kewalahan mengalami lonjakan permintaan BBM bersubsidi di masyarakat. Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota besar di Tanah Air, terjadi peningkatan penjualan BBM bersubsidi," kata Wisnuntoro.

Dia mengungkapkan, penjualan premium dan solar di sejumlah kota besar meningkat. Di Medan, naik 7% untuk premium dan solar, Palembang 6%, Semarang 10%, Surabaya 18%, Balikpapan 10%, dan Makassar 5%. Sementara di Jakarta, premium mengalami peningkatan penjualan hingga 15% dan untuk solar 5%.

"Sedangkan rata-rata nasional penjualan normal per hari untuk premium 50.000 kiloliter dan solar 37.000 kiloliter. Peningkatan penjualan terjadi sejak awal bulan ini," jelas dia. (idi)



TERJADI
PANIC BUYING
BBM

HABIS, MAU
NAIKKAN BBM SAJA
MAJU MUNDUR

MAKIN TIDAK
PASTI, KONDISI
MAKIN CHAOS

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

TAJUK

Setelah Harga BBM Naik

Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan, akankah pemerintahan SBY-JK menaikkan lagi dalam waktu dekat? Mungkin saja. Masyarakat harus bersiap-siap menghadapi kenaikan harga BBM yang mungkin terpaksa dilakukan pemerintah seiring dengan lonjakan harga minyak mentah.

Ketika menaikkan harga BBM, 1 Oktober 2005 sebesar 126%, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan lagi harga BBM. Janji yang sama juga diucapkan lagi pada paruh kedua tahun lalu kala harga minyak mentah mulai melejit ke level US\$ 90 per barel.

Belakangan, ketika harga minyak mentah melesat di atas level US\$ 110 per per barel, pemerintah terpaksa menjilat liurnya sendiri dan kita pun mafhum. Sore ini, Kamis (15/5), pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM setelah dua pekan masyarakat dibiarkan galau akibat meroketnya harga barang kebutuhan pokok. Itu terjadi karena pemerintah mengumumkan terbuka bakal ada kenaikan harga BBM maksimal 30% dalam waktu dekat. Waktu yang ada dimanfaatkan para spekulan untuk menimbun BBM.

Seperti yang sudah terjadi sebe-

lumnya, pemerintah pun berjanji untuk tidak menaikkan lagi harga BBM hingga 2009. Ke depan, kemungkinan besar rakyat makin paham bahwa harga BBM tidak bisa tidak harus dinaikkan jika harga minyak mentah terus meroket. Tanpa pengurangan subsidi, APBN jebol. Janji pemerintah sekadar ungkapan kecintaan terhadap rakyat.

Meski berulang kali dikatakan kenaikan harga BBM maksimal 30%, sumber harian ini mengatakan, harga baru BBM kemungkinan melesat hingga 53,7%. Kenaikan harga minyak tanah malah bisa mencapai 100% karena saat ini harga minyak tanah bersubsidi Rp 2.000, sedangkan harga produksinya sudah mencapai Rp 9.575 per liter. Dengan kenaikan 100% pun, pemerintah masih menyubsidi minyak tanah Rp 5.575 per liter.

Harga baru premium dan solar bersubsidi kemungkinan sebesar Rp 6.000 dan Rp 5.500 per liter, meningkat dari Rp 4.500 per liter dan Rp 4.300 per liter atau 33,3% dan 27,9%. Masih ada subsidi sebesar Rp 1.870 untuk premium dan Rp 3.780 per liter untuk solar karena harga produksi premium sebesar Rp 7.870 dan solar Rp 9.370 per liter.

Tingkat harga BBM ini diperki-

74

rakan dengan asumsi harga minyak mentah US\$ 110 per barel. Jika harga minyak mentah rata-rata US\$ 115 per barel, harga BBM akan lebih besar lagi, begitu pula subsidi.

Hari ini, harga minyak mentah di pasar dunia sudah di atas US\$ 125 per barel. Sangat boleh jadi, harga minyak mentah terus melesat hingga menembus US\$ 150 atau bahkan US\$ 200 per barel pada pengujung tahun ini. Bila itu terjadi, tingkat harga baru BBM yang akan diumumkan tidak lagi memadai. Subsidi BBM akan sangat besar.

Inilah kepusingan pemerintah, rezim siapa pun. Jika tidak ada upaya lain, subsidi BBM yang akan terus membesar mengikuti harga minyak mentah, akan melumpuhkan APBN sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dana untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan akan terpangkas oleh biaya subsidi BBM.

Ke depan, harga BBM perlu diserahkan ke mekanisme pasar. Tidak perlu ada lagi subsidi harga BBM. Selain memicu penyelundupan akibat disparitas harga, subsidi BBM lewat subsidi harga takkan mencapai sasaran. Selama ini, lebih dari 80% subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Agar pemerintah tidak lagi dipusingkan oleh subsidi harga BBM, sejumlah langkah berikut perlu diterapkan secara konsisten mulai saat ini. Pertama, subsidi ditujukan langsung kepada rakyat miskin lewat proyek padat karya, kredit murah, pendidikan, dan kesehatan murah. Tidak boleh ada pembagian uang tunai. Bantuan berupa uang tunai cukup ditujukan kepada orang miskin yang sakit dan sudah renta.

Kedua, pemerintah harus lebih serius meningkatkan jumlah produksi minyak mentah agar lonjakan harga minyak mentah dunia memberikan *windfall profit* kepada Indonesia. Iklim investasi dipermudah. Pemerintah perlu memastikan bahwa asing yang menjadi *market leader* minyak dan gas Indonesia tidak sengaja mempertahankan stok dan baru akan meningkatkan produksi pada saat harga minyak mentah berada pada level yang lebih menguntungkan.

Ketiga, gerakan diversifikasi energi, khususnya pembangkit listrik, tidak boleh kendor. Saat ini, lebih dari 24% pembangkit listrik PLN menggunakan BBM. Keempat, hemat energi wajib menjadi program nasional dan pemerintah, pusat hingga daerah. Inefisiensi di Pertamina dan PLN harus dikikis habis. □

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

KONSUMEN TIDAK DIBEDAKAN

'Revisi Perpres BBM'

Oleh Heriyono

▶ JAKARTA – Pemerintah diminta merevisi peraturan presiden (Perpres) No 9 Tahun 2006 mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebelum membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui penerbitan kartu pintar (*smart card*).

"Perpres tersebut tidak mengatur pembatasan BBM bersubsidi, semua berhak mendapatkannya," kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Hanggono Tjahjo Nugroho kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (14/5).

Perpres No 9/2006 tentang Perubahan Atas Perpres No55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri tidak membedakan keluarga miskin atau bukan. Pasal 2 ayat (2) perpres tersebut menyatakan, harga jual eceran bensin premium dan minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum di titik serah termasuk PPN untuk setiap liter ditetapkan sebesar Rp 4.500 per liter untuk bensin premium dan Rp 4.300 per liter untuk minyak solar.

Perpres tersebut juga menyebutkan konsumen yang berhak menggunakan bensin

premium dan minyak solar terdiri atas segala bentuk sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Selain itu, kapal berbendera nasional dengan trayek dalam

card," ujar Hanggono.

Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi menambahkan, jika ada sebuah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan aturan sebelumnya, aturan tersebut harus direvisi bahkan dicabut. "Saya pikir pemerintah telah memikirkan hal tersebut," ujar dia, semalam.

Sebelumnya, anggota komite BPH Migas lainnya, Adi Subagyo Subono mengatakan, BPH Migas baru akan mengujicoba sistem dalam penerapan kartu pintar (*smart card*) untuk menguji keandalan sistem yang dipakai. Uji coba sistem misalnya terkait berapa lama pemasangan alat pemindai (*barcode scanner*) dan apakah bisa terkoneksi dengan *control room* yang ada di BPH Migas.

Alokasi BBM Bersubsidi

2007	Rp 89,2 Triliun	16,6 Juta Kiloliter	9,6 Juta Kiloliter	9,9 Juta Kiloliter
2008	Rp 126,8 Triliun	16,98 Juta Kiloliter	7,56 Juta Kiloliter	11 Juta Kiloliter

Sumber: DESDM

negeri, kendaraan bermotor milik instansi pemerintah atau swasta, kapal milik pemerintah, atau kendaraan bermotor milik pribadi.

"Itu berarti semua jenis kendaraan yang masuk ke dalam perpres tersebut berhak atas BBM bersubsidi. Masalahnya, jika harus menggunakan *smart card*, seharusnya mobil pribadinya pun kena *smart*

Adi mengatakan, uji coba yang dilakukan belum menyentuh mengenai pembatasan kuota BBM bersubsidi. Rencananya, uji coba tersebut akan dilakukan sebatas lingkup BPH Migas.

Tidak Tepat Sasaran

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi me-

75

ngatakan, pemerintah cenderung panik menyikapi kenaikan harga minyak mentah. Akibatnya, program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui sistem kartu pintar digulirkan, padahal sistem itu membutuhkan fasilitas atau infrastruktur dengan biaya yang tidak kecil.

"Kalau ingin tidak ribet, pemerintah harusnya memang cukup merevisi Perpres tersebut, tapi karena panik, pemerintah pun tidak berpikir panjang," kata dia ketika dihubungi *Investor Daily*, di Jakarta, tadi malam.

Menurut Tulus, Perpres No 9/2006 mengandung banyak kesalahan. Sebab, rincian peruntukan BBM bersubsidi dibuat tidak jelas. Hal inilah, kata Tulus, yang menyebabkan subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan, banyak kendaraan mewah yang menggunakan premium bersubsidi, padahal seharusnya kendaraan semacam itu menggunakan premium yang beroktan lebih tinggi, seperti Pertamina.

Tulus juga mengatakan, apabila sistem *smart card* tetap diterapkan berarti pemerintah tidak memberikan pilihan kepada masyarakat. Semula sistem *smart card* akan diterapkan ketika harga BBM tidak dinaikkan. Namun belakangan kenaikan harga BBM juga akan dibarengi dengan penerapan *smart card*. "Kalau diterapkan keduanya berarti pemerintah akan menyengsarakan rakyatnya," ujar dia.

75

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

ANTIKENAIKAN BBM

BIN: Aksi Demo Ditunggangi Mantan Menteri

JAKARTA (Suara Karya): Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi di berbagai daerah. Namun, di tengah aksi yang diwarnai bentokkan mahasiswa dengan polisi itu, muncul tudingan dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebutkan aksi itu ditunggangi pihak lain.

Tudingan dari BIN itu diutarakan Kepala BIN Syamsir Siregar ketika ditemui wartawan sebelum rapat kabinet paripurna membahas persiapan rencana kenaikan harga BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu. Namun, ia enggan menyebut nama atau pihak yang diduga menunggangi aksi-aksi tersebut. "Itu sudah jelas. Kalian sudah tahu itu, tidak usah tanya-lah," ujarnya kepada wartawan.

Namun, sambil berlalu dari

wartawan dan diiringi tawa, Kepala BIN menyebutkan bahwa yang menunggangi aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM itu bisa jadi mantan menteri dan pejabat.

Tudingan Kepala BIN ini dibenarkan Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Sutan Bhatoegana. Menurut dia, Syamsir Siregar tidak mungkin berbicara kalau tidak ada data dan fakta.

Sutan Bhatoegana mengatakan, yang menunggangi demo BBM tersebut adalah orang yang sering menghantam pemerintah. "Mantan orang penting. Dia tokoh. Mahasiswa yang kemarin demo juga ada yang tidak segan mengatakan mereka ada yang mendukung," katanya.

Namun, pernyataan Kepala BIN itu ditanggapi berbeda oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra. Menurut dia, pernyataan itu bisa mem-

"Mantan orang penting. Dia tokoh. Mahasiswa yang kemarin demo juga ada yang tidak segan mengatakan mereka ada yang mendukung."

Sutan Bhatoegana
Sekretaris Fraksi Demokrat DPR

buat suasana menjadi runyam. "Yang diperlukan bagaimana pemerintah menenangkan rakyat. Ditenangkan saja, belum tentu tenang kok. Bukannya malah membuat pernyataan yang meresahkan. Jangan sampai dikatakan aksi ini ditunggangi. Di antara pejabat jangan saling tuding, karena bisa menambah makin ru-

nyaminya suasana," katanya.

Kalangan mahasiswa, seperti diutarakan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur membantah aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa secara serentak di sejumlah daerah telah ditanggapi mantan pejabat atau menteri.

"Nggak benar itu (tuduhan ditanggapi), karena aksi yang kami lakukan sifatnya murni atas nama mahasiswa," kata Humas BEM SI Jatim, Nuril, di Surabaya, Rabu.

Karena itu, katanya, BIN sebaiknya menyebutkan saja siapa pejabat yang ada di balik aksi mahasiswa itu agar semuanya menjadi gamblang, karena BEM SI sudah melakukan serangkaian pertemuan untuk menyikapi rencana kenaikan harga BBM.

Sementara itu, gelombang

demonstrasi menuntut pembatalan kenaikan harga BBM masih terjadi. Dalam aksinya, mahasiswa Universitas 45 Makassar bentrok dengan polisi. Keduanya terlibat saling lempar batu dan benda keras lainnya, saat demo di depan kampusnya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel.

Di Riau, ratusan mahasiswa turun ke jalan. Mereka mengancam, bila pemerintah tetap menaikkan harga, mahasiswa akan memblokir produksi minyak.

Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Riau Bersatu (GMRB), yang merupakan gabungan berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru, berkumpul di Makam Pahlawan Kusuma Dharma, Jl Sudirman.

Di Solo, aksi gabungan sejumlah elemen mendatangi kompleks Balaikota Solo dan berhasil mengajak Wakil Walikota Surakarta, Hadi Rudyatmo, bergabung dalam aksi. Dalam orasinya, Rudy dengan tegas mengatakan berdiri bersama sebagian besar masyarakat Solo yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Rudy juga mengatakan siap menerima konsekuensi apa pun atas sikap dan keputusannya itu. (Endang K/Ant/Joko Setyono)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN			FEB			MAR			APR			MEI		JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

HALAMAN : **L**

TAHUN 2008

KOMPENSASI BBM

BLT Diharapkan Dorong Produktivitas Masyarakat

JAKARTA (Suara Karya): Bantuan langsung tunai (BLT), kompensasi bagi warga miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, diharapkan mendorong masyarakat menjadi produktif, tidak sebaliknya membuat menjadi malas.

Demikian rangkuman pendapat dari ekonom Indef Aviliani dan pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih dalam percakapan dengan *Suara Karya* di Jakarta, Rabu (14/5) kemarin. Keduanya mengingatkan, BLT jangan sampai mendorong warga miskin menjadi pemalas dan bermental pengemis. Pemerintah seharusnya menyalurkan dana kompensasi BBM untuk program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja.

Aviliani tidak setuju dengan program BLT sebagai ganti dari subsidi BBM yang akan segera dicabut. Bagi Avi, yang juga komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu, BLT seharusnya membuat masyarakat bergairah berperilaku produktif.

"Apa bedanya dengan pengemis, jika hanya mengharapkan pemberian tanpa bekerja. Martabat bangsa juga makin tergerus," ujar mantan Ketua Perbanas ini.

Aviliani juga mengaku memahaminya dengan kenyataan bahwa banyak kepala daerah menolak BLT disalurkan di wilayahnya.

Pemerintah seharusnya menyalurkan dana kompensasi BBM untuk program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja.

Sebab, fakta membuktikan bahwa selama 2005 program BLT banyak memakan korban di daerah, dan para kepala daerahlah yang pada akhirnya harus menanggung akibatnya.

Aviliani mendukung jika dana subsidi BBM digunakan untuk membuat program padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. "Para kepala daerah itulah yang harus dilibatkan dalam program padat karya itu," katanya.

Namun, Aviliani mengakui, pemerintah tidak akan serta-merta siap dengan program padat karya. Sehingga, dalam jangka pendek, pemerintah pada akhirnya harus memilih BLT untuk mengatasi dampak awal kenaikan harga BBM.

Meskipun harus diberikan, Aviliani berpendapat, batas waktu pemberian BLT jangan setahun. Itu dinilainya terlalu lama dan akan membuat mereka yang menerimanya menjadi malas. "Paling lama enam bulan, setelah itu program padat karya harus sudah siap," katanya.

Terkait besaran BLT sebesar Rp 100 ribu rupiah, dia mengatakan, jika dilihat dari data survei, jumlah itu jauh dari cukup. Bahkan, nyaris tidak berarti.

77

"**J**ika dihitung dengan inflasi, itu sungguh tak cukup. Berdasarkan penelitian, minimal sekitar Rp 168 ribu, untuk menaikannya dengan tingkat inflasi," katanya.

Sri Adiningsih menilai, jika BLT diberikan kepada orang yang tidak bisa mencari uang, bisa dipahami. Tetapi diberikan kepada orang yang segar bugar, itu tidak mendidik. "BLT tak mendidik, tak ada bekasnya, seperti memberikan, bukan kail. Bisa-bisa hanya untuk kebutuhan konsumtif," katanya.

Sebaiknya, menurut dia, dana BLT dialokasikan untuk membangun infrastruktur pedesaan, pertanian dan lain-lain yang memberi efek ganda pada masyarakat. "Jika hanya *cash transfer* untuk usia produktif, membuat mereka senang menjadi miskin, mental rusak," katanya.

Terkait besarnya, dia mengatakan, jumlah Rp 100.000 tak banyak manfaatnya. Di Indonesia, dia menggambarkan, satu keluarga bisa berjumlah tiga sampai empat orang. Jumlah itu pasti tak akan cukup untuk menutup kebutuhan dasar, bahkan untuk satu minggu sekali pun.

Jamin

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin, akan tersedia dana untuk BLT menyusul rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. "Insya Allah ada, akan kita usahakan seluruh landasan hukumnya dapat diselesaikan secepatnya," kata Menkeu usai rapat pimpinan Depkeu di Jakarta, Rabu.

Namun, Menkeu tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut hasil rapat pimpinan Depkeu, termasuk rencana kenaikan harga BBM karena harus dilaporkan dulu ke sidang kabinet.

"Saya harus melaporkan semua ke sidang kabinet dulu, kan tidak etis kalau saya sampaikan sekarang. Paling tidak besok (Kamis)," katanya.

Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, penyiapan anggaran untuk BLT akan satu paket dengan kebijakan harga BBM. "Itu satu paket. Dalam pasal 14 UU tentang APBNP 2008, disebutkan opsi mengenai pengendalian konsumsi. Itu terkait kebijakan fiskal lainnya. Jadi itu satu paket," katanya.

Menurut Anggito, APBNP 2008 menyebutkan bahwa dalam hal alokasi subsidi sudah mencapai maksimal dan proyeksi harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, pemerintah dapat melakukan tiga hal.

Tiga hal itu adalah pembatasan konsumsi, kebijakan harga BBM, dan kebijakan fiskal lainnya. "Jadi, karena BLT terkait dengan kebijakan harga BBM, itu bisa tertampung menggunakan pasal 14," katanya. Sebelumnya disebutkan, alokasi dana untuk penyaluran BLT sekitar Rp 11 triliun hingga Rp 14 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo mengatakan, pihaknya belum menyelesaikan proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan program BLT 2008. "Masih kita proses. Kalau sudah selesai di Ditjen Anggaran, saya tinggal menandatangani (*pencairannya-Red*)," katanya.

Di tempat terpisah, Deputi Kemenneg PPN/Bappenas Bambang Widianto mengatakan, dari anggaran sekitar Rp 14,176 triliun untuk pelaksanaan BLT 2008, akan disalurkan kepada rumah tangga miskin (RTM) sebesar Rp 13,37 triliun. "Sisanya untuk biaya pelaksanaan penyaluran BLT," katanya. (Nunun/Andrian)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : //

TAHUN 2008

SPBU Masih Layani Pembelian dengan Jerigen

Palu - Meskipun PT Pertamina sudah menginstruksikan agar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sementara ini tidak melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen, di beberapa daerah tetap saja pembeli yang membawa jerigen dilayani oleh SPBU.

Di Palu, Sulawesi Tengah, jajaran Polresta Palu dalam kurun sepekan terakhir menemukan tujuh SPBU bermasalah. Kapolresta Palu AKBP Sunarto, Rabu (14/5), membenarkan bahwa selama operasi dilakukan terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 20-30 persen, petugas menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU.

Pelanggaran dimaksud antara lain adanya pengisian BBM menggunakan jerigen, khususnya pada malam hari. Selain itu, ada petugas SPBU yang melayani pengisian BBM tidak menggunakan pakaian seragam.

Namun, pihaknya belum menemukan adanya upaya penimbunan BBM yang

dilakukan SPBU. "Kecuali pengisian BBM menggunakan jerigen," katanya seraya menambahkan, padahal pihak Depot Pertamina sudah menginstruksikan agar SPBU untuk sementara ini tidak diperbolehkan melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen.

Pihaknya hanya sebatas melakukan pengawasan dan seluruh hasil temuan dilaporkan kepada Depot Pertamina yang kemudian akan menindaklanjutinya. Di sejumlah SPBU di Kota Palu, dalam sepekan terakhir ini terjadi antrean kendaraan, bahkan beberapa kali SPBU kehabisan stok karena meningkatnya konsumsi BBM.

Anggota Reserse dan Kriminal Polwil Surakarta dan

Polres Karanganyar, Jawa Tengah, juga telah membongkar upaya penimbunan BBM bersubsidi untuk keperluan industri di kilang milik PT Kusuma Putra (KMR) di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Karanganyar. "Kami telah memeriksa Direktur Operasional Handoko dan tiga orang lainnya. Kami sedang memburu dua orang, yaitu Sony dan Bagong yang diduga sebagai pemasok," kata Kapolwil Surakarta Komisaris Besar Taufik Ansorie, Selasa (13/5).

Kilang penyimpanan BBM saat ini diberi pita polisi. Polisi akan bekerja sama dengan Pertamina Solo untuk menyedot kembali BBM tersebut.

Penggerebekan penimbunan minyak itu terjadi pada Senin (12/5) lalu di perusahaan pengolah minyak goreng tersebut. Polisi menemukan 35 ton minyak solar bersubsidi, 30 ton minyak tanah bersubsidi, 40 ton minyak sabun hasil residu. Sementara di Boyolali, Polwil Surakarta membongkar penimbunan BBM bersubsidi di Desa Karanggeneng, Boyolali. Sebanyak 775 liter BBM disita, dan tersangka

Sutomo dimintai keterangan. Sutomo mengaku mengoplos solar dengan minyak tanah untuk bahan irex, dan dijual kepada pemilik truk.

Di Padang, Sumatera Barat, Pertamina juga telah mengeluarkan surat pelarangan membeli BBM dengan jerigen, dan pembelian hanya diberlakukan di SPBU yang telah ditunjuk untuk pasokan para nelayan di dua SPBN dan empat SPBU di Padang.

Polres Pesisir Selatan telah menyita 340 liter premium yang dibeli dengan memakai jerigen. Permintaan BBM di Sumatera Barat memang meningkat akhir-akhir ini, kalau dahulu setiap hari 1.300 ton, tapi sekarang 1.600 ton.

Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dilaporkan bahwa premium di Kota Kendari kini mulai langka lagi. Dalam tiga hari terakhir, kendaraan bermotor mulai antre di setiap SPBU sejak pagi hari, tetapi baru memperoleh premium pada sore atau malam hari. Itu pun jumlah pembelian dibatasi, untuk kendaraan roda dua maksimal Rp 15.000 dan

roda empat Rp 70.000.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terhitung 1 Juni mendatang memutuskan mengurangi jatah BBM bagi pejabat Eselon I dan II, kata Kartius, Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar kepada SH, Rabu (14/5). Mekanismenya, anggaran satuan biaya BBM per bulan setiap pejabat tidak dikurangi, namun juga tidak akan ditambah bersamaan dengan kenaikan harga BBM.

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Kota Malang, Jawa Timur, juga terus menguat. Ratusan mahasiswa dari tiga elemen menggelar demo di tiga tempat berbeda secara serentak, Selasa (13/5). Ratusan massa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) menduduki gedung DPRD Kota Malang, setelah berjalan kaki dari stadion luar Gajayana di Jl Semeru. Setiba di gedung dewan, mereka menggelar salat jenazah dan membakar keranda mayat.

(su herdjoko/purwandi/
agus sana'a/aju/eka
susanti)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Presiden Didesak Tindak Oknum di PT Pertamina

Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menindak tegas oknum di PT Pertamina (Persero), yang terlibat dalam aksi-penyelundupan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM). Tindakan tegas yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, dinilai merupakan bentuk komitmen pemerintah yang berpihak pada rakyat, meskipun harus menempuh kebijakan tidak populer, menaikkan harga BBM.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Jackson Kumaat, Selasa (13/5), menanggapi rencana pemerintah yang dalam waktu dekat akan menaikkan harga BBM. Jackson mengatakan hal itu kepada wartawan se usai memimpin rapat internal di kantor DPN Pakar Pangan kawasan Warung Buncit Jakarta. "Kami dukung apa pun kebijakan pemerintah yang pro rakyat, asalkan didukung tindakan tegas di bidang hukum," ujar Jackson.

Pihaknya dapat memahami kebijakan pemerintah yang "terpaksa" menaikkan harga BBM, menyusul naiknya harga minyak mentah dunia, yang berimbas ke harga BBM di Tanah Air. Ia mengharapkan, labilnya harga minyak mentah dunia dan terjadinya krisis global akhir-akhir ini, tidak dicampurkan dengan analisis-analisis politik kepentingan jangka pendek menjelang suksesi 2009.

Menurut dia, sepanjang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, hal itu diyakini akan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Salah satu bentuk keberpihakan Presiden, yakni segera menghukum oknum-oknum di PT Pertamina, yang terlibat aksi penyelundupan dan penimbunan BBM," ujarnya. (eddy lahengko)

79

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 18

TAHUN 2008

Smart Card Efektif Tahun 2009

Jakarta-Program penggunaan kartu kendali atau Smart Card untuk membatasi konsumsi BBM baru efektif pada tahun 2009. Saat ini, pemerintah baru melakukan pendataan dan uji coba.

"Jadi, sekarang dilakukan sosialisasi dan pendataan terlebih dahulu. Ini baru efektif tahun 2009. Artinya, tahun 2009 kartu kendali baru bisa dipakai untuk mengurangi konsumsi dan subsidi secara bertahap," ujar Kepala Badan Kajian Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, Selasa (13/5). Menurutnya, efektivitas program tersebut dapat dirasakan lebih cepat, tergantung pada proses pendataan tersebut.

Anggito mengatakan dengan Smart Card, kesalahan subsidi dapat dikurangi. "Artinya, orang boleh mengonsumsi. Tapi kalau di atas rata-ratanya, dia beli di harga keekonomian," terangnya. Namun, jika konsumsi BBM pada angka rata-rata, masyarakat tetap membayar pada harga subsidi.

Ia mengatakan pola subsidi yang ada saat ini tidak tepat

dan justru dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan untuk membeli BBM pada harga keekonomiannya. "Sekarang ini, 75 persen dari subsidi dinikmati oleh 40 persen orang terkaya," ujarnya.

Subsidi BBM melebihi program penanggulangan kemiskinan. Dalam APBN 2008, subsidi BBM sebesar Rp 75 triliun sedangkan anggaran penanggulangan kemiskinan Rp 57 triliun. Lantas dalam APBN-P 2008, subsidi energi melonjak jadi Rp 126,8 triliun dan program penanggulangan kemiskinan hanya Rp 58 triliun. "Ini *njomplang* (tidak seimbang)," tambahnya.

Saat ditanya mengenai realisasi subsidi, Anggito mengatakan angkanya belum mencapai batas atas subsidi Rp 135 triliun. "APBN-P *Kan* menetapkan subsidi Rp 126,8 triliun, ditambah (bantalan) Rp 8,74 triliun. Jadi totalnya Rp 135 triliun. Itulah dasar kita untuk mengeluarkan subsidi. Tapi kita belum sampai ke angka itu," ujarnya. Namun, Anggito tidak memberikan data realisasi subsidi. (esther fin harini)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

BAHAN BAKAR

Pengecer Masih Kesulitan Dapat Pasokan Elpiji

SEMARANG (Suara Karya): Tersendatnya pasokan gas elpiji sebagai dampak perbaikan instalasi Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat, mengakibatkan para pengecer terus kesulitan memperoleh elpiji. Di Semarang, kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Antrean panjang pengecer untuk mendapatkan elpiji, baik ukuran 3 maupun 12 kilogram, terus berlangsung hingga Rabu (14/5).

Di ibu kota Provinsi Jateng ini permintaan gas elpiji meningkat seiring berhasilnya program konversi dari minyak tanah ke gas. Di agen CV Trical Langgeng Jaya, Jalan Barito, Semarang, misalnya, antrean panjang pengecer elpiji terlihat sejak pagi hingga sore hari. Tohirin (47), pengecer warga Jalan Badak, Semarang, mengatakan, keterlambatan sangat dikeluhkan para pelanggannya, mengingat elpiji merupakan kebutuhan sehari-hari.

Penduduk lainnya yang juga jadi pengecer, Wardoyo (39), mengatakan, masyarakat tengah dilanda kepanikan. Pasalnya, isu kenaikan harga BBM di tengah kesulitan mendapatkan minyak tanah dan elpiji hanya menambah panjang persoalan yang dihadapi masyarakat kecil. Menurut dia, akibat suasana tidak kondusif, pihaknya tak mau mengambil untung besar. Tiap tabung gas

elpiji berukuran 3 kilogram dijual dengan harga Rp 13.000. Ia mengambil dari agen seharga Rp 12.150. Namun jika kondisi pasokan lancar, Wardoyo justru berani menjual elpiji 3 kg seharga Rp 13.500.

Antrean panjang pengecer elpiji kini menjadi pemandangan lumrah di pintu gerbang agen elpiji di Kota Semarang. Sejak akhir pekan lalu, antrean makin bertambah banyak. "Produksi gas di Balongan dikabarkan akan kembali lancar dua pekan mendatang," kata Pengelola CV Trical Langgeng

Jaya, Trianto Cahyo Legowo.

Jamin

Di tengah kesulitan mendapatkan elpiji, dari Tegal dilaporkan bahwa Manajer Gas Domestik Region III Jawa Tengah dan DIY Kusnendar mengutarakan, koversi mitan bersubsidi ke gas elpiji 3 kg akan diterapkan pada Juni mendatang.

Kota Tegal merupakan daerah pertama di wilayah eks Keresidenan Pekalongan yang menerapkan konversi di tahun 2008 ini. Sementara wilayah lainnya baru akan dilaksanakan pada tahun 2009.

Namun, kata Kusnendar, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar, penarikan minyak tanah bersubsidi nantinya akan dimulai setelah 90 persen tabung selesai didistribusikan.

Selain itu, Pertamina menjamin pasokan elpiji untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dengan menyiapkan kilang yang berkapasitas memadai. Kilang yang dimaksud berada di Cilacap dengan kapasitas 600 MT per hari dan Balongan dengan 1.200 MT per hari. Langkah lainnya, melakukan kerja sama dalam pengadaan elpiji.

Sementara itu, dari Karawang, Jabar, dilaporkan, puluhan petani, nelayan, dan masyarakat penjual bensin eceran di sekitar Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, mulai mendatangi SPBU sambil membawa jeriken, Rabu.

Pantauan Antara, di SPBU Desa Aman Sari, Kecamatan Rengasdengklok, terlihat antrean panjang calon pembeli bensin yang terdiri dari nelayan, petani, masyarakat penjual bensin eceran, dan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua. Bagi nelayan, petani, dan masyarakat penjual bensin eceran, pembeliannya dilakukan dengan jeriken.

(Pudyo/Syukri)

81

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<p><input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/></p>																																											
<p>KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF</p>																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td><td style="width: 10%;">FEB</td><td style="width: 10%;">MAR</td><td style="width: 10%;">APR</td><td style="width: 10%; text-align: center;">(MEI)</td><td style="width: 10%;">JUN</td><td style="width: 10%;">JUL</td><td style="width: 10%;">AGST</td><td style="width: 10%;">SEPT</td><td style="width: 10%;">OKT</td><td style="width: 10%;">NOV</td><td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	(MEI)	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	(MEI)	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
<p>HALAMAN : 6 TAHUN 2008</p>																																												

BBM

Penjualan Pertamina 2008 Turun 20 Persen

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina (Persero) memperkirakan jumlah penjualan bahan bakar nonsubsidi jenis pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bakal mengalami penurunan sampai 20 persen sepanjang tahun 2008.

Itu disebabkan disparitas (perbedaan) harga yang terlampau besar antara BBM harga keekonomian dan BBM bersubsidi.

"Penjualan pertamax dari 500.000 kiloliter (kl) tahun lalu bisa menjadi 400.000 kl. Penjualannya turun karena delta harga yang makin besar," kata *Vice President* BBM Retail Pertamina Djaelani Sutomo ketika ditemui di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (14/5).

Saat ini harga pertamax yang diberlakukan di unit pemasaran (UPms III) mencakup DKI Jakarta, Banten, dan Jabar pada 15 Mei

pukul 00.00 WIB Rp 8.950 per liter atau naik sekitar Rp 200 dari harga yang berlaku sejak awal sampai pertengahan Mei 2008. Harga yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut hampir dua kali lipat dari harga bahan bakar yang selama ini disubsidi, yakni premium, Rp 4.500 per liter.

Diakuinya, perbedaan harga yang cukup besar itu bisa membuat konsumen (masyarakat) memilih menggunakan premium yang lebih murah. Peningkatan konsumsi premium tersebut terlihat pada kuartal pertama 2008, di saat

harga minyak mentah dunia terus melonjak mendorong penjualan BBM subsidi melebihi alokasi.

Berbeda dengan kondisi sebelum adanya kenaikan harga minyak dunia, di mana harga jual pertamax dan premium tidak terpaut cukup besar pada tahun lalu, saat itu banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan dan membeli BBM dengan oktan lebih tinggi.

Selain itu, Djaelani juga mengatakan, pihaknya akan menambah atau menaikkan kandungan etanol di biopertamax dan biopremium dari 3 persen menjadi 5 persen. Langkah ini ditempuh karena biopertamax tak lagi disubsidi, dan harganya diserahkan ke pasar. "Jadi, kalau di sisi harga, bisa dibilang hampir zero. Tidak rugi. Itu yang penting. Tidak seperti biosolar yang pemakaiannya lebih banyak, tapi juga disubsidi," kata Djaelani.

Kenaikan kandungan bioetanol tersebut seiring dengan penurunan biodiesel di biosolar pada 11 April silam. Kandungan biodiesel di biosolar sendiri diturunkan dari 2,5 persen menjadi 1 persen.

Dia membenarkan harga biodiesel yang semakin ma-

82

hal, padahal tidak disubsidi pemerintah. Sehingga, Pertamina harus menanggung sendiri biaya biodiesel tersebut. Saat ini, harga biosolar sama dengan harga solar, yaitu Rp 4.300. Namun, kandungan biodieselnnya lebih mahal. "Jadi biaya pokoknya jadi lebih tinggi juga. Sementara pemerintah hanya menanggung selisih harga pasar dengan harga solar biasa," ujarnya.

Terkait dengan pengem-

baran bahan bakar nabati (BBN), Sekretaris Tim Nasional BBN Evita Legowo mengatakan, besaran mandatori penggunaan bahan bakar nabati (BBN) tidak akan ditetapkan mutlak, namun tergantung selisih harga BBN dengan BBM. Mandatori merupakan kebijakan penggunaan BBN.

Hal itu juga merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen BBN dalam rapat beberapa hari

lalu. "Jika harga BBN lebih mahal dari harga BBM, maka besaran mandatorinya sekian persen. Tapi jika harga BBN sedang di bawah harga BBM, maka besaran mandatorinya bisa berubah menjadi sekian persen," katanya. Dia menambahkan, mandatori itu rencananya akan dimulai di sektor nonsubsidi terlebih dulu, seperti sektor industri yang sebelumnya tidak ada kesepakatan antara pro-

dusen dan konsumen karena masalah pasokan.

"Kalau dilihat dari kemampuan industri menyerap biodiesel saat ini, industri bisa menggunakan biodiesel hingga 5 persen dari total konsumsi bahan bakarnya. Tapi masalahnya harga biodiesel ini masih mahal. Sementara kalau harga bioetanol sudah bagus, tapi dari sisi pemasok sepertinya belum siap," katanya. (A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

KEBIJAKAN PEMERINTAH

"Nasib" BBM Ditentukan Hari Ini

JAKARTA (Suara Karya): "Nasib" bahan bakar minyak (BBM) ditentukan hari ini. Pemerintah melalui Menkominfo M Nuh akan menjelaskan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk besaran kenaikan dan mulai kapan diberlakukan.

Untuk kepentingan itulah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepanjang Rabu (14/5) kemarin, menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, membahas masalah BBM. Hadir dalam sidang kabinet itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Kepala BIN Syamsir Siregar, dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. Rapat berlangsung hingga larut malam.

Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, sidang kabinet membahas skema penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Menko Kesra memastikan bahwa secara umum BLT siap direalisasikan dan kuponnya sudah siap dicetak.

Namun, berbagai kalangan menilai, pemerintah terlambat mengantisipasi krisis energi sebelum terjadinya lonjakan harga minyak mentah dunia. Mestinya, ketahanan energi bisa terjaga dengan memanfaatkan potensi energi nonminyak, dari panas bumi, batu bara, gas, dan *biofuel*. Selain itu, penambahan produksi minyak dan jumlah produksi yang masuk dalam APBN Perubahan 2008 sangat rendah dari target awal 1,034 juta barel per hari.

Penilaian itu disampaikan guru besar perminyakan ITB Widjajono Partowidagdo, Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto, dan ekonom Cides Umar Juoro dalam Focus Group Discussion Cides, di Jakarta, Rabu malam (14/5).

"Untuk mengurangi minyak, kita terlambat dalam memanfaatkan batu bara. Sekarang kita mau ganti seluruhnya ke gas, tapi pipa dari sumber gas ke Jawa tidak ada, sementara *floating storage* jauh dari memadai," kata Airlangga.

Menghadapi situasi seperti

sekarang, menurut dia, perlu dilakukan solusi permanen, antara lain memastikan jumlah subsidi BBM. "Lebih dari itu, harus ada penyesuaian harga dan pembatasan volume," ujarnya.

Dengan pilihan menaikkan harga BBM hingga pemberlakuannya, menurut dia, justru menimbulkan dua dampak sekaligus. "Saat ini ada kesempatan untuk menimbun BBM. Kecenderungan penimbunan itu sudah berlangsung. Bila pasokan direm, timbul masalah lebih besar," kata dia.

Umar Juoro juga menilai permasalahan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mengamankan APBN. Untuk itu, pemerintah dan semua pihak tidak boleh mempersempit masalah sebatas BBM.

"Biasanya, saat harga minyak tinggi, rupiah menguat. Tapi, kendalanya produksi minyak menurun dari tahun ke tahun," katanya.

Dia menambahkan, solusi yang harus dilakukan adalah bekerja keras meningkatkan produksi minyak, dan dibarengi dengan pemanfaatan potensi energi lainnya secara konsisten.

Sedangkan Direktur Eksekutif Cides Syahganda Nainggolan mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro diminta menjelaskan kebijakan energi nasional. Penjelasan itu relevan karena harga minyak dunia makin mahal, plus rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, potensi ketersediaan energi fosil dan nonfosil Indonesia terbilang fantastis. Bahkan Indonesia jauh lebih kaya dibandingkan China, India, serta Thailand.

Secara terpisah, pihak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menjelaskan, kenaikan harga BBM menyulitkan usaha kecil dan menengah (UKM). "Makin sulit itu pasti. Pengaruhnya terhadap tambahan biaya produksi jika harga BBM naik 30 persen, sekitar 10-15 persen. Ujung-ujungnya, hal itu berdampak pada konsumen akhir," kata Ketua Umum Hipmi Sandiaga S Uno.

Kebijakan menaikkan harga BBM itu, menurut Sandiaga,

perlu dibarengi kebijakan lain, seperti membereskan persoalan yang memberatkan dunia usaha. Antara lain, penyebab ekonomi biaya tinggi yang komposisinya mencapai 20-25 persen dari total biaya produksi.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mendesak pemerintah membenahi aturan di sektor minyak dan gas bumi yang menjadi faktor utama krisis energi.

"Selain lonjakan harga minyak dunia, salah satu faktor utama krisis energi yang dialami Indonesia saat ini juga disebabkan penanganan energi yang karut-marut," kata Agung.

Dia menambahkan, permasalahan di sektor migas terlihat pada peningkatan klaim biaya produksi (*cost recovery*) oleh perusahaan migas setiap tahunnya. Padahal produksi minyak terus merosot dari 1,5 juta barel per hari menjadi 900.000 barel per hari. Selain itu, lanjut Agung, kekacauan juga timbul akibat pola distribusi BBM yang sampai saat ini masih sarat penyimpanan.

Partai Golkar sendiri, menurut dia, saat ini belum menentukan sikap, walaupun keputusan mengenai menolak atau menerima rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu dilematis.

"Jika dikatakan kami takut untuk menentukan sikap karena takut kehilangan suara, itu tidak benar. Masalah ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi lebih pada penentuan pembelaan terhadap kepentingan mana yang lebih luas," tuturnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Gandjar Pranowo menegaskan, PDIP konsisten menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Tidak benar jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Kalau pemerintah mau menaikkan harga BBM, lakukan secepatnya dan umumkan segera besaran serta waktunya agar tidak terjadi spekulasi," katanya.

(A Choir/Rully/Kartoyo/Syamsuri/Andrian)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

LSM Abal-abal Bikin Gerakan Pro-BBM Naik

Jakarta, RM. Kelompok pendukung kenaikan harga BBM mulai berani menunjukkan batang hidung. Kemarin, puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Menuntut Kesejahteraan (PRMK) menggelar konferensi pers di Gedung Joang 45, Cikini, Jakarta Pusat.

Saat jumpa pers digelar, aktivis PRMK memajang spanduk biru bertuliskan "Kami Menuntut

Wujudkan Bantuan Langsung Tunai Sekarang Juga". Di gedung itu juga hadir belasan kaum miskin kota pendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Koordinator PRMK Rachman Tiro membantah aksi mendukung BLT ini disponsori seorang menteri.

"Ini murni, semua biayanya diperoleh dari swadaya. Kalau saya memang kebetulan bekerja, tapi yang lain tidak, kami benar-benar rakyat miskin. Tapi kalau memang ada yang mau bantu kita untuk menekan pemerintah agar segera menurunkan BLT, kami mau saja digandang," kata Rachman yang tampil necis.

Rachman juga menyangkal tuduhan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah menaikkan harga BBM. "Kami masyarakat kecil yang tidak mengerti hiruk-pikuk politik jatuh-menjatuhkan. Apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah yang terbaik buat rakyatnya."

Rachman membeberkan, gerakan ini dilakukan lantaran miris melihat penderitaan kaum marjinal. Kata dia, program BLT sangat membantu perekonomian rakyat kecil. Contohnya, seorang tetangganya bisa membuka usaha setelah menerima BLT pada tahun 2005.

"Ini bukti bahwa BLT bisa langsung menyentuh rakyat miskin, walaupun tahun lalu banyak yang diselewengkan. Untuk itu kami mengajak agar semua pihak mengawasi distribusi BLT, jangan sampai yang mampu juga menda-

patkan BLT," katanya.

PRMK juga menuntut agar penyaluran BLT diawasi secara ketat. "Selain itu, hukum seberat-beratnya semua perangkat pemerintah jika terbukti terlibat dalam penyelewengan dana BLT. Kami juga meminta elite politik jangan menghalang-halangi atau menyabotase program BLT."

Anak buah Wiranto, Saleh Husin mempertanyakan kemunculan LSM abal-abal ini. "Apakah mereka mendapat sponsor dari pemerintah untuk mendukung BLT? Saya sih berharap apa yang mereka lakukan murni untuk rakyat, nggak ada embel-embel lain," ujar Wasekjen Partai Hanura itu.

Sementara, sidang paripurna kabinet yang dilaksanakan di Kantor Presiden, kemarin mengeluarkan beberapa keputusan. Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya menyatakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM maksimal sebesar 30 persen, namun belum jelas kapan kenaikan harga BBM.

Menurut Ani, program smart card dan kartu kendali serta konversi minyak tanah akan tetap dilakukan. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan program BLT yang diperkirakan akan membutuhkan Rp 14,1 triliun untuk tujuh bulan, sejak Juni hingga Desember 2008 untuk 19,1 juta keluarga miskin. Tiap kepala keluarga mendapat Rp100 ribu per bulan.

Rapat yang berlangsung selama 8 jam itu juga menghasilkan keputusan pemerintah akan menambahkan program beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan program ketahanan pangan sebanyak Rp 4,2 triliun. ■ ONO/WHY

84

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA.
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Vox Populi
izilo

CATATAN:
Arief Gunawan
orang-biasa@yahoo.com

Menghitung Orang Miskin



KETUA DPR Agung Laksono seperti diberitakan koran ini kemarin menyatakan tidak akan memimpin gerakan mendatangi Istana untuk mempertanyakan kenaikan harga BBM kepada pemerintah. "Kita tidak akan *nghuruk* ke Istana. Kita tidak akan mempremanakan DPR," kata Agung.

Sehingga rupa-rupanya filosofi *nghuruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, dan sugih tanpa bondo*, tidak berlaku dalam urusan BBM ini. Maka urusan "memimpin-mimpin gerakan" menjadi tidak relevan. Tetapi rasionalkah menaikkan harga BBM di tengah kondisi paceklik seperti ini?

Ada beberapa opsi yang diusulkan supaya kenaikan harga BBM bisa diterima akal sehat. *Pertama*, turunkan biaya produksi BBM sekitar 25 persen. *Kedua*, sikat mafia impor. *Ketiga*, naikkan produksi BBM. *Keempat*, hentikan subsidi bunga rekapitalisasi, seperti kasus BLBI. *Kelima*, renegosiasi pembayaran utang luar negeri. *Keenam*, lakukan efisiensi

anggaran sebanyak 30 persen, tetapi tidak pukul rata dan harus berdasarkan prioritas, dan *ketujuh*, keberpihakan pemerintah harus konkret terhadap rakyat kecil.

"Keberpihakan" terhadap rakyat kecil saat ini baru nampak pada BLT yang akan disebar di enam kota besar, seperti Jakarta, Makasar, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan. Ini pun tidak efektif. Sehingga BLT tahap awal yang digelar oleh Bappenas ini diduga sekadar untuk meredam gelombang aksi unjuk rasa.

Sejak kenaikan BBM tahun 2005 yang lalu jumlah rakyat miskin bertambah 16 juta orang. Sedangkan untuk kenaikan BBM kali ini 15 juta warga terancam tidak akan menerima BLT karena ketidakakuratan data.

Menurut Deputi Menko Perekonomian sebanyak 3,9 juta RTSM akan menjadi kelompok pertama yang menerima BLT.

RTSM yang dimaksud tidak lain adalah Rumah Tangga Tergolong Sangat Miskin.

Selain RTSM ada pula RTM alias Rumah Tangga Miskin. Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, RTM berarti Rumah Tahanan Militer.

Sementara itu, harap maklum, BPS (Badan Pusat Statistik) baru akan melakukan pemutakhiran atau *updating* data orang miskin alias RTM pada Oktober-Desember mendatang, sehingga Januari tahun depan boleh jadi kita akan dibuat takjub dengan membengkaknya jumlah RTM alias jumlah orang miskin terbaru yang berkembang biak selama ini. ■

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA.
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : |

TAHUN 2008

Kritik Mega Dikritik

Jakarta, RM. Kenaikan BBM seolah jadi peluru Megawati untuk melontarkan kritikan pedas kepada Pemerintahan SBY. Dalam beberapa kesempatan, bekas Presiden wanita pertama di Indonesia itu. Terakhir, ketika berbicara di Denpasar, pekan lalu, Megawati mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM bukan solusi yang tepat, karena akan menambah rumit persoalan rakyat kecil.

Kritikan Mega terhadap kebijakan Presiden SBY dikritik oleh Roy BB Janis. Pimpinan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) itu meminta Mega tutup mulut dan tidak perlu ikut-ikutan mengkritik kenaikan harga BBM. "Sewaktu jadi presiden dan wapres, Mega juga pernah menaikkan harga BBM sampai 4 kali. Kalau Mega ikut

ngomong apalagi menunggangi, maka tak ubahnya dia seperti provokator," kata Roy, kemarin.

Menurutnya, biarkan rakyat dan mahasiswa yang menilai dan ngomong soal kenaikan BBM. "Berhentilah ngibulin rakyat," tegasnya.

Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga minta Megawati dan para elite politik lainnya supaya tidak menunggangi isu kenaikan harga BBM untuk mendiskreditkan Presiden SBY. Karena pada saat memerintah, prestasinya tidak spektakuler dan juga pernah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. "Jadi, nggak usah ikut ngompori supaya situasi jadi panas. Sebagai pemimpin, harusnya Mega dan siapa pun mendukung pro-

gram pemerintah, mencari solusi terbaik, bukan malah ikut-ikutan jadi penunggang gelap," kata Ruhut Sitompul, kemarin.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai para bekas capres yang kerap menyatakan protes terhadap rencana kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM tanpa memberikan solusi, hanya pandai bicara saja.

"Jujur saja hingga kini para capres daur ulang itu belum memberikan tawaran solusi yang radikal, mereka hanya pandai bicara dan mempolitisasi tanpa menawarkan solusi, sehingga kita sulit untuk betul-betul percaya," katanya saat dijumpai di Kantor PBNU, kawasan Kramat, kemarin.

Lebih lanjut, Ray mengatakan, aksi cuap-cuap para capres daur ulang itu cuma upaya cari simpati kepada rakyat.

Dan diyakini Ray, rakyat tak akan mungkin lagi tertipu.

Parahnya lagi, ketika mereka berkuisa justru kerap menjual aset negara kepada asing. "Contohnya Mega menjual Indosat malah ikut ngomong soal BLT dan BBM. Kini waktunya pemimpin muda untuk muncul," katanya.

Ray mengatakan, capres tua yang nekat maju di pilpres 2009 nanti, cuma dilandasi gengsi, namun tak punya visi. "Jadi bagi yang ingin masih menderita pilihlah calon tua, tapi kalau yang mau ada perubahan liriklah anak muda," pungkasnya.

Roy menambahkan, kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari, namun kenaikan itu tidak boleh menyengsarakan rakyat. Tugas pemerintah tidak hanya menyelamatkan APBN, tetapi juga menyelamatkan rakyatnya. Tugas utama SBY-JK adalah mem-

protek rakyat miskin. Roy menyentil pemerintahan SBY. Kata dia, salah satu kesalahan yang dilakukan pemerintah adalah tidak berani membongkar mafia minyak yang membuat negara rugi dan rakyat sengsara.

Menurut Roy, kegagalan pemerintah memotong mata rantai mafia minyak berakibat parah. Rakyat disuruh menanggung beban. Berdasarkan hitungan 'bodoh-bodohan', biaya produksi minyak mentah berkisar dari 7-9 dolar AS per barel. Jika harga minyak mentah dunia sekarang ini 123 dolar AS per barel, maka mestinya kita dapat 114 dolar AS per barel. Jika produksi minyak kita sebesar 927 juta barel per hari, maka keuntungan yang diperoleh negara mencapai 100 juta dolar AS per barel. "Tapi kenapa kita malah rugi? Ini pasti ada yang tidak beres. Mestinya untung kok jadi buntung." ■ HPS/ONO

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

Pertamina ups fuel prices for industries

State oil and gas firm PT Pertamina

The Jakarta Post
Jakarta

will raise the price of industrial fuels by up to 4.3 percent starting Thursday in response to continually increasing global oil prices.

Pertamina announced in a release sent to *The Jakarta Post* on Wednesday bunker oil would gain the most, with a 4.3 percent rise to Rp 6,205 (67 U.S. cents) a liter, while gasoline would jump 2.1 percent to Rp 8,345 a liter.

Kerosene will increase 1.2 percent to Rp 9,988 a liter, while diesel fuel for transportation and industry will climb 1.4 percent and 1.2 percent to Rp 10,107 and Rp 9,717, respectively.

The price of Pertamina premium fuel rose on Wednesday in Jakarta by Rp 250 a liter to Rp 9,250.

Pertamina cited the increase in global oil prices and the recent depreciation of the rupiah against the U.S. dollar as the two main reasons for the increases.

Throughout the recent period that has seen surging global oil prices, Pertamina has updated its fuel prices for its industrial customers every 15 days.

Pertamina vice president for fuels Djaelani Sutomo said, as quoted by Detikfinance, Pertamina sales would decrease 20 percent this year to 400,000 kiloliters (kl) from 500,000 kl last year, due to the huge gap in price between Pertamina products and subsidized gasoline.

However, Pertamina has said it hopes the situation will improve on the government's plan to increase the price of subsidized fuels in June.

Under plan, the government may increase subsidized premium gasoline from Rp 4,500 to Rp 6,000, and diesel for transportation from Rp 4,300 to Rp 5,500.

88

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 17

TAHUN 2008

BPMigas to simplify permits procedures

Ika Krismantari
The Jakarta Post/Jakarta

To encourage oil and gas firms to develop abandoned fields that still have reserves, the country's upstream oil and gas regulator will ease procedures for securing exploration permits.

BPMigas chairman Priyono said the move was necessary to help support the country's efforts to boost oil and gas exploration, and in particular help increase oil production, which has been on the decline over the past five years.

Priyono said in an interview Tuesday the new exploration permits would not require delineation wells or demand development plans (PODs) be submitted.

"We don't need those kinds of requirements for abandoned fields as the previous contractors will have already fulfilled them, and our main focus is to increase oil production, pronto," Priyono said.

Abandoned fields are those left idle by previous contractors for various reasons, including production inade-

quacy.

To become eligible for an exploration permit under the current regulation, new contractors must drill wells to ascertain the field's reserves, and then submit PODs and budget plans.

Priyono said the process handicapped the country in its bid to meet this year's oil production target of 977,000 barrels per day (bpd).

However, he said the agency would consult with the Energy and Mineral Resources Ministry before implementing the revision.

He said two companies, Sumatra Persada and Malaysian-based oil firm Genting Oil, were requesting permits to develop two fields, each estimated to be able to produce 4,000 bpd.

BPMigas data shows the country's average oil production for the first four months of the year reached 976,825 bpd, slightly below this year's target.

BPMigas said it was confident of meeting the target as 10 new oil blocks were expected to come onstream this year with a combined additional output of 9,300 bpd.

89

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

■ DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS

Tak Percaya Bagi Hasil Migas, Riau Akan Pasang Alat Ukur di Sumur

JAKARTA. Daerah sumber minyak terbesar di Indonesia, Provinsi Riau, tak percaya dengan laporan hasil minyak dari para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas di wilayahnya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau akan memasang alat ukur di tiap sumur minyak di daerahnya untuk memastikan produksi riil minyak yang keluar dari sumur minyak.

Riau ingin proses pengambilan hasil bumi dari wilayahnya lebih transparan. Dengan begitu bisa memberi manfaat yang besar bagi seluruh rakyat. Untuk merealisasikan rencana ini, Gubernur Riau Rusli Zainal mengaku telah minta izin kepada Menteri Keuangan.

Rusli pun mengaku Riau telah menyiapkan duit untuk membeli alat ukur yang akan di pasang di tiap sumur tersebut. "Yang pasti kami sudah menyiapkan alatnya," kata Rusli, Rabu (14/5).

Selain itu, Gubernur juga telah membentuk tim, yang bergabung dengan Departemen Keuangan untuk memastikan hasil

pasti minyak dari Riau. Dengan begitu, Riau bisa menghitung nilai pasti jatah dana bagi hasil daerah bagi Provinsi Riau. "Karena secara jujur, kami masih mempertanyakan produksi minyak dan bagi hasilnya. Kami memperkirakan, harusnya bisa menerima dana lebih besar," ucap Rusli.

Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak keberatan dengan upaya Pemerintah Provinsi Riau soal transparansi produksi minyak. Bahkan Menkeu menyatakan akan mendukung jika daerah lain melakukan hal yang sama.

Menkeu menyatakan, pembahasan produksi minyak kini sudah transparan. Termasuk, kata Menkeu, ketika menetapkan volume produksi dan nilai bagi hasil perolehan migas sewaktu membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo juga bilang, kini penghitungan dana bagi hasil makin transparan. Ia juga

membenarkan Departemen Keuangan melibatkan wakil dari Pemerintah Provinsi Riau untuk ikut menghitung duit bagi hasil dari migas untuk daerah. "Saat ini tim bersama tengah menghitung ulang kembali dari A sampai Z. Bagaimana hasilnya, ya, belum ketahuan kami proses," ucapnya.

Rusli sebenarnya meyakini bahwa jumlah produksi minyak Indonesia sebenarnya lebih besar ketimbang laporan produksi tiap KKKS. Dan mestinya pula Indonesia bisa meraup untung besar saat harga minyak mentah melampaui US\$ 126 per barel. "Jadi kuncinya transparansi," kata Rusli.

Transparansi ini, tabah Rusli, juga sangat penting agar kontraktor migas tidak semena-mena dalam mengklaim ongkos menyedot minyak atawa *cost recovery*. Sebab belakangan ini klaim *cost recovery* rada aneh, karena produksi minyak turun namun klaim *cost recovery* terus meningkat.

Martina Prianti

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 2 TAHUN 2008	

Jumat Pekan Depan BLT Sudah Mulai Mengucur

Pada tahap awal pembagiannya untuk sepuluh kota besar di seluruh Indonesia

Uji Agung Santosa

JAKARTA. Bila jadwal ini tak meleset, pemerintah akan menyalurkan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai Jumat pekan depan (23/5). Program bagi-bagi duit bagi warga miskin atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini akan berjalan serentak di 10 kota besar selama tiga hari berturut-turut.

Sepuluh kota itu adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Kupang dan Makassar. Pembagian BLT melalui kantor pos.

Hal ini terungkap di laporan Menteri Sosial kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada rapat kabinet di Istana Negara, Rabu (14/5). Laporan

ini menyebutkan, anggaran program BLT seluruhnya sebesar Rp 14,9 triliun. Sebanyak 5,69% atau Rp 806,65 miliar untuk sosialisasi, koordinasi, pembaharuan data, operasional unit pelaksana, monitoring dan evaluasi (*safe guarding*). Sedangkan sisanya senilai Rp 14,17 triliun akan dibagikan kepada warga miskin.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membenarkan isi laporan itu. "Pembagian BLT tahap awal memang di 10 kota besar," kata Bambang Widianto, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, kemarin (14/5). Cuma, Bambang mengaku belum mengetahui secara persis kapan penyaluran BLT akan mulai berlangsung. "Kami masih menunggu instruksi," begitu alasannya.

Rencananya, pemerintah akan membagi duit kepada 19,1 juta warga miskin ini dalam dua tahap. Tahap pertama, pemerintah akan membagikan duit Rp 6,5 triliun kepada warga miskin selama tiga bulan. Setelah itu, sisanya pada tahap kedua.

Jika laporan yang diperoleh KONTAN ini benar, besar kemungkinan pemerintah akan menaikkan harga BBM pada 1 Juni 2008. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa pemerintah baru akan menaikkan harga BBM jika program BLT telah siap berjalan.

Tapi, DPR masih berkeberatan dengan biaya operasional BLT yang Rp 806,6 miliar. "Dana itu seharusnya bisa untuk rumah tangga miskin," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Penyelundupan dan Spekulasi BBM Marak

Pemerintah menentukan kenaikan harga BBM setelah tanggal 23 Mei 2008

**Yohan Rubiyantoro,
Uji Agung Santosa**

JAKARTA. Semakin lama pemerintah menunda kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penyelundupan dan penimbunan semakin marak. Dan itu terbukti pada angka-angka konsumsi yang meledak.

Lihat saja tingkat konsumsi di beberapa provinsi. Data Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mencatat, konsumsi BBM di Jawa Timur pada Mei ini meningkat 12% dari konsumsi April. Dalam periode sama, konsumsi di Jawa Barat juga naik 18%. "Kenaikan konsumsi terbesar di Pulau Jawa, di

luar Jawa sedikit-sedikit," kata Ibrahim Hasjim, Anggota BPH Migas, Rabu (14/5).

Susah untuk mengatakan bahwa kenaikan konsumsi ini adalah murni karena kebutuhan yang meningkat. Sebab, kenaikan konsumsi nan mencolok itu juga terjadi seiring dengan melebarnya jurang harga antara BBM bersubsidi dengan BBM industri.

Ambil contoh, selisih harga bensin bersubsidi dengan bensin industri yang kini sudah mencapai Rp 3.564 per liter. Maklum, harga bensin industri sekarang Rp 8.064 per liter, sementara bensin bersubsidi masih Rp 4.500 per liter.

Jurang harga ini seolah menjadi insentif bagi para penyelundup untuk terus beraksi. Entah itu penyelundupan BBM bersubsidi ke industri, maupun penyelundupan BBM ke luar negeri.

BPH Migas mengaku tak berdaya mengatasi penyelundupan itu. Alasannya, usulan dana Rp 30 miliar untuk membasmi penyelundupan tak mendapat restu dari Departemen Keuangan. "Tanpa dana itu, upaya kami tidak bisa berjalan," kata Djoko Siswanto, Anggota Tim Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM.

Hampir pasti, spekulasi dan penyelundupan BBM bersubsidi

agak mereda jika selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM industri menipis. Kunci yang lain, pemerintah harus bisa makin ketat mengendalikan pemakaian BBM bersubsidi, misalnya lewat *smart card*.

Namun, pemerintah memang belum mengambil keputusan. Rapat kabinet yang berlangsung semalam baru memutuskan soal terbitnya Instruksi Presiden No 3/2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai. "Kenaikan BBM tergantung laporan pelaksanaan BLT pada 23 Mei," kata Menteri Sosial Bachtiar Chamzah.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

■ PASOKAN GAS ELPIJI

Pertamina Terpaksa Membeli 40.000 Ton Gas Elpiji dari Conoco Philips

JAKARTA. Pertamina akhirnya terpaksa membeli gas elpiji untuk menutupi kelangkaan di sejumlah daerah. Pertamina sudah memesan elpiji sebanyak 40.000 ton dari Conoco Philips yang mengelola lapangan gas di Belanak, Natuna, Kepulauan Riau.

Pasokan gas elpiji ini sedang berada dalam perjalanan dan akan tiba Jumat nanti (16/5). "Perlu waktu 59 jam untuk berlayar dari Natuna ke Tanjung Priok," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal kepada KONTAN, kemarin (14/5).

Dengan adanya pembelian ini, Pertamina berharap bisa memenuhi kebutuhan gas elpiji sebesar 3.000 ton per hari. Selain itu, perusahaan minyak dan gas plat merah ini juga berusaha menggenjot produktivitas unit pengolahan di Tanjung Priok dari 1.900 ton menjadi 2.600 ton per hari. "Pelayanan pasokan pun kami buka selama 24 jam penuh," tandas Wisnuntoro, Juru Bicara Pertamina.

Sepekan terakhir, persediaan gas elpiji menguap setelah kilang Balongan, Indramayu, rusak pada Kamis lalu (8/5). Kerusakan ini terjadi pada salah satu unit pengolahan limbah bahan



ANTARA/Rezza Estily

Pertamina berharap bisa memenuhi kebutuhan gas elpiji sebesar 3.000 ton per hari.

bakar menjadi elpiji dan *polypropylene*.

Akibat kerusakan ini, warga di berbagai daerah sudah mulai susah mendapatkan gas elpiji. Mereka terpaksa memperoleh gas dengan cara mengantre berjam-jam dan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Contohnya di Bandung, Sukabumi, Cianjur dan Jakarta. Selama ini, kilang Balongan

93

memasok sekitar 1.400 ton gas elpiji per hari ke Jakarta, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Sementara, kebutuhan untuk daerah Semarang mencapai 700 ton per hari, Jawa Barat 2.600 ton per hari dan Jakarta 1.900 ton per hari.

Sayangnya, pengadaan pasokan gas elpiji yang terkonsentrasi di Tanjung Priok ini menimbulkan antrean panjang. Banyak truk pengangkut harus mengantre berjam-jam. Akibatnya, jalur distribusi pun juga ikut terganggu.

Ini juga yang menjadi keluhan para pengusaha pengangkutan dan distributor gas. Bila saat normal, para pengusaha bisa mengangkut 23 truk elpiji setiap hari atau setara 345 ton maka

kali ini hanya enam truk saja atau hanya 90 ton saja.

Karena itu, mereka berharap Pertamina bisa segera memulihkan unit Balongan agar roda bisnis kembali lancar. "Mudah-mudahan, satu minggu lagi perbaikannya selesai," kata Muhammad Nur Adib, Ketua Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

Pertamina menilai, kelangkaan elpiji terjadi karena seretnya distribusi. Ini semakin parah karena kepanikan warga. Walhasil, konsumen banyak yang memborong persediaan gas elpiji di pasar. "Biasanya membeli satu tabung gas elpiji sekarang dua," kata Wisnuntoro.

Abet Handoko, Badrut Tamam

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2008

Harga BBM Industri Naik Lagi 2,38%

Pertamina tak bisa berbuat apa-apa untuk kalangan industri

Gentur Putro Jati

JAKARTA. Ketika, jantung para pengusaha masih berdebar kencang menanti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, PT Pertamina ternyata lebih dulu memberi kejutan. Mulai hari ini (15/5), harga BBM industri kembali naik rata-rata sebesar 2,38%.

Dibandingkan per 1 Mei 2008 lalu, harga premium naik 2,4% dari Rp 7.872,7 menjadi Rp 8.064,6. Sedangkan minyak tanah naik 1,5% dari Rp 9.578,65 menjadi Rp 9.728,7. Dan harga solar naik 1,7%, dari Rp 9.504,8 menjadi Rp 9.672,4.

Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15% dari harga jual. Harga ini tidak berlaku

untuk rumah tangga, usaha kecil, dan transportasi umum. Dalam perhitungan KONTAN, kenaikan harga BBM industri telah terjadi selama lima kali dalam tujuh bulan terakhir.

Juru Bicara Pertamina Wisnuntoro menyatakan, kenaikan ini sekadar mengikuti harga rata-rata bahan bakar di kilang Singapura atawa *Means of Platt Singapore* (MOPS) yang naik antara 1,2% hingga 4,3%. "Ada faktor tambahan lagi dari melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 0,37% dari perhitungan awal bulan ini," tambah Wisnuntoro, kemarin (14/5).

Memang, dalam menentukan harga BBM Industri setiap dua minggu, Pertamina memakai patokan harga minyak di pasar

94

Singapura dan pergerakan nilai tukar rupiah. "Bagaimana Pertamina tidak menaikkan harga? Mau tidak mau ikut naik," kata Wisnuntoro menjelaskan.

Bisnis makin tergecet

Kenaikan harga baru ini tak pelak membuat para pengusaha semakin gelisah. Ketua Bidang Kerjasama dan Advokasi Gabungan Pengusaha Makanan

Harga BBM industri yang terus naik makin membuat para pengusaha gelisah

dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengaku semakin tergecet dengan kondisi ini. Namun, Lukman mengaku bahwa kenaikan harga BBM Industri juga bukanlah suatu hal yang bisa dikontrol oleh pemerintah seperti halnya

BBM bersubsidi.

"Makanya kami minta pemerintah untuk terus meningkatkan produksi minyak, jangan justru semakin menurun. Dulu kita pernah menjadi *nett exporter* minyak, tapi sekarang justru menjadi *nett importer* yang mencapai target 1 juta barel per hari saja tidak pernah bisa," tutur Lukman.

Kata Lukman, kalau pemerintah bisa menjadikan negeri ini sebagai *nett exporter* minyak seperti dulu, harga BBM Industri bisa lebih murah daripada harga internasional sebab pemerintah memberikan subsidi.

Sampai tadi malam, rapat kabinet masih berlangsung alot. Rapat ini membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah satu opsi yang paling kencang berhembus adalah pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 28,7%.

Namun, gelombang penolakan dari berbagai kelompok masyarakat yang juga tidak kalah kencangnya membuat pemerintah menjadi ragu-ragu lagi untuk menaikkan harga BBM.

Harga Jual BBM untuk Industri (Per 15 Mei 2008)

Jenis	Harga 1 Mei	Harga Terbaru	Kenaikan
Premium	Rp 7.872,20	Rp 8.064,60	2,40 %
Minyak Tanah	Rp 9.578,65	Rp 9.728,70	1,50 %
Solar	Rp 9.504,80	Rp 9.672,40	1,70 %
Diesel	Rp 9.263,40	Rp 9.424,50	1,70 %
Minyak Bakar	Rp 5.775,90	Rp 6.044,40	4,60 %

Catatan: Harga di atas belum termasuk pajak 15%

Sumber: Pertamina

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Pilihan pahit menaikkan harga BBM

Oleh RAGIMUN
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan

Kalau kita simak perekonomian dunia sekarang ini tentu ada beberapa hal yang perlu dicatat. Ada beberapa faktor sebagai pemicu pergolakan (*turbulance*) ekonomi global. Pertama, kondisi ekonomi dunia tentu banyak dipengaruhi faktor 'perebutan' energi dunia di mana bahan bakar minyak (BBM) sebagai faktor dominan kemudian memicu krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, yang kemudian diikuti krisis pangan. Krisis pangan banyak disebabkan oleh penggunaan energi alternatif akibat melonjaknya harga minyak dunia.

Yang kedua adalah konsentrasi pengembangan teknologi energi alternatif yang agak terlambat seiring dengan berkurangnya BBM yang berasal dari fosil. Hal ini tentu menyebabkan *demand* BBM dunia tidak seimbang dengan *supply*-nya, apalagi ditambah dengan spekulasi harga minyak dunia banyak bermain.

Disinyalir pembentukan harga minyak dunia lebih banyak didominasi karena harga kontrak (*forward contract*), bukan harga riil. Tentu, kondisi seperti ini banyak memengaruhi ekonomi negara-negara yang masih sangat bergantung pada energi tidak terbarukan seperti halnya Indonesia.

Pada awal 2007, kondisi ekonomi Indonesia ditandai dengan adanya

perbaikan ekonomi yang cukup bagus. Namun berbeda dengan kondisi 2008 ini, kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi tekanan yang cukup berat akibat kenaikan harga BBM dunia yang saat ini telah melampaui US\$120 per barel, sementara asumsi APBN-P 2008 kita masih menggunakan patokan harga minyak US\$90 per barel yang sebelumnya menggunakan asumsi APBN sebesar US\$65 per barel.

Ditambah lagi naiknya harga komoditas pangan juga menambah berat tekanan ekonomi Indonesia. Harga komoditas pangan ini meningkat sekitar 50%-100% dalam setahun terakhir. Demikian juga kondisi pasar keuangan dunia, yang diawali Amerika Serikat mengalami krisis akibat *subprime mortgage*. Hal ini tentu menyebabkan likuiditas pasar keuangan

global mengalami penurunan. Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dampaknya pun bisa kita rasakan sekarang ini. Dari sisi APBN makin sulit sustainabilitas keuangan kita. Subsidi makin membengkak, defisit anggaran makin melambung dari 1,7% dari PDB tahun 2007 naik menjadi 2,1% dari PDB tahun ini.

Sulit dicapai

Oleh karena itu target-target pertumbuhan dan penyerapan pengangguran serta pengentasan kemiskinan makin sulit dicapai. Satu hal lagi yang paling berbahaya adalah apabila tingkat kepercayaan publik menjadi semakin menurun. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan serta ekspektasi masyarakat dan pasar.

Defisit anggaran bisa saja ditomboki dengan penerbitan surat utang negara (SUN) atau utang luar negeri. Namun, hal ini pun akan membawa konsekuensi buruk pada sustainabilitas APBN kita, sementara beban subsidi untuk BBM sangat tinggi maka tidak ada jalan lain yang lebih rasional adalah menyesuaikan harga BBM. Walaupun langkah ini merupakan langkah pahit bagi perekonomian kita, karena hitung-hitungannya jelas membawa konsekuensi tersendiri.

Kalau tidak ada alternatif lain, secara ekonomis kebijakan ini akan lebih baik apabila dibandingkan dengan membiarkan pemberian subsidi yang akan banyak menyedot keuangan negara. Dampak buruk lainnya adalah melebarnya disparitas harga BBM dalam dan luar negeri yang tentu sangat menggiurkan spekulan untuk menyelundupkan BBM.

Untuk saat ini saja beberapa negara telah melakukan kenaikan harga BBM. Seperti Malaysia merencanakan mencabut subsidi solar dan premium. Vietnam merencanakan kenaikan 30%. Termasuk China

kah-langkah penghematan penggunaan BBM baik di pihak swasta, apalagi di pihak pemerintah, penghematan dapat dilakukan dengan cara pengurangan penggunaan BBM maupun penghematan anggaran.

Kenaikan BBM jelas akan mengakibatkan target inflasi tidak tercapai di mana target inflasi 2008 sebesar 6,5%. Dengan asumsi APBN harga minyak dunia sebesar US\$110 per barel, penyesuaian kenaikan rata-rata jenis BBM sekitar 30% dapat mengakibatkan inflasi lebih dari 11%. Inflasi akan lebih parah menjadi lebih dari 13% apabila pemerintah tidak melakukan tindakan penyesuaian harga.

Demikian juga pertumbuhan ekonomi akan menurun dari target pertumbuhan ekonomi 6,4% menjadi sekitar 5%. Namun apabila pemerintah melakukan tindakan penyesuaian harga BBM, ekonomi masih tumbuh sekitar 6%, sementara defisit anggaran 2008 yang diperkirakan membengkak menjadi 2,5%, dengan penyesuaian harga BBM, akan dapat ditekan menjadi sekitar 1,9%.

Di samping itu berdasarkan pengalaman, keragu-raguan pemerintah menaikkan atau tidak harga BBM akan mengakibatkan ketidakpastian yang mengakibatkan ekspektasi inflasi meningkat sehingga sangat rentan terhadap rumor, termasuk terjadinya *spiral inflation*. Hal ini juga berbahaya bagi kondisi sosial politik nasional.

Apabila tingkat kepercayaan masyarakat menurun, meskipun telah ada langkah-langkah koreksi akan tidak berarti karena dampak buruknya telah terjadi dan terlampaui besar.

Salah satu paket mekanisme kebijakan penyesuaian harga BBM tentu program bantuan langsung tunai (BLT) dan program-program kemiskinan lainnya sebagai peredam program penyesuaian harga BBM dapat segera dilakukan.

Namun, kebijakan ini akan tidak berarti apabila dalam tataran implementasinya tidak sesuai dengan janji-janji pemerintah. Jangan sampai warga miskin kita hanya menelan pil pahit sebagai imbas kebijakan yang salah sasaran.



BISNISADI PURDIYANTO

telah menaikkan harga BBM pada November tahun lalu ketika harga BBM dunia mulai merangkak naik. Artinya, semakin lebar disparitas harga BBM dalam dan luar negeri.

Kenaikan BBM tentu membawa risiko. Terlepas dari dampak sosial ataupun politis, justru penyelamatan ekonomi tentu menjadi prioritas nomor wahid. Asal kebijakan pengurangan subsidi dan kebijakan kenaikan BBM ini tepat waktu, tepat sasaran serta tepat implementasinya. Hal lain yang perlu diikuti adalah lang-

jak Februari-April 2008 telah melampaui target APBN-P 2008 yang ditetapkan sebesar 0,927 juta barel per hari (bph). Bahkan, sejak dua bulan terakhir bila dilihat produksi harian, bukan hanya minyak dan kondensat, melainkan juga harus memperhatikan produksi gas, *lifting* sudah menembus angka satu juta bph.

R Priyono mengatakan, melihat perkembangan mulai Januari hingga memasuki bulan Mei ini, tidak perlu diragukan lagi bahwa target *lifting* APBN-P 2008 bakal tercapai. "Apalagi, nanti Desember 2008 produksi Blok Cepu sudah masuk, sehingga kita optimistis *lifting* bisa mencapai satu juta barel per hari," katanya di Jakarta, Selasa (13/5).

Tren peningkatan *lifting* yang mulai terlihat sejak Februari 2008, meski tidak signifikan, tetap merupakan angin segar bagi pemerintah yang tengah sibuk mengamankan APBN menyusul kenaikan harga minyak mentah dunia. Priyono menjelaskan, peningkatan produksi tahun ini yang hanya sekitar 71.000 bph, diperoleh dari 16 lapangan migas yang mulai dikembangkan tahun 2008. "Memang tambahannya kecil, karena memang lapangan-lapangan yang on stre-

am ini bukan lapangan raksa. Nah, kita baru bisa mendapatkan tambahan produksi gas yang signifikan sekitar tiga sampai lima tahun lagi," katanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2008 menetapkan asumsi *lifting* minyak diturunkan menjadi 0,927 juta bph dari asumsi sebelumnya dalam APBN 2008 sebesar 1,034 juta bph. Harga minyak (*Indonesia Crude Price/ICP*) ditetapkan US\$ 95 per barel.

Priyono mengatakan, tidak tercapainya *lifting* selama ini, lebih disebabkan faktor alami, karena hampir semua lapangan yang diproduksi merupakan lapangan tua. "Kalau mengenai investasi (di sektor migas), saya yakin sampai saat ini dan ke depan, Indonesia masih cukup menarik. Itu bisa dilihat dari banyaknya kontrak kerja sama yang ditandatangani sejak 2002. Adanya peningkatan produksi sekarang ini, juga buah dari investasi dua-lima tahun lalu," katanya.

Dia juga menegaskan, pencapaian target *lifting* juga harus memasukkan angka produksi gas, karena dalam perhitungan penerimaan negara nilai ekspor gas tetap dimasukkan. [DLS/H-13]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
--	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
--	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 19											TAHUN 2008																			

Pembagian Kompor Gas Gratis di Bogor Ricuh

BOGOR — Pembagian kompor gas gratis di Kecamatan Cibinong dan Ciawi, Kabupaten Bogor, berlangsung ricuh, Rabu (14/5). Setelah antre berjam-jam menanti jatah kompor plus tabung gas, ribuan warga juga mengaku dipungut biaya Rp 10 ribu.

Menyusul sosialisasi konversi minyak tanah ke gas pekan lalu, 24 kecamatan di wilayah ini akan mendapat kompor gas gratis pada tahap pertama. Kemarin (14/5), Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Ciawi mendapat

jatah pertama pendistribusian kompor dan tabung gas gratis.

Ribuan warga yang telah membayar iuran Rp 10 ribu mengantre di lokasi tempat pembagian. Mereka saling berdesakan sehingga kericuhan pun tak dapat dihindari. Warga saling berebut tempat demi mendapatkan kompor gas gratis. Tak hanya itu, di antara antrean itu terlihat juga ibu-ibu membawa serta anak mereka. "Saya membayar Rp 10 ribu, katanya untuk biaya transportasi pengiriman barang," ujar salah seorang warga yang tak mau di-

sebut namanya.

Namun, Junda, ketua RT setempat, membantah pengakuan warga tersebut. Menurutnya, pungutan itu tak wajib, hanya untuk administrasi RT. "Kami tidak pernah mematok harga. Hal itu sifatnya sukarela. Jika warga mau membayar ya syukur. Jika tidak, tak masalah," papar Junda.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindagkop Kabupaten Bogor, Nuradi, mengatakan kompor gas tersebut gratis dari Pertamina. Pihaknya belum menemukan kecurangan sema-

cam itu. "Kami belum menemukan hal itu. Jika benar terjadi, hal itu diatur dalam ketentuan protap Pertamina. Kami hanya sebagai pemantau," akunya.

Nuradi menjelaskan, adanya pembagian kompor gas gratis di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, hari ini berdasarkan desakan dari Ketua RW dan RT setempat, agar warganya segera mendapat kompor gas gratis. Setelah dilakukan diskusi, lanjut Nuradi, mereka sepakat untuk membagikan kompor gas di Kecamatan Cibinong,

khususnya Kelurahan Harapan Jaya hari itu juga. "Mereka mendesak pihak konsultan untuk membagikan kompor gas gratis hari itu juga. Padahal, berdasarkan rencana hari ini hanya dilakukan sosialisasi dan demo cara menggunakan kompor gas itu."

Menurutnya, hari ini juga dibagikan kompor gas gratis di wilayah Cigombong, Cijeruk, dan Caringin. Di Ciawi, sebanyak 500 kompor gas gratis dibagikan per RW. Dan, pekan depan akan dilanjutkan di daerah Bojong dan Tanjung. ■ c63

97

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

KEMISKINAN

Verifikasi Data BLT Harus Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS — Pemutakhiran data rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai atau BLT tahun 2008 harus dipercepat. Pemerintah didesak untuk menggunakan data baru dalam menyalurkan BLT guna menghindari bantuan salah sasaran dan meredam gejolak.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro, Rabu (14/5) di Jakarta, mengemukakan, tidak ada pilihan bagi pemerintah selain segera melakukan pemutakhiran data rumah tangga miskin.

Namun, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan tidak sependapat dengan Bambang. Menurut Rusman, tekanan untuk mempercepat proses pembaruan data hanya akan menimbulkan masalah baru.

"Sayang kalau dipaksakan selesai sekarang, misalnya, karena pasti akan ada kasus lagi di lapangan. Pembagian BLT tahap pertama nanti akan sekaligus menguji data penerima BLT. Berita acara pengalihan kartu pada pembagian tahap pertama itu merupakan perbaikan awal bagi pembaruan menyeluruh yang sedang disiapkan BPS," ujarnya.

Manfaat lain

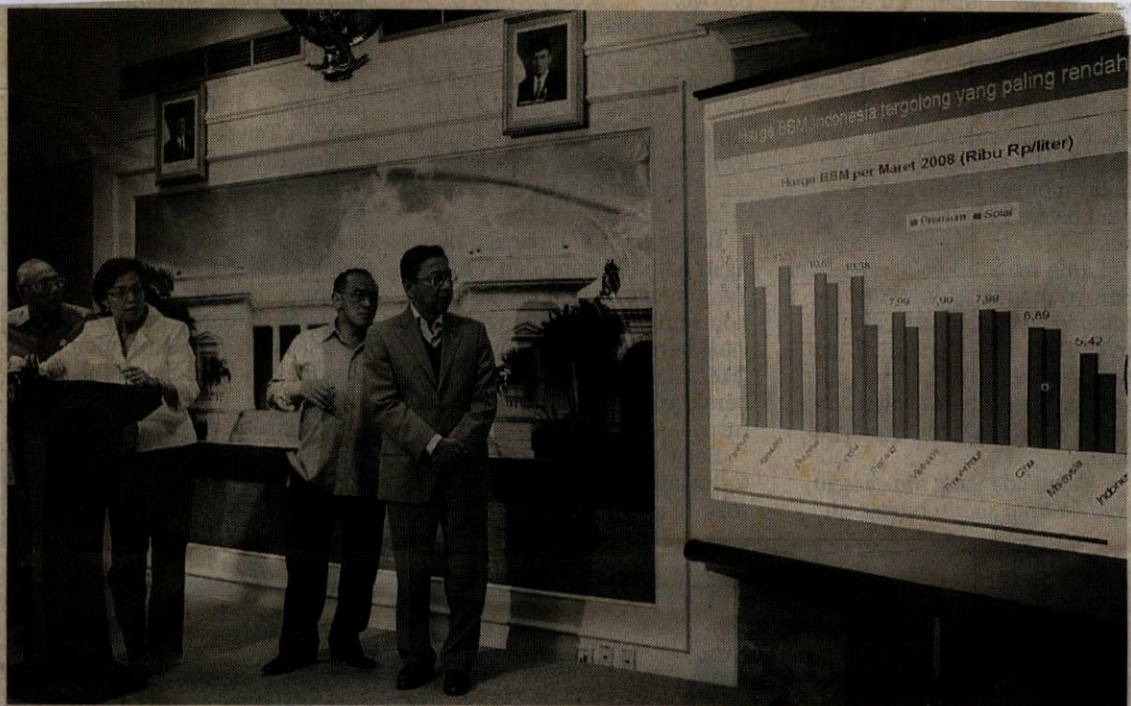
Rusman lebih jauh menjelaskan, data keluarga miskin yang diperbarui BPS tidak hanya akan berguna bagi program BLT, tetapi juga bermanfaat untuk mempertajam program beras untuk rakyat miskin, jaminan kesehatan masyarakat, dan reforma agraria bagi penduduk miskin.

Polemik mengenai pemutakhiran data BLT meletup setelah pemerintah memberikan sinyal akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga premium, solar, dan minyak tanah direncanakan rata-rata 30 persen.

Langkah menaikkan harga BBM bersubsidi ini, menurut pemerintah, harus diambil untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, pemerintah akan langsung mengambil langkah menyelamatkan kelompok masyarakat miskin dengan menjalankan program jaring pengaman sosial berupa BLT.

Pemerintah memang belum memberikan waktu pasti kapan akan menaikkan harga BBM. Namun, dalam beberapa kesempatan, baik Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harga BBM bersubsidi akan resmi naik begitu data penerima BLT siap.

Selepas rapat kabinet paripurna semalam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2008 tentang BLT untuk rumah tangga sasaran. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menjelaskan, inpres tersebut akan berlaku untuk pe-



KOMPAS/ALIF ICHWAN

Seusai mengikuti rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dari kiri ke kanan) Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, dan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengadakan jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/5) malam. Jumpa pers menjelaskan mengenai persiapan pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai antisipasi kenaikan harga BBM. Sebelum memberikan BLT, pemerintah akan mengevaluasi kesiapan program BLT yang akan dilakukan pada 23 Mei 2008.

laksanaan BLT sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menambahkan, kepastian kenaikan harga BBM akan ditentukan selepas tanggal 23 Mei 2008. Tanggal itu merupakan finalisasi persiapan BLT. "Pokoknya BBM naik setelah Presiden puas dengan persiapan pelaksanaan BLT," ujar Aburizal.

Data penerima BLT

Terkait dengan kesiapan data penerima BLT, Rusman menjelaskan, sejak akhir 2007, BPS memperbarui data 19,1 juta keluarga penerima BLT pada 6.300 kecamatan di Indonesia. Namun, sampai saat ini, pembaruan data itu baru mencapai 1.000 kecamatan. Jadi, BLT yang diperhitungkan Rusman mulai dibayarkan Juni 2008 masih akan menggunakan data lama pada 5.300 kecamatan.

Pada 1.000 kecamatan yang sudah diperbarui datanya, Rusman memperkirakan, sekitar 5 persen berubah dari data semula. "Ada yang dulunya tidak berhak, tapi tercatat sebagai penerima BLT. Ada yang karena meninggal atau mutasi lain sehingga ada ketidakcocokan," ujarnya.

Libatkan pemerintah daerah

Guna mempercepat pemutakhiran data, Bambang memaparkan, pemerintah daerah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan,

harus dilibatkan dalam pengumpulan data. Pemberdayaan pemda akan mempercepat pemutakhiran data rumah tangga miskin.

Apabila pemerintah terdesak untuk menyalurkan BLT pada akhir Mei, penggunaan data lama BPS dalam penyaluran BLT cukup dilakukan pada bulan pertama. Pada bulan kedua penyaluran BLT, pemerintah sudah harus siap menggunakan data baru hasil verifikasi.

Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dengan tegas menolak menggunakan data lama untuk pembagian BLT tahun 2008. Gubernur khawatir penggunaan data lama akan memicu keributan.

Keluhan serupa muncul dari Kabupaten Sukabumi sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Asep Ripa Gahara. Demikian pula Pemerintah Kota Bandung seperti dikatakan Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung Ema Sumarna. Ema memperkirakan, penyaluran BLT akan meleset karena data 2005 belum diperbarui.

"Saat ini jumlah orang miskin di Jatim 7,1 juta jiwa. Kalau harga BBM naik, pasti jumlah orang miskin juga bertambah. Jadi, untuk BLT seharusnya tidak menggunakan data lama. Nanti banyak yang tidak kebagian dan jadi rebutan," tutur Imam Utomo.

(JOY/DAY/OIN/RYO/INU/LKT/INA/APA/AHA/MHF/THT/A09)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

Rekor Baru Tercatat Lagi

TAHUN 2008

Beberapa Pihak Melakukan Penimbunan Minyak

WINA, RABU — Badan Energi Internasional atau IEA memperkirakan, tingginya harga minyak mengurangi permintaan produk minyak di AS dan Eropa. Namun, harga minyak terus mencapai rekor baru, yakni 127 dollar AS per barrel, pada hari Selasa di New York.

Dalam laporannya yang dikeluarkan Rabu (14/5), IEA menurunkan pertumbuhan permintaan minyak global tahun ini dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen. Namun, harga minyak terus meningkat.

Harga minyak pada perdagangan Rabu kemarin sedikit turun setelah para pelaku pasar memperkirakan ada kenaikan persediaan minyak AS. Namun, harga minyak sempat mengukir rekor baru lagi pada harga 126,98 dollar AS per barrel. Kontrak minyak utama di bursa New York jenis

light sweet untuk pengiriman Juni turun 44 sen turun menjadi 125,36 dollar AS per barrel.

Para investor mengkhawatirkan China, yang impornya turun dibandingkan Maret lalu. Analisis merasa tidak pasti, apakah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter di China akan berdampak pada permintaan minyak. Permintaan besar dari China dan negara-negara berkembang menjadi salah satu penyebab kenaikan harga minyak belakangan ini.

IEA juga mengatakan, aksi-aksi penimbunan menjadi faktor

lain di balik kenaikan harga minyak. Hal ini menjadi faktor pendorong kenaikan harga minyak. Ada kompetisi antara pihak yang ingin menaikkan persediaan dan pengguna yang membeli minyak untuk kebutuhan nyata.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah memutuskan tidak meningkatkan produksi. Hal ini memunculkan penilaian bahwa OPEC senang dengan harga minyak yang tetap tinggi. Karena itu, Victor Shum, analis energi pada Purvin dan Gertz di Singapura, mengatakan, harga minyak masih akan terus naik.

Senator tekan Arab Saudi

Dari Washington diberitakan, para senator AS dari Partai Demokrat mengajukan sebuah undang-undang (UU) baru, yang

bertujuan memblokir kesepakatan jual beli senjata AS senilai 1,37 miliar dollar AS pada Arab Saudi.

Para senator mengatakan, hal itu merupakan upaya untuk mendesak Arab Saudi menaikkan produksi minyak. UU itu akan menjadi senjata bagi Presiden AS George W Bush yang sedang berkunjung ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

Senator Charles Schumer mengatakan, penolakan Senat AS itu akan bisa membatalkan kontrak penjualan senjata. "Pemerintah AS harus menggunakan semua kekuatan untuk mencegah OPEC memanipulasi pasokan minyak dunia," kata Schumer.

"Jika Arab Saudi menginginkan senjata, kita menginginkan kenaikan produksi minyak," katanya. (AP/REUTERS/AFP/JOE)

99

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2008

Oil prices drop ahead of U.S. energy data

Agence France-Presse
London

The price of oil fell on Wednesday on expectations of rising U.S. energy inventories, after striking a record high point US\$126.98 per barrel the previous day, traders said.

New York's main oil futures contract, light sweet crude for June delivery, fell 44 U.S. cents to \$125.36 per barrel.

London's Brent crude contract for June dropped 99 U.S. cents to \$123.11.

The U.S. Energy Information Administration will release its inventory report for the week to May 9 on Wednesday at 1430 GMT.

"The weekly report could help to determine a near-term direction or even put a little pressure on the market," said analysts at the Sudden

brokerage.

New York crude struck a record high of \$126.98 a barrel on Tuesday despite new predictions of slower demand growth for energy, traders said.

On Tuesday, the International Energy Agency cut its forecast for growth in global oil demand.

The Paris-based IEA forecast in a monthly report that crude oil demand in 2008 would stand at 86.8 million barrels per day (bpd) — about 390,000 bpd less than a previous estimate given in April.

The energy monitoring agency also said it now estimated world oil demand in 2007 at 85.8 million bpd.

"The oil market has been holding steady since it rose Tuesday on concerns about distillate tightness in the market," said Victor Shum, an ana-

lyst at Purvin and Gertz energy consultancy in Singapore.

Shum added that the market remains bullish, despite the IEA report, as it turned its focus to the weekly report on U.S. energy stockpiles.

"The figures on crude and product inventory results will provide some direction," Shum said.

Along with an inflow of investor funds, analysts have cited a variety of factors for this year's price spikes, including rising energy demand from Asian powerhouse economies China and India, and OPEC's refusal to pump more crude.

But analysts said the market was also looking overbought as threatened disruptions to Middle East supply have failed to materialize and as militant threats against oil company operations in Nigeria have been priced in to current values.

A group of Democratic Party Senators in the United States on Tuesday threatened to block a multi-million dollar U.S. arms deal with Saudi Arabia unless the kingdom increases oil production and helps cut soaring gasoline prices.

The senators introduced a resolution of disapproval on the arms sale.

U.S. President George W. Bush will raise the issue of high oil prices and their negative economic impact when he visits Saudi Arabia on Friday, White House spokeswoman Dana Perino said.

Saudi Arabia is the biggest producer in the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), which produces about 40 percent of the world's oil.

100

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : //

TAHUN 2008

Warga Keluhkan Kelangkaan Gas Elpiji

[BEKASI] Sejumlah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan kelangkaan gas elpiji sejak tiga hari terakhir. Kelangkaan ini membuat masyarakat pengguna bahan bakar itu bingung jika ingin masak.

"Saya heran pasokan gas elpiji kosong di mana-mana. Minyak tanah harganya membubung tinggi. Apa sih mau-nya pemerintah?" keluh seorang warga Kota Bekasi, Indri (29), kepada SP, Selasa (13/5). Kelangkaan gas elpiji mulai terjadi ketika isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menguat dalam sepe-

kan ini.

Ibu rumah tangga ini mengaku sudah tidak bisa memasak karena bahan bakar tidak ada lagi di rumahnya. Indri terpaksa memasak menggunakan kompor minyak tanah walaupun harganya mencapai Rp 6.000 per liter di tingkat pengecer.

Sejumlah agen dan distributor gas mengaku sejak akhir pekan lalu tidak lagi mendapatkan pasokan elpiji dari Pertamina di Marunda Jakarta Utara. Kondisi itu mengakibatkan gas elpiji sulit diperoleh warga.

• Agen gas elpiji Andella

Distrindo di Jl Kemakmuran Raya, Margajaya, Bekasi Selatan, Jajat Kosasih (55) mengaku, pasokan gas sudah tiga hari ini tidak dikirim. "Biasanya setiap dua hari agen mengirim sekitar 60 tabung gas ukuran 3 Kg dan 12 Kg. Namun tiga hari ini pasokan sudah tidak datang. Alasannya, saya tidak tahu," ujarnya. Ditambahkan, bila suplai tabung gas tidak segera dikirim Pertamina, maka usahanya untuk sementara akan ditutup.

Harga Sudah Naik

Sementara itu, di sejumlah daerah di Kota Bekasi seperti

di Kampung Sawah, di Pondok Melati, dan Jatimurni, harga gas elpiji ukuran 12 kg sudah naik.

Kenaikan berkisar Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per tabung. Seperti di Kampung Sawah, harga semula Rp 54.000 dalam tiga hari ini naik menjadi Rp 58.000.

"Ini kan aneh, harga-harga sudah pada naik, padahal harga BBM belum naik. Bagaimana jika Pemerintah jadi menaikkan harga BBM, berarti harga-harga yang sudah naik makin melambung," ujar Ny Sumantri, ibu rumah tangga warga Kampung Sa-

wah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi Edi Sukarna kepada SP mengatakan, kelangkaan gas elpiji di Kota Bekasi terjadi di Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Bekasi Timur serta sebagian Bekasi Selatan.

Faktor penyebab kelangkaan tabung gas ini, kata Edi karena adanya kerusakan lang gas unit pengolahan Pertamina, di Balongan, dramayu Jabar. Kondisi yang menyebabkan suplai elpiji untuk wilayah Jabodetabek tersendat. [HTS/Y-4]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Hemat BBM dengan Suplemen Air

Suplemen air ternyata bisa membuat motor/mobil kita lebih ringan tarikannya, hemat BBM-nya dan berkurang emisi CO₂-nya. Kenapa? karena gas Hidrogen yang dihasilkan dari pemecahan elemen H₂O membuat kinerja pembakaran di mesin lebih sempurna.

Teman kos saya sudah memverifikasi percobaan tersebut. Sebelumnya, teknologi sederhana tepat guna ini sudah dikembangkan secara swadaya oleh Edukasi Gerakan Masyarakat Cinta Air (<http://egmca.org>) di lereng Merapi. Tepatnya di dusun Sumber Muntilan Jawa Tengah di bawah supervisi Romo Kirjito Pr sejak 3 bulan silam.

Kekuatan arus listrik 2 A diambil dari *accu* (aki), lantas dialirkan lewat elektrode ke dalam botol air, sehingga memecah elemen H₂O menjadi 2H dan 1O. Gas itulah yang kemudian disalurkan melalui selang kecil ke *in take* filter. Sedangkan untuk menampung airnya cukup menggunakan botol bekas air mineral, termos anak, dan toples.

Niscaya teknologi tepat guna ini bisa menjadi solusi praktis untuk mengatasi kenaikan harga BBM di Indonesia dan menghambat laju pemanasan global (*Global Warming*) di bumi kita tercinta ini. Untuk info lebih lanjut dan teknis perakitannya silakan klik di <http://water4gas.com/> dan www.h2earth.org.

Tarsisius Nugroho Angkasa SPd
Dusun Soropadan 84 C
Yogyakarta

102

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Panik

[JAKARTA] Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (5/5) lalu, tampaknya tidak disiapkan dengan matang, sehingga membuat pemerintah terkesan panik. Hingga lebih dari sepekan pascapengumuman Presiden, masih banyak hal yang belum dituntaskan, seperti perhitungan kenaikan, sosialisasi, dan penyusunan jaring pengaman bagi kaum miskin. Bahkan sidang kabinet membahas kenaikan harga BBM, baru dilakukan Rabu (14/5).

Dampak dari ketidaksiapan tersebut, pengumuman kenaikan berlarut-larut, sehingga mengakibatkan dampak psikologis muncul mendahului dampak langsung kenaikan harga BBM. Di banyak daerah kelangkaan BBM akibat penimbunan marak, dan harga kebutuhan pokok mulai melambung.

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno, Rabu, mengakui, sosialisasi rencana kenaikan harga BBM baru dilakukan setelah ada keputusan kabinet, yang dipertegas dengan pernyataan Presiden pada 5 Mei lalu, bah-

wa harga BBM akan dinaikkan. Sumber SP mengungkapkan, sosialisasi rencana kenaikan harga BBM oleh Departemen ESDM lamban karena di lingkup instansi itu ada sejumlah oknum pejabat yang memandang sosialisasi sebagai proyek.

Selain masalah sosialisasi, program *Smart Card* atau kartu pintar untuk membatasi konsumsi BBM yang rencananya akan digulirkan menyusul kenaikan harga BBM diberlakukan, juga menjadi proyek rebutan. "Sehingga, meskipun saat ini konsepnya masih belum matang, tetap dipaksakan akan diterapkan setelah harga BBM dinaikkan," katanya.

Tidak Kompak

Sumber di pemerintahan lain yang tidak bersedia disebut namanya juga mengungkapkan, meskipun telah memutuskan menaikkan harga BBM guna mengamankan APBN, belum ada kekompakan di internal pemerintah dalam memilih perhitungan mana yang akan dipakai sebagai dasar menentukan besaran kenaikan harga.

"Jadi keputusan menaikkan harga BBM ini benar-benar keputusan politis yang sa-

ngat minim perhitungan angka-angka. Apalagi, kalau dari laporan Departemen ESDM meski harga minyak tinggi sebenarnya dari sisi anggaran kita masih aman karena penerimaan dari migas juga naik. Opsi menaikkan harga BBM lebih kencang dari Depkeu dan Bappenas," ungkapnya.

Tidak hanya itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman bagi kaum miskin juga masih belum matang. Misalnya, satu instansi setuju menggunakan data lama, tetapi instansi lain ingin data itu diperbarui meskipun memerlukan waktu dan biaya. Dari sisi anggaran, untuk sosialisasi rencana kenaikan, program *Smart Card* maupun BLT hingga kini masih digodok, karena setiap instansi terkait memiliki perhitungan yang berbeda.

Untuk itu, Sekjen Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi Sofyano Zakaria meminta masyarakat, terutama kalangan politisi, agar tidak hanya menyuarkan penolakan kenaikan harga BBM, tetapi juga menyoroti kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan masalah BBM, terutama mengenai kesiapan pemberlakuan harga baru BBM.

Secara terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan menilai, pemerintah panik akibat ulah sendiri. "Rencana kenaikan harga BBM diumumkan pada saat bantalan belum disiapkan," katanya.

Menaikkan harga BBM menjelang pemilu sama sekali tidak menguntungkan duet Yudhoyono-Kalla yang memang berniat kembali mencalonkan diri. "Ini juga membuat pemerintah panik," tandasnya.

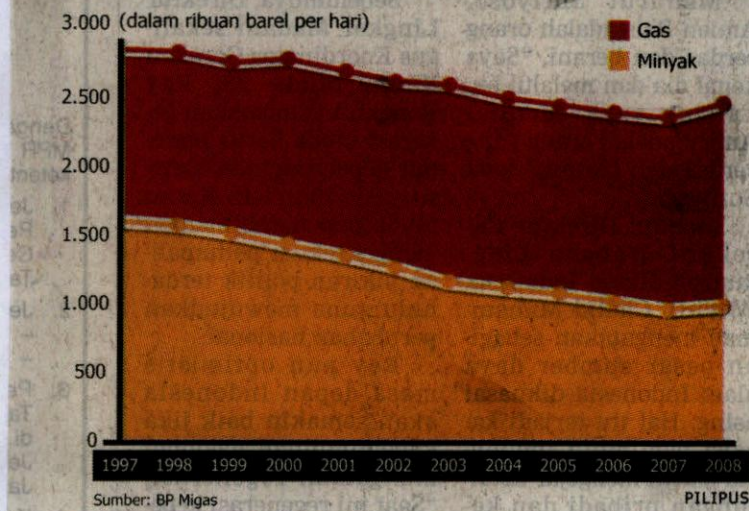
Dia menambahkan, kepa-

nikan itu tidak perlu terjadi kalau sejak akhir 2005, saat harga BBM dinaikkan 126 persen, pemerintah serius menaikkan produksi minyak mentah, gencar melakukan diversifikasi energi, meningkatkan efisiensi di Pertamina dan PLN, dan melaksanakan hemat energi di berbagai lini.

Menurutnya pemerintah tidak mungkin menaikkan harga BBM sebelum peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional. [H-13/DLS/PD/A-17]

Terkait halaman 15

Produksi Minyak & Gas Bumi 1997-2008



103

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Bukan Masanya Lagi Tuduh Ada Penunggangan

BIN Tuding Demonstrasi Ditunggangi

JAKARTA, KOMPAS – Sudah bukan masanya lagi menyebutkan adanya pihak yang menunggangi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang terjadi saat ini adalah aksi bersama karena munculnya perasaan senasib.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR Ganjar Pranowo, Rabu (14/5) siang. Dalam jumpa pers tersebut, F-PDIP DPR menegaskan sikapnya menolak rencana kenaikan harga BBM dan akan bergabung dengan elemen masyarakat yang bersikap sama.

Ucapan Ganjar itu menanggapi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menuding sejumlah unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM belakangan ini ditunggangi. Penunggang unjuk rasa itu, menurut Syamsir, beragam, antara lain mantan pejabat.

"O, jelas. Kalian sudah tahu itu (soal unjuk rasa yang ditunggangi). Tak usah bertanyalah. Ada mantan menteri, ada yang lainnya," ujar Syamsir sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu.

Mengenai gangguan karena berbagai unjuk rasa, Syamsir menyebutkan, sejauh ini yang terganggu adalah ketertiban yang bisa mengarah pada gangguan keamanan.

Tentang tudingan adanya mantan pejabat yang menunggangi unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto meminta adanya pemahaman karena apa yang dihadapi Indonesia adalah persoalan dunia, bukan hanya Indonesia. "Ini harus kita hadapi bersama, kita kelola agar kita bisa dengan baik melewati situasi ini. Peran media massa penting untuk memberi pencerahan," ujarnya.

Saling tuding

Anggota F-PDIP, Aria Bima, menyebutkan, terhadap rencana pemerintah menaikkan harga

104

BBM, banyak elemen yang bersikap sama.

Justru Aria menyebutkan, jangan-jangan keputusan menaikkan harga BBM itu yang ditunggangi. Hal itu mungkin terjadi ketika perusahaan besar sudah bersenyawa dengan pengambil kebijakan.

Bagi F-PDIP, kenaikan harga BBM pada 2008 bukanlah kebijakan yang tepat karena tidak sebanding dengan ongkos sosial yang ditanggung rakyat. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM masih merupakan langgam lama dan diperburuk dengan ketiadaan perencanaan yang matang. Janji yang disampaikan pemerintah saat menaikkan harga BBM pada 2005 tidak ada yang terpenuhi, misalnya diversifikasi dan konversi energi yang kacau.

Anggota F-PDIP, Nusyirwan Soejono, menekankan, segala hal yang berkaitan dengan APBN haruslah dibicarakan dengan DPR. Yang jelas, dalam perubahan APBN tidak terdapat pos anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) plus seperti yang dijanjikan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM.

F-PDIP sekaligus mengklarifikasi pemberitaan media massa yang menyebutkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri setuju dengan kenaikan harga BBM. Menurut Ganjar, Megawati tidak pernah menyatakan setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah punya kewenangan menaikkan harga. Hanya saja, ketidaktegasan bersikap itulah yang menyebabkan kepanikan masyarakat. Rentang waktu penyampaian rencana kenaikan telah dimanfaatkan para spekulan. (DIK/INU)

104